

# MERETAS SEJARAH STKIP MENUJU IKIP PGRI PONTIANAK

Muhammad Syaifulloh  
Eka Jaya Putra Utama  
Basuki Wibowo  
Yuver Kusnoto



**MERETAS SEJARAH STKIP MENUJU IKIP PGRI PONTIANAK**  
Copyright © Muhammad Syaifulloh, dkk. 2015

Diterbitkan oleh Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2015  
Perumahan Nogotirto II, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292  
Tlp. 085105018945; Fax. (0274) 623606  
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id  
facebook: Penerbit Ombak Dua  
website: www.penerbitombak.com

PO.623.08/15

Penulis: Muhammad Syaifulloh, dkk.

Tata letak: Tim ombak

Sampul: Dian Gama Jaya

Pergustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
**MERETAS SEJARAH STKIP MENUJU IKIP PGRI PONTIANAK**

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015

4+ 128 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-258-314-1

MERETAS SEJARAH  
STKIP MENUJU IKIP PGRI PONTIANAK

Muhammad Syaifulloh  
Eka Jaya Putra utama  
Basuki Wibowo  
Yuver Kusnoto

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

**Lingkup Hak Cipta**

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana**

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# DAFTAR ISI

**PENGANTAR PENULIS ~ vii**

**KATA PENGANTAR oleh Prof. Dr. H. Samion H AR, M. Pd. ~ ix**

**BAB I PENDAHULUAN ~ 1**

- A. Latar Belakang ~ 1
- B. Tentang Buku Ini ~ 3
- C. Tinjauan Pustaka ~ 4
  - 1. Konsep Lembaga/Organisasi ~ 4
  - 2. Konsep Manajemen ~ 5
  - 3. Konsep Kepemimpinan ~ 7
- D. Metode ~ 9
- E. Sistematika Penulisan ~ 10

**BAB II LATAR BELAKANG BERDIRINYA STKIP PGRI PONTIANAK  
(HABIS STKIP TERBITLAH IKIP PGRI) ~ 11**

- A. Pengantar: Sebuah Embrio Perjuangan ~ 11
- B. Sejarah STKIP PGRI Pontianak ~ 13
  - 1. Masa Embrio Perjuangan (1981-1982) ~ 13
  - 2. Masa Tunas Pembangunan (1982-1998) ~ 21
  - 3. Lorong Zaman Pembentukan (1998-2006) ~ 28
  - 4. Membangun Kecharuman (2007-2014) ~ 39
- C. Sejarah IKIP PGRI Pontianak ~ 46
  - 1. Proses Peralihan STKIP Menuju IKIP ~ 45
  - 2. Dari Harum sampai Mantab ~ 55

**BAB III PERAN LEMBAGA DAN YAYASAN STKIP PGRI PONTIANAK  
DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN ~ 61**

- A. Peran Lembaga STKIP PGRI Pontianak ~ 61
- B. Peran Yayasan STKIP PGRI Pontianak ~ 87

**BAB V PENUTUP ~ 91**

**DAFTAR PUSTAKA ~ 94**

**DOKUMENTASI ~ 96**

**LAMPIRAN ~ 103**

**DAFTAR INFORMAN ~ 123**

**TENTANG PENULIS ~ 126**

# PENGANTAR PENULIS

**B**uku ini diterbitkan sebagai buah pikir dan sumbangsih perguruan tinggi, dalam hal ini IKIP PGRI Pontianak, terhadap kemajuan bangsa. Sebagai sebuah risalah tentang keinginan, keresahan, dan membaca lingkungan, buku ini mencoba memberi jawaban tentang permasalahan terutama dunia pendidikan.

Dalam usia yang sudah 34 tahun ini, lembaga ini sudah melewati beberapa babakan sejarah, lengkap dengan aneka dinamika. Rentang waktu yang lama telah memupuk kedewasaan dalam berpikir dan kematangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Lamanya proses bergerak di dalam dunia pendidikan membuat IKIP PGRI Pontianak mampu memberikan beragam warisan keyakinan, filosofi, tata nilai, cita-cita, tindakan, dan pelajaran berharga.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, IKIP PGRI Pontianak menjadi tempat untuk belajar bagi semua lapisan masyarakat di Kalimantan Barat. Keberadaannya merupakan pintu bagi masyarakat menuju pencerahan dalam bidang pendidikan. Kampus merupakan jendela pengetahuan yang merupakan dasar inspirasi dan ilham bagi kemajuan masyarakat sekitar. Inilah hakikat dari lembaga pendidikan yang diwariskan para pendiri ketika mereka merintis lembaga pendidikan, IKIP PGRI Pontianak.

Sebagai sumur pengetahuan, sebuah lembaga pendidikan harus berbagi pengetahuan terutama dalam hal pendidikan. Kampus adalah mata air pengetahuan yang tidak pernah kering. Ia menjadi tempat bagi setiap orang untuk menghapus dahaga pengetahuan,

dan melawan kebodohan. Sebuah lembaga pendidikan berkewajiban memberi, sekaligus menggali pengetahuan. Secara garis besar, menggali dan berbagi pengetahuan merupakan kunci hakikat dari lembaga pendidikan.

Berlandaskan dari tugas kampus sebagai penggali dan pemberi pengetahuan itulah, STKIP PGRI Pontianak bertekad menjadi kampus yang HARUM: Harmonis, Amanah, Ramah, Unggul, Mandiri merupakan wujud dari cita-cita yang diikrarkan untuk dibangun oleh kampus yang berdomisili di Kota Pontianak ini. Cita-cita ini tidak hanya mencerminkan kehendak IKIP PGRI Pontianak tetapi didasarkan pada realitas yang berkembang di masyarakat sekitar kampus, yaitu masyarakat Kalimantan Barat. Cita-cita ini lahir dari rahim kesejarahan lembaga yang bercermin pada pendahulunya. Cita-cita ini lahir dan berkembang seiring dengan kepercayaan masyarakat.

Buku ini ditulis bukan sekedar untuk mendokumentasikan perjalanan sejarah IKIP PGRI Pontianak. Lebih dari itu, buku ini ditulis untuk mengajak seluruh komponen kampus secara khusus dan masyarakat pada umumnya membantu dan meyakinkan lembaga ini dalam meneguhkan dirinya mengabdikan kepada masyarakat, melalui cita-cita yang besar yang dirumuskan sebagai “KAMPUS HARUM”.

STKIP telah usai, tetapi rohnya tetap hidup menatap masa depan yang lebih baik. Nama IKIP mulai muncul seiring berkembangnya zaman, jiwa zaman “HARUM” berubah ke arah “KAMPUS MANTAB”, Mandiri, Amanah, Nalar, Tanggungjawab, dan Bermartabat. Semakin kuat tekad membangun pendidikan, semakin mantab keteguhan memegang tali sejarah kegemilangan.



# KATA PENGANTAR

**Prof. Dr. H. Samion H AR,M.Pd<sup>1</sup>**

**A**lhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Swt. atas nikmat yang diberikan kepada kita semua terutama nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya dan bertujuan agar ilmu tersebut bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Buku ini adalah rangkaian usaha keras yang telah dilakukan dalam usaha melanjutkan pewarisan sejarah. Sejarah perlu dan penting diwariskan terutama untuk menjadi pelajaran dan pengajaran bagi kita sebagai generasi penerus sejarah. Sejarah yang membicarakan masalah-masalah dalam semua aspek kehidupan yang terjadi di masa lalu itu, dapat menjadi bekal dalam mengambil sikap menghadapi masa depan.

Lembaga STKIP yang sekarang menjadi IKIP PGRI Pontianak hanyalah rangkaian gerak sejarah yang harus dipahami sebagai lecutan semangat membangun pendidikan. Atas dasar semangat membangun dan mengembangkan pendidikan sama halnya membangun jiwa dan roh pembangunan nasional. Melalui pendidikan yang ber “roh” bangsa ini akan mampu berdaya saing kuat bahkan mampu mengatasi segala krisis yang dialami dewasa ini.

---

<sup>1</sup> Rektor IKIP PGRI Pontianak.

Teori Alvin Toffler menyatakan bahwa gelombang peradaban manusia itu dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama adalah abad pertanian. Gelombang kedua adalah abad industri dan gelombang ketiga adalah abad informasi. Sementara ini Toffler baru berhenti di sini. Namun teori-teori terus berkembang, saat ini peradaban manusia dengan kompetisi yang ganas dan globalisasi, masuklah manusia pada era peradaban baru yaitu Gelombang ke-4. Ada yang menyebutnya sebagai *Knowledge-based Economy* ada pula yang menyebutnya sebagai ekonomi berorientasi pada Kreativitas.

Lembaga ini akan mantab sesuai dengan cita-cita IKIP PGRI Pontianak yang bersemboyan “KAMPUS MANTAB” akan tercapai salah satunya adalah mengutamakan kreatifitas. Semoga dengan hadirnya buku ini mampu menggugah semangat dan kreatifitas. Dengan belajar sejarah, saya yakin kreatifitas tersebut akan tumbuh subur seiring dengan sifat dan sikap kritis terhadap pelajaran sejarah.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah menghadirkan buku ini sebagai pendokumentasian dan pengarsipan sejarah yang selama ini tidak dihiraukan. Terima kasih juga kepada civitas akademika yayasan dan lembaga IKIP PGRI Pontianak yang telah berjuang keras membangun lembaga ini tentunya dengan niat tulus membangun pendidikan.

Pontianak, 2 Mei 2015

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia pendidikan selalu berubah secara dinamis, terutama perguruan tinggi swasta yang tentunya memiliki pasang surut dalam rangka mengembangkan eksistensinya. Perguruan tinggi swasta berdiri karena adanya kebutuhan dan mengakomodir keinginan masyarakat. Tidak jarang banyak perguruan tinggi swasta yang terkikis oleh zaman akibat kurang dan lemahnya manajemen dalam pengelolaannya.

Di era modernisasi ini perkembangan teknologi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan merupakan tuntutan dan masalah besar yang akan dan harus dihadapi banyak perguruan tinggi swasta di Indonesia. Dinamika ini ternyata menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh perguruan tinggi swasta. Kemampuan perguruan tinggi swasta sangat terbatas, terutama masalah keuangan dalam tata kelola, yang hanya mendapatkan sokongan dari masyarakat. Apabila masyarakat tidak percaya dan kurang memberikan dukungan yang dimaksud, maka perguruan tinggi tersebut tidak dapat bisa beroperasi dan pada akhirnya mengalami kehancuran.

Pengalaman di atas merupakan sebuah renungan dan harus direspon, terlebih bagi perguruan tinggi yang sedang dalam proses pembangunan. IKIP PGRI Pontianak yang dulu bernama STKIP PGRI

Pontianak merupakan salah satu dari sekian ribu perguruan tinggi swasta yang hingga saat ini mampu bertahan dan eksis walaupun hanya mengembangkan sayapnya pada keguruan. Sementara permintaan masyarakat dengan kebutuhan peluang kerja yang semakin banyak sehingga persaingan di Kalimantan Barat sudah mulai kompetitif.

STKIP PGRI Pontianak merupakan bagian dari masyarakat, dituntut mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara berkelanjutan. Sebagai lembaga pendidikan tinggi ilmu kependidikan yang bertugas mengembangkan dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa, STKIP PGRI Pontianak tetap konsisten menjalankan terobosan baru, inovasi, integrasi dalam bidang ilmu. Selain itu menyelenggarakan pendidikan akademik, profesional dalam bidang ilmu pendidikan. Salah satu yang dihasilkan oleh STKIP PGRI Pontianak adalah sarjana atau tenaga pendidik tingkat Sekolah Dasar dan Menengah.

Adapun tujuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan STKIP PGRI Pontianak, yakni, mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, profesional, menciptakan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyebarkan ilmu pengetahuan sehingga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Kiprah STKIP PGRI Pontianak dalam mengembangkan ilmu pendidikan bukan hal yang mudah. Semenjak 1981 hingga saat ini masih mampu bertahan dan tetap eksis sehingga memiliki aset yang tentunya tidak lepas dari kepemimpinan yang pernah berjuang untuk kemajuan lembaga ini. Terjadi hal yang menarik dalam sejarah STKIP PGRI Pontianak, yakni lembaga Sekolah Tinggi lebih dahulu berdiri sementara yayasan yang menaungi lembaga justru terbentuk belakangan. Namun ini tidak menjadi masalah,

justru membuat sebuah dinamika yang melahirkan keprihatinan dan keinginan untuk memajukan lembaga ini dengan giat. Berawal dengan berdirinya tiga jurusan ketika itu dan saat ini mampu mencetak sepuluh program studi. Hal ini adalah sebuah prestasi yang sangat luarbiasa.

Penelitian meretas sejarah IKIP PGRI Pontianak adalah untuk menghimpun, menginventarisasikan dan mempublikasikan kepada khalayak masyarakat Indonesia terutama mengawali penelitian sebuah penelitian lembaga kependidikan swasta. Selanjutnya STKIP PGRI Pontianak memiliki kemampuan dan komitmen yang besar dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari lembaga pendidikan dan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah latar belakang berdirinya STKIP PGRI Pontianak?
2. Bagaimanakah perkembangan STKIP PGRI Pontianak dari masa ke masa?
3. Bagaimanakah peran Lembaga dan Yayasan dalam mengembangkan STKIP PGRI Pontianak?

## **C. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui:

1. Latar belakang berdirinya STKIP PGRI Pontianak.
2. Perkembangan STKIP PGRI Poontianak dari masa ke masa.
3. Peran lembaga dan yayasan dalam mengembangkan STKIP PGRI Pontianak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sejak berdiri hingga sekarang, STKIP PGRI Pontianak tetap eksis dan dipercaya masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan yang berkomitmen terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik. Perjalanan yang sangat panjang dan dalam usia dewasa saat ini, apabila tidak diinventarisir atau pencatatan sejarahnya kurang baik maka ingatan akan sejarah tersebut dapat terlupakan.

Sejarah bukan sekedar dicatat dan diingat. Namun jauh dari itu terdapat sesuatu yang sangat penting, yakni pengalaman dan ilmu dari sebuah perjalanan sejarahnya. Sehingga menjadi bekal bagi generasi penerus dan pembanding di mana terjadi perubahan zaman dalam setiap episode. Oleh karena itu perjalanan STKIP PGRI Pontianak dapat dinikmati ketika ada kepedulian dari kita semua khususnya kaum atau golongan yang cinta dan hidup matinya di lembaga ini.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Konsep Lembaga/Organisasi**

Stoner<sup>1</sup> berpendapat organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Lebih lanjut Mooney<sup>2</sup>, menjelaskan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa organisasi adalah suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama bukan sama-sama kerja.

Selain organisasi ada juga istilah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam

---

<sup>1</sup> Hussey, D. E. 2000. *How to Manage Organisational Change*, London: Kogan Page limited.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Emille Durkheim dengan teori fungsionalnya. Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Ilmu organisasi merupakan ilmu yang penting dimiliki, karena dalam kehidupan kita tidak lepas dari organisasi. Dimulai dari lingkungan yang sederhana dari keluarga, hingga struktur yang rumit seperti organisasi pemerintahan. Adapun ciri-ciri organisasi menurut Kreitner, Robert, dan Kinick<sup>3</sup> yaitu: (1) mempunyai tujuan & sasaran, (2) mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati, (3) adanya kerja sama dari sekelompok orang, dan (4) mempunyai koordinasi tugas dan wewenang.

## 2. Konsep Manajemen

Manajemen sebagaimana dirumuskan oleh Jones et. al<sup>4</sup> adalah *the planning, organizing, leading and controlling of resources to achieve organizational goals effectively and efeciently*. Pengertian manajemen yang dirumuskan oleh Jones adalah pengertian manajemen yang lazim digunakan dan disepakati oleh sebagian besar tokoh manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian,

---

<sup>3</sup>Kreitner, Robert and Angelo Kinicki. 2001. *Organization Behavior*, Singapore: McGraw-Hill, Inc.”

<sup>4</sup>Jones, Gareth R., et. al., 2000. *Contemporary Management, Second Edition*, United States of America: The MCGraw-Hill Companies.

pengarahan dan pengawasan penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dubrin<sup>5</sup> memberikan pengertian manajemen suatu proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi *planning, and decision making, organizing, leading and controlling*.<sup>5</sup> Nada yang berbeda, definisi manajemen diungkapkan oleh Robbin<sup>6</sup> yaitu sebagai suatu proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.

Perubahan pada dasarnya melakukan segala sesuatu secara berbeda. Davidson<sup>7</sup> menjelaskan bahwa perubahan merujuk pada sebuah terjadinya sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan bisa juga bermakna melakukan hal-hal dengan cara baru, mengikuti jalur baru, mengadopsi teknologi baru, memasang sistem baru, mengikuti prosedur-prosedur manajemen baru, penggabungan (*merging*), melakukan reorganisasi, atau terjadinya peristiwa yang bersifat mengganggu (*disruptive*) yang sangat signifikan.

Rumusan perubahan yang diungkapkan oleh Davidson tersebut, bahwa perubahan organisasi termasuk lembaga pendidikan tinggi bisa terjadi di berbagai aspek kehidupan organisasi. Potts dan LaMarsh melihat bahwa perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju keadaan yang diinginkan di masa depan. Perubahan dari keadaan sekarang tersebut dilihat dari sudut struktur, proses, orang dan budaya. Perubahan lembaga menurut Potts dan LaMarsh dibatasi pada

---

<sup>5</sup>Dubrin, Andrew J. 1990. *Essentials of Management*, Ohio: South-Western Publishing Co.

<sup>6</sup>Robbins, Stephen P. 2003. *Organization Behavior*, New Jersey: Prentice Hall International Inc.

<sup>7</sup>Davidson, Jeff. 2005. *Change Management, The Complete Ideal's Duides*, Jakarta: Prenada.



aspek struktur organisasi, proses, orang dan budaya organisasi.

Manajemen perubahan sebagaimana diungkapkan oleh Potts dan La Marsh dan dianut Wibowo<sup>8</sup> adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Menurut Hussey<sup>9</sup>, faktor pendorong terjadinya perubahan adalah perubahan teknologi yang terus meningkat, persaingan semakin intensif dan menjadi lebih global, pelanggan semakin banyak tuntutan, profil demografis negara berubah, privatisasi bisnis milik masyarakat berlanjut dan *stakeholders* minta lebih banyak nilai. Sedangkan Kreitner dan Kinicki<sup>10</sup>, menyebutkan kebutuhan akan perubahan dipengaruhi oleh kekuatan eksternal yang mencakup *demographics characteristics, technological advancements, market changes, social and political pressures* dan kekuatan internal yang meliputi *human resources problems/prospects, managerial behavior/decisions*.

### 3. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut Young<sup>11</sup> lebih terarah dan terperinci dari definisi sebelumnya. Menurutnya kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan

---

<sup>8</sup>Wibowo. 2006. *Managing Change, Pengantar Manajemen Perubahan, Pemahaman Tentang Mengelola Perubahan dalam Manajemen*, Bandung: LFABETA.

<sup>9</sup>Hussey, D.. E. 2000. *How to Manage Organisational Change*, London: Kogan Page limited.

<sup>10</sup>Kreitner, Robert and Angelo Kinicki. 2001. *Organization Behavior*, Singapore: McGraw-Hill, Inc."

<sup>11</sup>Kartono, Kartini. 2001. *Pemimpinan dan Kepemimpinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Moejiono<sup>12</sup> memandang bahwa kepemimpinan tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori sukarela (*compliance induction theorist*) cenderung memandang kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin.

Kemudian Davis<sup>13</sup> memberikan pengertian kepemimpinan dengan mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan rasa bersemangat demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan, kepemimpinan adalah faktor manusia yang mengikat satu kelompok secara bersama-sama dan mendorong mereka ke suatu tujuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses kegiatan atau aktifitas dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Kepemimpinan pada dasarnya merupakan inti dari fungsi manajemen yaitu proses pengarahan sumber daya untuk mencapai tujuan .

Sekalipun kepemimpinan tidak sama dengan manajemen, tetapi kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Perbedaan antara manajemen dengan kepemimpinan dikemukakan Pamudji<sup>14</sup> sebagai berikut.

- a. Kepemimpinan itu nuansanya mengakar kepada kemampuan

---

<sup>12</sup> Moedjiono, Imam, 2002, *Kepemimpinan Dan Keorganisasian*, UII Press, Yogyakarta.

<sup>13</sup> Thoha, Miftah. 1983. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>14</sup> Pamudji, S. 1995. *Kepemimpinan: Pemerintahan Di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.

individu, yaitu kemampuan dari seseorang pemimpin. Sedangkan manajemen mengarah kepada sistem mekanisme kerja.

- b. Kepemimpinan merupakan kualitas atau interaksi antara si pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu. Sedangkan manajemen merupakan fungsi status dan wewenang (*authority*); jadi kepemimpinan menekankan kepada pengaruh pada pengikut (wibawa), sedangkan manajemen menekankan pada wewenang yang ada.
- c. Kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada pada dirinya (kemampuan dan kesanggupan) untuk mencapai tujuan sedangkan manajemen mempunyai kesempatan untuk mengarahkan dana dan daya (*funds and forces*) yang ada didalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.
- d. Kepemimpinan diarahkan untuk mewujudkan keinginan si pemimpin, walaupun akhirnya juga mengarah ketercapaian tujuan organisasi, sedangkan manajemen mengarah tercapainya tujuan secara langsung.
- e. Kepemimpinan lebih bersifat hubungan personal yang berpusat pada diri si pemimpin, pengikut dan situasi; sedangkan manajemen bersifat impersonal dengan input logika, rasio, dana, analisis, dan kuantitatif.

## F. Metode

Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang sering dinamakan *History Research*<sup>15</sup>. Penelitian sejarah meliputi beberapa tahap yaitu *heuristik*, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pencarian dan pengumpulan sumber berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari para pelaku, saksi mata dan arsip maupun dokumen yang ada. Sumber sekunder diperoleh melalui buku-buku hasil penelitian

---

<sup>15</sup> Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

maupun penulisan sejarah yang berkaitan.

Langkah selanjutnya adalah kritik sumber. Proses kritik dilakukan dengan dua sisi, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Selanjutnya proses interpretasi adalah melakukan penafsiran berbagai fakta yang telah didapatkan dari proses kritik sumber. Dan proses terakhir adalah historiografi yaitu hasil berupa tulisan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini merupakan penulisan sejarah. Dengan memanfaatkan periodisasi dan kronologi waktu akan sangat bermanfaat untuk memudahkan dalam penulisan sejarah. Berikut ini adalah sistematika penulisan sejarah dengan judul “meretas sejarah STKIP menuju IKIP PGRI Pontianak” yaitu:

BAB I Pendahuluan, dalam bagian ini dikemukakan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat, tinjauan pustaka, dan metode yang digunakan.

BAB II Latar Belakang berdirinya STKIP PGRI Pontianak, dalam bagian ini menjelaskan latar belakang berdirinya STKIP PGRI Pontianak sekaligus menjelaskan proses perkembangan sejarah yang diawali dengan STKIP PGRI Pontianak sampai menjadi IKIP PGRI Pontianak.

BAB III Peran lembaga dan yayasan dalam mengembangkan pendidikan. Dalam bagian ini menjelaskan secara mendalam peran dan kontribusi yang diberikan IKIP PGRI Pontianak bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

BAB IV Penutup, bagian ini menampilkan kesimpulan dan saran yang dapat dikemukakan atas dasar hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB V Daftar Pustaka dan beberapa Lampiran untuk menunjang serta melengkapi sumber yang digunakan dalam penelitian ini.

# BAB II

## LATAR BELAKANG BERDIRINYA STKIP PGRI PONTIANAK (HABIS STKIP TERBITLAH IKIP PGRI)

### **A. Pengantar: Sebuah Embrio Perjuangan**

Sekitar tahun 1980-an, Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Drs. Hadari Nawawi melihat adanya kekurang guru di Kalimantan Barat. Atas dasar tersebut muncullah gagasan beliau untuk mendatangkan para guru dari luar Kalimantan Barat, pada waktu itu banyak yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Untuk mewujudkan gagasan itu, Pak Hadari (sapaan beliau) menemui gubernur pada masa itu ialah Bapak Sujima untuk mendiskusikan hal tersebut. Hasil dari pertemuan itu akhirnya gagasan tersebut mendapat respon baik dari bapak gubernur, yang pada akhirnya Pak Hadari diminta segera mengurus segala keperluan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Pak Hadari meminta bantuan pada teman-temannya di P dan K untuk segera mengurusnya.

Setelah para guru dari luar Kalimantan Barat datang, kemudian dikirim ke daerah-daerah di kabupaten ternyata belum memenuhi keperluan tenaga guru di SD-SD seluruh kabupaten di Kalimantan

Barat. Masalah ini segera dipikirkan oleh Pak Hadari untuk segera diambil solusinya. Atas saran dari teman-teman Pak Hadari muncullah gagasan untuk merekrut lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk menjadi guru-guru SD di Kalimantan Barat.

Seiring berjalannya waktu ternyata kedua program tersebut belum memadai untuk memenuhi kebutuhan guru-guru SD di Kalimantan Barat. Karena itu muncullah ide dari para pendidik baik yang berada di lingkup P dan K Kanwil Depdikbud maupun FKIP UNTAN untuk membentuk lembaga pendidikan tinggi yang khusus mencetak guru. Lembaga pendidikan itu diberi nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Pontianak dengan Prof. Dr. Hadari Nawawi sebagai Ketuanya.

Alasan pemberian nama PGRI setelah nama STKIP adalah karena pada waktu itu Bapak Hadari Nawawi merangkap jabatan sebagai ketua PGRI Provinsi Kalimantan Barat. Dengan nama tersebut diharapkan memberi citra baik dan prioritas utama bagi kepentingan guru dan sebagai upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas guru di Kalimantan Barat.

Setelah disepakati oleh tokoh-tokoh pendidikan di Kalimantan Barat, pada tanggal 12 Juni 1981 dikeluarkan Surat Keputusan (SK) pendirian STKIP PGRI Pontianak, dengan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi sebagai Ketuanya.

Sebelum dikisahkan lebih lanjut alangkah baiknya kita susun periodisasi waktu perkembangan STKIP PGRI Pontianak menuju IKIP PGRI Pontianak sebagai berikut:

1. Masa Embrio Perjuangan, yaitu masa yang didalamnya syarat akan perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pendidikan Kalimantan Barat. Masa ini dipimpin oleh Prof. Dr. H. Hadari Nawawi 1981-1982.
2. Masa Tunas Pembangunan, yaitu masa pembangunan dengan

penuh jerih payah guna menciptakan dan memperjuangkan guru sebagai orang yang mempunyai peran sangat penting dan mulia dalam membangun bangsa dimulai dari membangun lembaga. Masa ini dipimpin oleh Drs. H. M. Ali As, SH 1982-1998, dan dilanjutkan dengan Prof. Dr. H. Uray Husna Asmara, M. Pd 1998-2002.

3. Masa Lorong Zaman Pembinaan, yaitu masa pembinaan manajemen, ketertiban, kedisiplinan dan keteraturan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan maupun guru. Masa ini dipimpin oleh Dra. Hj. Uray Titin Hiswari, Msi 2002-2006.
4. Masa Membangun Kecharuman, yaitu masa pembangunan tahap kedua yang ingin meraih kecharuman di seluruh masyarakat. Masa ini dipimpin oleh Prof. Dr. H. Samion HAR, M. Pd 2006-2014 selama 2 periode.
5. Masa dari Harum sampai Mantab, yaitu masa perubahan STKIP PGRI Pontianak menjadi IKIP PGRI Pontianak sebagai langkah awal menuju cita-cita dan kekuatan guru di masa yang akan datang. Masa ini masih dipimpin Prof. Dr. H. Samion HAR, M. Pd 2014-sekarang

## **B. Sejarah STKIP PGRI Pontianak**

### **1. Masa Embrio Perjuangan (1981-1982)**

Pendiri STKIP PGRI Pontianak adalah Hadari Nawawi. Beliau pada saat itu juga menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Tanjungpura (UNTAN). Di samping itu juga beliau adalah Ketua Pengurus PGRI wilayah Kalimantan Barat dan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat. Dengan jabatannya tersebut memberi peluang yang besar dalam melakukan gerakan perjuangan di bidang pendidikan. Bahkan beliau sebagai pelopor pendidikan Kalimantan Barat.

Pendidikan di mata Hadari Nawawi adalah jiwanya. Dengan membangun jiwa pendidikan membawa kearah kemajuan kemausiaan yang hakiki. Sedemikian cintanya kepada pendidikan tidaklah heran jika prestasinya sangat gemilang termasuk menjadi rektor<sup>1</sup>. Dalam memajukan gurupun beliau turut andil besar melalui Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) wilayah Kalimantan Barat yang menjadi titik tolak dalam pembentukan STKIP PGRI Pontianak.

Pada masa itu beliau melihat banyak guru di Kalimantan Barat tidak berpendidikan akademis. Banyak guru yang hanya bermodal kemauan untuk mengajar di daerahnya sendiri. Oleh karena itu beliau memandang sangat perlu untuk mendirikan Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk mendidik guru yang tidak berpendidikan aklademis itu. Maka tahun 1981 beliau mengumpulkan tokoh-tokoh baik dari masyarakat maupun di lingkungan akademis (seperti Daliman, Aten, dkk.) untuk memusyawarahkan pembentukan perguruan tinggi tersebut.

Setelah disepakati akhirnya dibentuklah Perguruan Tinggi khusus mendidik guru dengan nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Pontianak. Dinamakan demikian karena Perguruan Tinggi ini memang bertujuan untuk mendidik para guru dan karena Hadari Nawawi juga merangkap sebagai Ketua Pengurus PGRI wilayah Kalimantan Barat sehingga dinamakan PGRI sebagai payung Perguruan Tinggi tersebut<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>“Pada masa awal adalah masa perjuangan. Mengajar bukanlah beban melainkan kewajiban dan panggilan hati. Hal ini merupakan salah satu perbedaan jiwa pendidikan masa lalu dengan masa kini”.

<sup>2</sup>“PGRI adalah suatu organisasi guru yang dibentuk dengan tujuan melindungi dan upaya mensejahterakan para guru di Indonesia. PGRI membawahi yayasan PGRI baik di tataran sekolah maupun perguruan tinggi. Di Perguruan Tinggi dinamakan Yayasan Pengurus Lembaga Perguruan Tinggi YPLPT PGRI”.



Pada masa awal perkuliahan karena belum mempunyai bangunan tersendiri, proses pembelajaran dilakukan di Sekolah Pendidikan Guru (SPG) pada sore harinya. Lokasi sekolah SPG tersebut sekarang terletak di samping Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Pontianak Jl Sumatra. Perkuliahan di sekolah ini sampai tahun 1986 sejak ada peraturan penutupan SPG oleh pemerintah Republik Indonesia<sup>3</sup>. Dosen pengajarnya berasal dari teman-teman sejawat Hadari Nawawi di Universitas Tanjungpura seperti bapak Daliman<sup>4</sup>.

Pada tahun 1986 Hadari Nawawi bersama dengan Ali As berencana membangun bangunan kampus STKIP PGRI Pontianak. Atas usaha keduanya diperoleh tanah milik Minggu di Jl Prof M Yamin Gg Ilham seluas 1 Ha dengan harga 20 juta pada waktu itu. Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud, bapak Sudarto menjelaskan bahwa proses pembelian tanah itu bertahap yaitu dari 1 Ha menjadi 2 Ha. Sehingga diperoleh tanah 1 Ha lagi seharga 25 juta di tempat yang berdekatan<sup>5</sup>.

Perjuangan mendapatkan tanah telah berhasil. Masalah timbul mengenai tahap selanjutnya, yaitu pembangunan gedung perkuliahan. Karena membutuhkan biaya yang besar dalam pembangunan gedung yaitu 164 juta oleh arsekon<sup>6</sup>, maka bapak Ali As<sup>7</sup> berani berkorban demi terwujudnya kampus STKIP PGRI

---

<sup>3</sup>"Lihat peraturan pemerintah tentang penghapusan SPG", dan lihat arsip sejarah STKIP PGRI Pontianak.

<sup>4</sup>"Beliau adalah dosen matematika UNTAN dan sebagai pelopor pendidikan matematika di Kalimantan Barat".

<sup>5</sup>"Pembelian tanah secara bertahap. Yang pertama 1 Ha seharga 20 juta, kemudian 1 Ha lagi seharga 25 juta di Gg Ilham. Lebih lanjut lihat catatan lapangan beserta bapak Sudarto".

<sup>6</sup>"Arsekon adalah pemborong yang dipimpin oleh Ir Asmuni sebagai kepala pemborong dalam pembangunan gedung STKIP PGRI Pontianak pertama".

<sup>7</sup>"Bapak Ali S adalah ketua STKIP PGRI Pontianak yang kedua setelah Hadari Nawawi, beliau juga menjabat Rektor UNTAN. Beliau juga mantan Bupati Kapuas

Pontianak dengan langkah kredit BANK atas namanya sendiri. Selain itu modal yang dimiliki STKIP PGRI Pontianak tidak mencukupi, maka atas usaha bapak Hadari Nawawi juga akhirnya Pemda memberi bantuan 50 juta dan kekurangannya ditutup atas biaya dari kredit BANK tersebut.

Tahap pembangunan dimulai dari pembangunan ruang kelas bertingkat dan ruang ketua beserta ruang Administrasi. Pemerintah Daerah (pemda) memberi bantuan meja dan kursi dari 2 ruang kelas sampai 3 ruang kelas lagi secara bertahap. Tahun 1988 pembangunan auditorium yang membutuhkan biaya sebesar 90 juta akhirnya selesai selama 3 bulan. Selanjutnya dibangun masjid yang membutuhkan biaya 6 juta akhirnya dapat terselesaikan. Tahap selanjutnya pembangunan gedung laboratorium dan pembangunan perpustakaan<sup>8</sup>.

Program studi yang dibuka pertama kali di STKIP PGRI Pontianak adalah jurusan Administrasi Pendidikan. Jurusan ini dibuka karena pada masa itu sangat dibutuhkan oleh guru yang tidak berpendidikan akademis. Setelah 5 tahun berjalan, pemerintah RI menutup jurusan ini<sup>9</sup>. Jurusan yang mula-mula ada selanjutnya adalah jurusan Bimbingan dan Konseling (BK), PPKN dan Matematika. Kemudian urusan lain yaitu tentang jumlah mahasiswa yang dimiliki hanya sebanyak 200-an orang mahasiswa dari maksimal 400 orang mahasiswa.

Dalam upaya mengisi kekosongan para guru, maka STKIP PGRI Pontianak sejak awal berkampanye ke daerah-daerah kabupaten

---

Hulu”.

<sup>8</sup>”Perpustakaan dibangun agar dapat membantu mahasiswa dalam pencarian sumber pustaka yang susah. Buku-buku sebelum pembangunan perpustakaan ini diperoleh dari hasil karya dosen pengajar baik UNTAN maupun STKIP PGRI Pontianak sendiri. Sedangkan buku-buku lain masih terbatas”.

<sup>9</sup>”Lihat peraturan pemerintah tentang jurusan Administrasi Pendidikan”, dan lihat Arsip Sejarah STIP PGRI Pontianak”.

untuk bekerjasama. Lebih Nampak lagi setelah Sekolah Guru Olahraga (SGO) ditutup oleh pemerintah Republik Indonesia. Maka kabupaten mengirimkan guru-guru olah raga yang tidak memiliki pendidikan akademis. Yaitu dengan dibukanya jurusan baru yaitu D2 Penjaskes<sup>10</sup>.

Masalah pengajar/dosen pada awalnya adalah tenaga pengajar/dosen yang berasal dari UNTAN. Oleh karena itu STKIP PGRI Pontianak berinisiatif menyekolahkan tenaga pengajar yang masih S1 untuk menempuh pendidikan S2 untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar/dosen tersebut. Angkatan pertama yang melakukan studi lanjut S2 tersebut seperti Sulha, Uray Titin, Ahmad Djamalong dan Siswoyo<sup>11</sup>.

### **Hadari Nawawi: Pelopor dan Pembaharu Pendidikan**

Hadari Nawawi lahir di Sekadim, 18 Januari 1941. Beliau anak kedelapan dari 11 orang anak dari pasangan suami istri yang bernama Nawawi Abdul Qadir dan Raba'ah HM Noer. Ayahnya adalah seorang pedagang yang terkenal di Pemangkat yang kelak menjadi figur teladan baginya. Ketika ayahnya mengungsi ke Sekadim yang berjarak belasan kilometer dari Kota Pemangkat akibat serangan Jepang yang mulai memasuki daerah pedalaman termasuk pemangkat. Lebih-lebih nama Nawawi menjadi buruan waktu itu. Di Desa Sekadim itulah Hadari Nawawi dilahirkan<sup>12</sup>.

Masa kecilnya hidup dalam nuansa religius dan kemandirian.

---

<sup>10</sup>"lihat peraturan pemerintah tentang penghapusan SGO".lihat juga SK pendirian D2 dan S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan STKIP PGRI Pontianak".

<sup>11</sup>"Angkatan pertama STKIP PGRI Pontianak memberangkatkan study lanjut S2 dan S3 sebagai reaksi atas kekurangan dosen".

<sup>12</sup>"Aswandi, Nur Iskandar, dan Yusriadi. 2012. *Hadari Nawawi: Pemikir dan Pejuang Pendidikan*. Pontianak: Borneo Tribune Press, hlm. 13".

Mandiri dan memegang teguh agama yang kuat adalah ajaran ayah bundanya yang akan mengantarkan kepada beliau mencapai cita-citanya. Dimulai dari sekolah rakyat, Akmur namanya, SGB, SGA, lalu IKIP Bandung sampai menjadi guru besar di UI dan mendirikan beberapa kampus di Kalimantan Barat seperti Universitas Tanjungpura (UNTAN), Universitas Terbuka (UT) dan STKIP PGRI Pontianak<sup>13</sup>.

Terjun dalam dunia pendidikan adalah tujuan hidupnya. Bagi beliau pendidikan adalah pintu gerbang kemajuan, kesuksesan, kedamaian dan kebahagiaan. Lewat pendidikanlah manusia dapat meraih segala impiannya. Tidaklah heran jika semboyan beliau dalam menulis adalah lebih baik jadi kutu buku daripada kutu jalanan. Lebih baik sehari sehelai benang daripada tidak sama sekali. Hal inilah yang mengantarkan kepada beliau menyandang anugerah “Bapak Pendidikan Kalimantan Barat”.

Beliau ahli ilmu administrasi pendidikan, ahli manajemen, ahli statistik, dan ahli ilmu perencanaan pendidikan. Dengan berbagai keahlian tersebut memberikan jalan lebar dalam pembentukan lembaga-lembaga pendidikan di Kalimantan Barat seperti pembentukan STKIP PGRI Pontianak, Universitas Terbuka, dan Universitas Tanjungpura (UNTAN).

Di samping itu, tulisan-tulisan beliau bermunculan berbagai buku-buku yang menjadi dasar rujukan para ahli pendidikan saat ini terutama di Kalimantan Barat. Karya-karya Ilmiah beliau diterbitkan oleh UGM Press yang saat itu UGM adalah perguruan tinggi yang sarat akan nama dan prestasi di Asia Tenggara seperti buku *Demi Masa, Metode Penelitian Sosial*, dll. Kurang lebih 15 buku hasil goresantinta beliau. Selain itu, seperti buku *Administrasi Pendidikan* diterbitkan oleh CV Haji Masagung tahun 1981.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

Keahlian statistika yang beliau punya telah mendarah daging sejak kecil. Perhitungan-perhitungan secara masak telah dipraktikkan tiap hari di masa kecil itu. Salah satunya adalah beliau mendapat gelar dari teman sebayanya sebagai anak yang jitu melempar. Sebagai anak pantai yang mudah bersua dengan batu kerikil, Hadari kecil kerap bermain lempar-lemparan. Setiap kali melempar, sasarannya selalu kena. 10 kali melempar hanya satu atau dua kali yang meleset. Tak ayal lagi galah bambu penambat tali sampan nelayan di Pantai bias pecah karena lemparannya.

### **STKIP PGRI Masa Hadari Nawawi**

Langkah awal dalam gerak menuju STKIP PGRI Pontianak diliputi dengan gerak perjuangan. Diawali oleh bapak Hadari Nawawi memperjuangkan kependidikan di Kalimantan Barat. Masa ini dapat dikatakan sebagai masa perjuangan, apalagi semboyan Hadari adalah jihad, yang beliau peroleh di masa kecilnya akibat teladan ayahnya. Berbekal semangat itulah beliau ingin memajukan Kalimantan Barat melalui pendidikan.

Sebelum berdirinya STKIP PGRI Pontianak, Hadari Nawawi melihat adanya kekurangan tenaga pengajar di Kalimantan Barat. Kekurangan inilah yang dengan segera ditanggapi beliau dengan cermat dan cekatan. Oleh karena itu langkah utama dan pertama dalam masa kepemimpinannya sebagai kepala dinas PD dan K Kalimantan Barat masa itu adalah mendatangkan tenaga pengajar dari NTT dan Yogyakarta. Mendatangkan pengajar dari luar dilakukan karena minimnya tenaga pengajar yang dipunyai Kalimantan Barat.

Rahman A. Rani, mantan dosen dan sekretaris PPLP PGRI Pontianak mengatakan<sup>14</sup>:

---

<sup>14</sup>“Arsip tentang sejarah STKIP PGRI Pontianak Karya Rahman A. Rani”.

Sekitar tahun 1977/1987 Kepala Dinas PD dan K Provinsi Kalimantan Barat ialah Bapak Drs. Hadari Nawawi, mantan rektor UNTAN. Beliau atas persetujuan Gubernur Kalimantan Barat Bapak Sujima menyetujui rencana Pak Hadari tersebut. Setelah tenaga pengajar untuk SD di seluruh Kalbar tiba di Pontianak maka pak Hadari meminta bantuan kepada Drs Hanafi H Kadir Rahimahullah yang juga psikolog dan saya sendiri (Drs H A Rahman A Rani) di rumah bapak Hadari Nawawi jalan Madura Kota Baru Pontianak untuk bersama-sama mengurus penginapan dan makan tenaga pengajar dari NTT dan Yogyakarta tersebut. Tenaga pengajar tersebut diberi arahan oleh bapak Drs Hadari Nawawi tentang tugas-tugas dan persiapan serta situasi dan kondisi daerah tempat mereka bertugas (6 Kabupaten dan 1 Kotamadya). Setelah beberapa hari di Pontianak tenaga pengajar tersebut diberangkatkan ke daerah-daerah di kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. ternyata tenaga yang didatangkan dari NTT dan Yogyakarta belum memenuhi keperluan tenaga pengajar di SD-SD seluruh kabupaten di Kalimantan Barat.

Langkah selanjutnya adalah *Crass Program*. Langkah ini merekrut anak-anak tamatan SMA untuk diangkat menjadi guru SD guna memenuhi keperluan guru SD di kabupaten-kabupaten di Kalimantan Barat. Tenaga tamatan SMA tersebut kemudian akan mendapat perbekalan sekitar 3 bulan lamanya guna bertugas sebagai guru SD. Ternyata program ini belum memadai untuk mencukupi tenaga pengajar khususnya guru SD di Kalimantan Barat.

Pada masa itu terjadi pemisahan wewenang antara Dinas PD dan K dengan Kantor Wilayah Depdikbud. Kepala Dinas PD dan K pada waktu itu mempunyai wewenang dalam perekrutan guru SD disamping wewenang yang lainnya. Untuk SLTP dan SLTA adalah wewenang Kepala Kantor Wilayah Depdikbud yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini berbeda dengan kondisi sekarang, yaitu segala urusan pendidikan dikelola dan diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.

Masa kepemimpinan beliau hanya beberapa bulan setelah kampus STKIP PGRI Pontianak berdiri. Hal ini disebabkan karena beliau terpilih menjadi Rektor Universitas Tanjungpura yang sekarang dikenal UNTAN. Walaupun demikian, beliau telah merintis sebuah alat baru pendidikan, yaitu diawali dari sebuah kampus. Gerakan perubahan dimulai dari seorang guru di mana guru adalah pembaharu dan agen-agen pendidikan. Inilah yang tertanam dalam benak pemikiran beliau yang paling dalam. Kampus swasta yang berhubungan dengan organisasi PGRI adalah jiwa/roh pembangunan sumber daya manusia yang harus diwujudkan.

Hadari Nawawi selanjutnya bermusyawarah dengan teman-teman seperjuangannya seperti Ali As, Daliman, Yohanes Thomas dll untuk menentukan siapa yang akan mengendalikan kampus yang baru saja terbentuk. Musyawarah melalui rapat kampus dan disaksikan oleh beberapa pengurus dan dosen STKIP PGRI Pontianak, maka terpilihlah Drs Ali As, SH.

## **2. Masa Tunas Pembangunan (1982-1998)**

IKIP PGRI Pontianak dulu bernama STKIP PGRI Pontianak. STKIP PGRI Pontianak didirikan oleh Prof. Dr. H. Hadari Nawawi bersama-sama dengan tokoh pendidikan lainnya sebagai kawan seperjuangan beliau. Lembaga ini berdiri karena adanya tuntutan akan kebutuhan guru-guru di Kalimantan Barat, yang pada masa itu sangat dibutuhkan guru-guru SD di seluruh Kabupaten Kalimantan Barat.

Masa awal berdirinya lembaga ini, Pak Hadari memimpin STKIP PGRI Pontianak hanya sebentar, kurang lebih 1 tahun lamanya. Setelah beliau dipercaya menjabat Rektor UNTAN, semenjak itulah ketua STKIP PGRI Pontianak digantikan oleh H. M. Ali As, SH. Sehingga terbentuklah pengurus lembaga STKIP PGRI Pontianak dimulai dari Ketua pertama yaitu Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, dilanjutkan oleh H. M. Ali As, SH.

Karena belum memiliki gedung sendiri, maka perkuliahan bertempat di SPG Negeri Pontianak yang sekarang telah disatukan ke SMA Negeri 1 Pontianak jalan Kalimantan. Di lain tempat yaitu SMK PGRI yang dulu bernama SMEA PGRI yang terletak dekat dengan makam Sungai Bangkong Pontianak Jalan Aliyang. Perkuliahan dilakukan pada sore harinya disesuaikan dengan jadwal di sekolah tersebut.

Setelah kurang lebih 3 tahunan, yaitu dari 1981 sampai 1985-an berjalan perkuliahan, maka M. Ali As berinisiatif untuk membeli tanah di Kota Baru tepatnya di Gg Ilham milik Bapak Minggu sebesar 1 Ha untuk digunakan sebagai gedung/tempat STKIP PGRI Pontianak beraktivitas. Dari sini dimulailah masa pembangunan. Masa ini berjalan bertahap sesuai dengan kemampuan.

Masa kepemimpinan M. Ali As adalah masa paling lama, yaitu kurang lebih 16 tahun memimpin STKIP PGRI Pontianak. Waktu yang lama ini menandakan adanya peran dan pengaruh yang kuat dalam diri beliau. Memajukan, meningkatkan mutu, dan menyejahterakan guru adalah salah satu semboyan hidupnya. Pendidikan adalah langkah awal menuju kemajuan, guru adalah pionirnya.

Pada masa itu STKIP PGRI Pontianak baru memiliki 4 program studi, yaitu Administrasi Pendidikan (AP), Bimbingan Konseling (BK), pendidikan Matematika, dan pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). Munculnya keempat jurusan ini memang jurusan yang dibutuhkan pada masa itu, dimana diperlukan guru yang mempunyai gelar akademik yang sesuai. Sehingga tidak heran bila mahasiswa STKIP PGRI Pontianak pada awalnya adalah para guru maupun pegawai-pegawai pemerintahan yang berhubungan dengan guru.

Pada masa kepemimpinan beliau, STKIP PGRI Pontianak sudah menerapkan sistem Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang menjadi dasar pengabdian pada masyarakat. Yang menarik dalam kegiatan



KKM ini adalah kegiatan ini berbeda dengan kampus lainnya. KKM ini terbagi menjadi 2 kegiatan yaitu; KKM intern dan Ekstern. KKM intern berupa kerja mahasiswa di sekitar wilayah kampus, sedangkan KKM ekstern merupakan kegiatan mahasiswa di luar kampus.

Pada awal berdirinya, secara administratif STKIP PGRI Pontianak berada di bawah naungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) wilayah II yang berkedudukan di Palembang. Pada tahun 1990 disaat masa kepemimpinan beliau kedudukan kampus sudah tidak lagi dibawah naungan Kopertis wilayah II tetapi sudah berpindah ke Kopertis Wilayah XI yang berkedudukan di Banjarmasin. Proses perpindahan ini menandakan suatu keberhasilan dari kepemimpinan beliau.

Selama 16 tahun kepemimpinan bapak M. Ali AS, SH menunjukkan perkembangan fisik maupun nonfisik yang mencolok. Perkembangan fisik dapat disebutkan dengan berdirinya kampus I di Gg Ilham. Berdirinya bangunan perkuliahan bertingkat, masjid, auditorium dan penambahan areal tanah disekitar 2 Ha untuk pengembangan ruang administrasi maupun yang lain. Sedangkan perkembangan nonfisik yaitu meningkatnya respon masyarakat untuk menjadi guru.

### **Ali AS: Pejuang Pendidikan**

Pendidikan adalah proses perjuangan menuju hakikat memanusiakan manusia. Pendidikan yang hakiki adalah pendidikan yang mengutamakan proses daripada hasil. Proses yang disertai dengan kesungguhan dan kerja keras akan menghasilkan buah karya yang terpenting yaitu pendidikan hati nan suci. Pendidikan yang suci akan dapat diperoleh salah satunya adalah melalui perjuangan seorang pejuang pendidikan.

Bapak Drs. Ali As, SH merupakan penerus generasi muda

terdahulu yang dikenal pekerja keras. Beliau juga meneruskan perjuangan yang telah dilakukan oleh Hadari Nawawi sebagai Ketua STKIP PGRI Pontianak. Sejak masa kepemimpinan beliau kampus STKIP PGRI Pontianak sangat berkembang pesat terutama perkembangan fisik. Perkembangan fisik berupa pembangunan fasilitas-fasilitas proses pembelajaran/perkuliahannya. Gedung-gedung perkuliahan, Masjid dan gedung administrasi didirikan untuk memenuhi kebutuhan civitas akademika yang berlangsung. Tentunya hal ini dapat terlaksana berkat jerih payah dan perjuangan beliau sebagai pemimpin yang menjadi anutan dan teladan.

Perjuangan beliau sangat nampak nyata dengan memimpin kampus STKIP PGRI Pontianak dalam kurun waktu 16 tahun. Waktu yang relatif lama tersebut beliau gunakan hanya untuk kepentingan pendidikan terutama mencetak calon guru yang sangat diperlukan. Segala usaha baik ide, pemikiran, biaya, tenaga beliau curahkan untuk membangun mental sekaligus fisik dalam perkembangan pendidikan Kalimantan Barat melalui alat berupa lembaga pendidikan/kampus. Perkuliahan yang mula-mula berpindah-pindah (*nomaden*) sampai sebanyak 3 tempat<sup>15</sup>, seiring waktu dapat menjadi tetap dengan dibangunnya gedung kampus I yang sekarang di Gg Ilham.

Salah satu bentuk perjuangan beliau di masa kepemimpinan beliau mengendalikan kampus STKIP PGRI Pontianak adalah disaat berupaya membeli tanah untuk digunakan sebagai tanah pembangunan gedung kampus. Beliau menurut penuturan bapak Sudarto, rela menggunakan uang pribadi dan berusaha mencari bantuan dan kredit untuk menutupi segala kekurangan biaya pembelian tanah. Uang pribadi beliau diperoleh ketika menjabat sebagai bupati Kapuas Hulu, pernah juga beliau menjabat sebagai

---

<sup>15</sup>“Ketiga tempat tersebut yaitu di gedung SPG, gedung PGSD (JI Sulawesi), dan gedung PGRI. Lihat wawancara dengan Siswoyo dalam catatan lapangan”.

kepala Museum Kalimantan Barat. Bantuan-bantuan melalui usaha pencarian lewat pemerintahan maupun relasi teman dekat seiring waktu dapat membuahkan hasil yang nyata. Tanah dengan luas 2 Ha dan gedung-gedung seperti gedung administrasi, Masjid, lapangan, dan ruang kelas dapat tercapai kurang lebih selama 16 tahun masa kepemimpinan beliau.

Selanjutnya dalam mencari tenaga pengajar/dosen, dimulai dengan teman-teman beliau dari dinas maupun tempat tugas terdahulu mencerminkan tenaga pengajar/dosen yang berorientasi kepada pembangunan pendidikan. Banyak dosen yang rela berkorban dan berjuang mengajar di kampus STKIP PGRI Pontianak tanpa mendapat honor/gaji dalam melakukan tugas sebagai pengajar/dosen. Hal inilah yang menjadi pertumbuhan, perkembangan dan perubahan secara cepat kampus STKIP PGRI Pontianak menjadi kampus yang mendapat tempat di hati masyarakat Kalimantan Barat.

Pembangunan yang dilakukan pada masa kepemimpinan bapak Ali As dapat disusun sebagai berikut<sup>16</sup>.

1. Pembelian tanah seluas 1 Ha di Gg Ilham.
2. Pembangunan gedung administrasi.
3. Pembangunan ruang kelas sebanyak 4 kelas.
4. Perlengkapan kelas seperti meja dan kursi.
5. Pembuatan auditorium.
6. Pembangunan Masjid Ilham.

Pembangunan gedung, ruang kelas, dan seterusnya dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dari tahun 1987 dan berakhir pada 1995. Pembangunan ini sebagian besar adalah swadaya yang diperjuangkan oleh Ali As, selebihnya adalah bantuan dari luar,

---

<sup>16</sup>“Lihat wawancara dengan Drs. Sudarto”.

baik dari donator maupun dari pemerintah daerah.

Perjuangan yang dilakukan pejuang tidak akan hilang dan lapuk. Malah justru selalu dikenang dan mendapat kehormatan dan penganugerahan. Kita sebagai generasi penerus alangkah beruntungnya kita menjadi generasi penerus pejuang selayaknya anak yang mendapat kehormatan daripada perjuangan yang dilakukan oleh orang tua demi kemajuan pendidikan.

Setelah masa Ali As, SH dilanjutkan oleh Prof. Dr. Uray Husna Asmara, M. Pd. Kelanjutan tampuk kepemimpinan memberi arti yang mendalam bagi beliau, yaitu melanjutkan tongkat estafet perjuangan membangun dan meningkatkan STKIP PGRI Pontianak dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendati di masa beliau banyak masalah yang menghadang terlebih dengan semaraknya revolusi di Indonesia berupa reformasi. Hal ini juga melanda di Kalimantan Barat dengan berbagai kasus kekerasan dan konflik etnis.

### **Uray Husna Asmara: Bapak Penerus Pembangunan**

Pembangunan secara mental dan fisik terus berlanjut. Pertumbuhan kampus menjadi kampus yang lebih besar dan mendapat tempat di hati masyarakat semakin terlihat. Para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi mulai meningkat seiring berjalannya waktu. Para mahasiswa yang berlatar belakang berbeda mulai mempunyai kesadaran tinggi untuk melanjutkan studi.

Calon mahasiswa yang sebelum era Ali As adalah para mahasiswa yang sudah bekerja (guru, pegawai swasta, pegawai pemerintahan, dan PNS dll) mulai merambah ke masyarakat yang belum bekerja. Tercatat dalam arsip<sup>17</sup> mahasiswa setelah tahun

---

<sup>17</sup>Pencatatan jumlah mahasiswa dan dosen tiap periode kepemimpinan dapat dilihat dalam arsip penelitian “Meretas Sejarah STKIP menuju IKIP PGRI Pntianak” Lembaga Penelitian tahun 2014.

1998 adalah sebanyak 400-an mahasiswa yang sebagian besar para mahasiswa yang belum bekerja serta tamatan dari SLTA.

Peningkatan mutu mulai mendapat prioritas utama ketika masa kepemimpinan Uray Husna Asmara. Pemikiran ini terbukti dengan pencetusan pengelolaan perpustakaan dengan berbagai usaha penambahan kuantitas koleksi. Buku-buku yang disimpan tidak hanya buku daripada hasil tulisan para dosen pengampu mata kuliah, tetapi juga mendapat bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan bantuan asing. Hal ini dapat terlihat dari koleksi berbahasa asing yang tersebar kurang lebih 200 buah.<sup>18</sup>

Pada tahun 1998-2000 adalah masa yang tersulit bagi kepemimpinan Uray Husna Asmara. Hal ini dapat dikatakan hal yang wajar yaitu ketika pengaruh pendidikan nasional Indonesia mengalami berbagai masalah. Permasalahan politik dan ekonomi bangsa Indonesia ternyata membawa pengaruh yang besar terhadap kondisi masyarakat di Kalimantan Barat tak terkecuali kamps STKIP PGRI Pontianak.

Pengaruh kehidupan politik dan ekonomi yang runyam bahkan krisis membawa detik-detik arah pendidikan yang tidak tahu arahnya. Pergantian pemerintahan Orde Baru menuju Orde Reformasi memberi pekerjaan rumah yang berat yaitu merubah arah pendidikan kepada reformasi pendidikan yang sejati. Pergantian kurikulum mulai direncanakan akibat gagalnya membangun bangsa yang bermartabat. Krisis politik dan ekonomi mulai merambah kepada krisis pendidikan.

Menanggapi situasi yang kurang kondusif tersebut, Uray Husna Asmara tetap berpegang teguh untuk membangun bangsa ini hanyalah mealui pendidikan. Alat yang ampuh adalah memakai jalur lembaga kependidikan yaitu lembaga pendidikan tinggi/

---

<sup>18</sup> Lihat arsip catatan lapangan bersama pengelola perpustakaan, Hj. Utin Titiek Puspa, S. Sos.

kampus. Reformasi pendidikan dimulai dari kampus, itulah yang selalu tertanam dalam pemikiran dan jiwa beliau. Oleh karena itu tidaklah salah dan sepantasnya atau sepatutnya beliau mendapat sebutan bapak reformasi pendidikan kampus.

### 3. Lorong Zaman Pembinaan (1998-2006)

Lorong zaman pembinaan mungkin ungkapannya agak berlebihan, tetapi babakan sejarah selalu meninggalkan kisah dan peristiwa yang menarik untuk dituliskan dan ditafsirkan dalam lembaran-lembaran sejarah. Kalaupun ungkapan ini jauh dari apa yang diharapkan sebagaimana saran yang diungkapkan Leopold Von Ranke bahwa sejarah harus ditulis apa adanya atau apa yang sesungguhnya (*wei es eigentlich gewesen*)<sup>19</sup>, tetapi paling tidak di periode ini akan ada banyak peristiwa dalam sejarah kelembagaan pada masa pembinaan.

Periode selanjutnya dalam menjalankan roda organisasi kelembagaan STKIP-PGRI Pontianak dibawah kepemimpinan Uray Titin Hiswari. Dengan masa periode 2002-2006. Sebelum menjabat sebagai ketua STKIP-PGRI Pontianak Uray Titin Hiswari sudah diberi amanah sebagai pembantu ketua tiga dengan lama menjabat selama enam tahun dari tahun 1997-2002. Masa ini adalah masa yang sangat melelahkan bagi pejabat kampus yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, gelombang pergerakan mahasiswa menuntut reformasi terjadi di mana-mana tidak terkecuali di STKIP-PGRI Pontianak Kaimantan Barat.

Krisis masyarakat Indonesia yang dimulai dengan krisis finansial dan ekonomi pada 1997, telah melahirkan suatu krisis

---

<sup>19</sup>Lihat burners , 1962. *A History of historical Writng*, new York:doer publication inc. hlm. 245-246. Ranke mengasumsikan bahwa fakta itu sudah objektif yang dapat diterima secara umum dan fakta itu tidak perlu dihias, diwarnai sesuai dengan keinginan atau selera sejarawan jadi harus apa adanya terlepas dari kepentingan pribadi, golongan, ras, agama, dan partai.

total dari sebuah kehidupan masyarakat. Krisis ini merupakan suatu krisis kemanusiaan yang juga termasuk di dalamnya sebagai krisis pendidikan. Krisis ini menunjukkan betapa tidak berdayanya pendidikan, upaya pendidikan seolah olah tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan para *founding fathers* kita ketika menyusun UUD 1945, yaitu manusia susila yang cakap di dalam masyarakat Indonesia yang demokratis, adil, dan makmur. Masyarakat Indonesia dilanda “budaya” kekerasan, seakan-akan kekerasan menjadi milik masyarakat Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah (*de zachtste volk der aarde*) sebagai manusia yang paling lembut). Pengalaman pahit semasa krisis ini meminta kepada kita untuk mencari dan mengembangkan sendi-sendi baru pendidikan nasional. Sendi-sendi perkembangan anak perlu dikaji ulang tak terkecuali mahasiswa.

Menghadapi situasi seperti ini pada waktu itu perlu kesiapan untuk memberikansikap *responsibility* terhadap sikap dan keinginan mahasiswa semasa menjabat sebagai pembantu ketua tiga adalah sebagai modal utama dalam menjalankan amanah pada masa itu. Salah satu kebijakan yang diambil sebagai pembantu ketua tiga pada masa itu yaitu semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa harus berkoordinasi dengan pihak lembaga, sehingga arah dan gerakan mahasiswa menjadi lebih terkontrol, apabila terjadi sesuatu diluar koordinasi maka pihak lembaga tidak bertanggung jawab. Hal lain yang dilakukan adalah pengembangan kreativitas mahasiswa terutama dalam bidang keilmiahan mahasiswa tetap menjadi skala prioritas. Selasai menjalankan amanah sebagai pembantu ketua tiga Uray Titin Hiswari terpilih menjadi ketua STKIP-PGRI Pontianak.<sup>20</sup>

Untuk membantu kinerja sebagai ketua sesuai dengan

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Urai Titin Hiswari, Mei 2014.

peraturan pemerintah no 60 tahun 1999 dan statute STKIP-PGRI Pontianak tanggal 25 Juli 2000, masa kepemimpinan Urai Titin mendesain organisasi kelembagaan yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur Pembina yaitu perkumpulan Pembina lembaga pendidikan (PPLP) PGRI pusat yang berkedudukan di Jakarta serta perkumpulan pembina lembaga pendidikan perguruan tinggi (PPLP-PT) PGRI Pontianak yang berkedudukan di Pontianak. Kedua, unsur dewan penyantun yang diketuai oleh gubernur Kalimantan Barat dengan para anggotanya yang terdiri dari unsur muspida provinsi Kalimantan Barat, kepala kantor dinas pendidikan Kalimantan Barat, wali kota Pontianak, dan kepala dinas pendidikan Kota Pontianak.

Pada unsur internal kelembagaan dibantu oleh tiga orang pembantu ketua yaitu sebagai pembantu ketua satu yaitu Dr Saimon H AR, M.Pd yang saat itu belum menjadi guru Besar yang membidangi masalah akademik, pembantu ketua dua yaitu Drs. Nasrun, M.Pd yang membidangi masalah umum keuangan dan kepegaiwaan, dan sebagai pembantu ketua tiga yaitu Drs Siswoyo, M.Pd yang membidangi administrtasi kemahasiswaan. Keempat unsure pimpinan mulai dari ketua sampai ke pembantu-pembantu ketua serta unsur-unsur yang berada di bawahnya saling bersinergi membangun STKIP menuju sebuah lembaga pendidikan dan tndidikan tinggi yang berkualitas<sup>21</sup>.

Pembacaan tentang era globalisasi pada masa itu memang mungkin dirasa baru dimulai namun spertinya lembaga ini tidak berpangku tangan sebagai penonton, tetapi sudah berusaha memulai untuk menjadi pemain. Peran pemain yang menuntut kemampuan untuk menghadapi tantangan dalam perkembangan

---

<sup>21</sup> Lebih terperinci mengenai organisasi dan tatakerja lembaga di bawah kepemimpinan urai titin Hiswari dapat dilihat pada Pedoman oprasional pada setiap tahun akademik terutama pada periode 2002-2006



global. Hal ini disadari karena dalam era seperti ini tantangan untuk bersaing akan semakin kuat. Persaingan pada tingkat global berkembang seiring dengan pengaruh kuat seluruh inovasi teknologi dan komunikasi yang dapat menembus dan mengubah sifat hidup dan pekerjaan. Faktor tunggal yang sangat penting dalam penentuan seberapa baiknya dunia ini maju dengan pesat dan berkembang adalah orang-orangnya dan kemampuan mereka untuk belajar dengan cepat. Apabila perubahan yang tetap ini menjadi ancaman atau peluang yang terselubung semuanya bergantung pada orang-orang.

Kemajuan peradaban akan bergantung pada kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri mereka, terutama dalam menghadapi penciptaan organisasi, restrukturisasi dan reorganisasi yang tidak pernah putus. Yang jelas, kemajuan peradaban dan modernisasi dalam era global tidak bisa dibendung lagi.

Modernisasi sebagai suatu bentuk perubahan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan struktur baru. Manusia dituntut untuk mempelajari struktur-struktur baru. Mereka juga memperhatikan diferensiasi-deferensiasi yang terjadi di dalam struktur-struktur sosial apabila muncul lapangan-lapangan pekerjaan baru, apabila berkembang lembaga-lembaga pendidikan baru, dan apabila timbul jenis-jenis komunitas yang baru.

Globalisasi memang meniadakan sekat-sekat wilayah (*borderless*), semua menyatu sehingga kejadian disatu tempat akan mudah mengalir ke tempat yang lain dalam waktu yang relatif cepat. Inilah yang juga dirasakan oleh negara kita sehingga sejak reformasi tahun 1998 diikuti dengan penguatan demokrasi.

Perkembangan secara global menunjukkan trend semakin dibutuhkannya keahlian profesional dan sikap profesional. Meningkatnya tuntutan masyarakat atas kebutuhan keahlian profesional dan sikap profesional menimbulkan satu reaksi yang

berkembang cepat di masyarakat yang bertujuan dapat mengisi kebutuhan sesuai dengan perkembangan diberbagai bidang yang semakin kompleks dan membutuhkan penagangan dan pengamanan yang semakin sempurna. Dengan demikian maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki ketangguhan daya saing dan kualitas yang tinggi<sup>22</sup>. Inilah yang kemudian menjadi penggerak awal pembangunan lembaga STKIP PGRI Pontianak di bawa kepemimpinan urai titin Hiswari pada masa itu

Uray Titin Hiswari selama menjadi ketua STKIP PGRI Pontianak. Perkembangan tingkat kualitas dapat lebih nyata pada masa ini. Pada masa ini diarahkan kepada sisi kualitas. Anggapan ini dipahami sebagai pemikiran bahwa pada sisi kuantitas sudah cukup sehingga perlu dibenahi dari sisi kualitas baik sisi manajemen pengajaran, penataan keuangan, penataan administrasi dan lain-lain. Hal ini menjembatani akan dimulainya pertumbuhan, perkembangan dan peningkatan akan kualitas mutu seorang dosen yang dianggap sangat penting dan wajib ditingkatkan.

Pada masa Uray Titin Hiswari dapat dikatakan sebagai masa pembenahan bagi STKIP-PGRI pontianak. Pembenahan diartikan sebagai tindak lanjut akan perubahan. Perubahan zaman berdampak kepada perubahan kampus baik dari sisi intern maupun ekstern. Segala hal yang perlu diperbaiki ditemukan sangat banyak pembenahan yang dilakukan. Pembenahan yang Nampak jelas adalah dalam bidang administrasi, keuangan, dan tata kelola staf dan dosen.

Peningkatan mutu untuk menerapkan tridarma perguruan tinggi sangat ditonjolkan terutama bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Perekrutan dosen maupun staf dilakukan secara proporsional dan professional artinya dosen dan staf bukan

---

<sup>22</sup> lihat Asep Yudi Permana dkk, dalam sebuah artikel "*membangun profesionalisme tenaga kependidikan melalui sertifikasi: antara harapan dan realita*

hanya terkait dengan penguasaannya terhadap suatu disiplin ilmu dan keahlian tertentu, tetapi juga dituntut amalan terbaiknya dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan pada mahasiswa dan masyarakat secara umum. Dengan demikian seorang dosen dan staf yang profesional mempunyai peran ganda, yaitu senantiasa memelihara dan mengembangkan profesionalisme dalam bidang keilmuan dan keahliannya, sekaligus berusaha memahami dan meningkatkan kepuasan pelanggannya. Pelanggan utama dosen dan staf adalah mahasiswa.

Kesuksesan menghasilkan warga negara sebagai sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas seperti dimaksud di atas, sangat tergantung pada kualitas penyelenggaraan kegiatan atau proses belajar-mengajar di sekolah dan lembaga pendidikan sejenis yang diselenggarakan untuk seluruh lapisan rakyat Indonesia. Sedang dalam kenyataannya sulit untuk dibantah bahwa kualitas kegiatan atau proses belajar mengajar tersebut, sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor guru dalam mengimplementasikan jabatan/pekerjaan sebagai sebuah profesi. Guru dan/atau tenaga kependidikan yang terdiri dari guru kelas, guru bidang studi, guru bimbingan dan konseling, mengemban peran profesional yang sangat penting dalam mempersiapkan calon pemimpin bangsa di bidang pemerintahan, sosial kemasyarakatan atau di lingkungan swasta. Dari tangan para guru tersebut sepanjang masa diharapkan selalu siap para lulusan sebagai calon pengganti pimpinan dalam rangka pergantian generasi yang tidak saja memiliki keterampilan dan keahlian di bidangnya masing-masing, tetapi juga bermoral dan berakhlak mulia, serta berkepribadian sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Profesionalisme dosen dan staf merupakan salah satu tolok ukur dalam sistem penjaminan mutu akademik. Profesionalisme harus menjadi nilai kultural yang dimiliki dosen dan staf

untuk selalu menampilkan karya terbaik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Namun demikian pencapaian profesionalisme dosen bukan hanya menjadi tanggung jawab dosen, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara dosen dan lembaga. Lembaga berkewajiban untuk menciptakan sistem yang mengupayakan pengembangan kemampuan profesionalisme dosen. Lembaga juga harus menetapkan kriteria dosen dan manajemen mutu dan kompetensi dosen demi tercapainya profesionalisme dosen dan staf.

Secara umum kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Tetapi pemahaman kompetensi ini janganlah diartikan sebagai suatu pengetahuan, sikap, kemampuan, dan keterampilan semata, tetapi kompetensi harus dikonsepsikan sebagai bentuk perilaku/kinerja seseorang setelah mengalami proses pembelajaran. Karena menurut kerangka berpikir behaviorism, kompetensi lebih mudah diurai menjadi perilaku/tindakan/kinerja dalam bidang tugas yang sangat terpisah dan dianalisis secara fungsional menurut (kognitif, afektif, psikomotor), tetapi lebih dikembangkan lagi pada empat pilar utama kompetensi (revisi taxonomi Blomm's), yaitu (1) *factual knowledge*; (2) *conceptual knowledge*, (3) *procedural knowledge*; dan (4) *metacognitive knowledge*<sup>23</sup>.

Lebih lanjut Anderson, menguraikan empat pilar utama kompetensi revisi taxonomi Blomm's ini, antara lain (1) *factual knowledge*; menyangkut pengetahuan tentang fitur-fitur dasar yang harus diketahui oleh pembelajar dalam sebuah disiplin keilmuan dan juga bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Jenis kompetensi ini antara lain pengetahuan tentang terminologi

---

<sup>23</sup>Lihat Anderson, dkk (2001) *A Taxonomy for learning, teaching, and assessing.*, Addison Wasley Longman Inc. : New York.

dan pengetahuan tentang rincian spesifik (*specific details*) serta fitur-fitur dasar (*basic elements*) (2) *conceptual knowledge*, meliputi kompetensi yang menunjukkan pemahaman tata hubungan antar fitur-fitur dasar dalam suatu struktur yang lebih luas dan yang memungkinkan berfungsinya fitur-fitur tersebut. Yang termasuk ke dalam kompetensi ini adalah pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori; pengetahuan tentang prinsip kerja dan generalisasinya; pengetahuan tentang teori, model, paradigma, dan struktur dasar. (3) *Procedural knowledge*; meliputi pengetahuan dan pemahaman bagaimana melakukan sesuatu (*technical know now*), metode inkuiri, dan kriteria dalam menggunakan keterampilan, algoritma, teknik, dan metode. Yang termasuk ke dalam kompetensi ini adalah pengetahuan tentang keterampilan khusus (*subject-specific skills*) dan perhitungan-perhitungan (*algorithm*); pengetahuan tentang teknik dan metode khusus (*subject-specific techniques and methods*); pengetahuan tentang kriteria penggunaan sebuah prosedur yang tepat. (4) *metacognitive knowledge*<sup>24</sup>.

Peminat STKIP PGRI Pontianak pada masa itu tergolong masih rendah oleh lulusan sekolah menengah, hal ini terlihat dari STKIP merupakan pilihan akhir setelah tidak diterima di program studi non kependidikan. Pekerjaan yang belum menjanjikan karena gaji guru rendah, generasi yang tertarik menjadi calon guru umumnya bukan calon-calon terbaik. Calon-calon terbaik akan bersekolah disekolah lanjutan tingkat atas favorit atau kuliah di jurusan favorit, misalnya kedokteran, teknik, hubungan internasional atau lainnya.

Beberapa langkah konkrit yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pondasi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru cukup ketat hal ini dikarenakan peminat calon mahasiswa yang

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

ingin masuk ke STKIP-PGRI Pontianak semakin meningkat. Diakui memang sejak awal pendirian STKIP-PGRI Pontianak sampai pada masa kepemimpinan urai titin Hiswari peminat mahasiswa yang masuk kuliah rata-rata adalah guru dan kepala sekolah atau minimal sudah bekerja, sehingga jadwal perkuliahan dilakukan pada sore hari<sup>25</sup>.

Untuk beberapa program studi tertentu peminatnya memang mengalami kemerosotan. Sejak 2003-2007 peminat salah satu program studi yang ada di STKIP PGRI Pontianak yaitu Program Studi administrasi Pendidikan sangat drastis mengalami penurunan. Sehingga pada 25 Juni 2007 melalui keputusan Senat STKIP-PGRI Pontianak program studi ini dinyatakan di tutup dengan pertimbangan bahwa sejak lima tahun terakhir yaitu mulai tahun akademik 2002/2003 sampai dengan tahun akademik 2007/2008 yang mendaftar sudah tidak ada calon mahasiswanya lagi.

Pertimbangan yang lain adalah aktivitas mahasiswa administrasi pendidikan sejak tahun akademik 2002/2003 seperti aktivitas perkuliahan, seminar dan skripsi sudah tidak ada lagi. Berita acara penutupan program studi Administrasi pendidikan ini kemudian di kirimkan kepada koordinator kopertis wilayah XI Kalimantan di Banjarmasin dengan surat pengantar bernomor no 2807/L.308/PP/2007 dengan uraian penyampaian berita acara penutupan operasional program studi Administrasi pendidikan.

Secara umum proses operasional akademik di lembaga STKIP PGRI Pontianak pada masa itu sudah berjalan dengan baik. Pedoman operasional akademik mulai dari perumusan visi misi organisasi, penyelenggaraan pendidikan pembinaan kemahasiswaan, alumni sampai pada penataan penyusunan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi sudah tersitematis dan menjadi pedoman bagi

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Urai Titin Hiswari bulan Mei 2014

penyelenggara lembaga maupun mahasiswa dan alumni<sup>26</sup>.

STKIP-PGRI Kalimantan Barat pada masa Uray Titin Hiswari terus menata dan membangun sistem dan ruang dinamika fungsinya yang tidak hanya menjamin keberlangsungannya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Lebih daripada itu, peningkatan fungsi kelembagaan bagi masyarakat, lingkungan, dan bangsa yang sedang membangun sumber daya manusia akademisi dan profesi yang lebih bermutu, unggul, mandiri, dan berdaya saing, menjadi tugas yang sangat penting di tengah kebutuhan akan sumberdaya manusia terutama guru di Kalimantan barat semakin meningkat.

Periode 2002-2006 adalah periode perjuangan untuk meneruskan dan mempertahankan tujuan pendidikan di STKIP-PGRI Pontianak yang sesuai dengan statute yang di tetapkan tanggal 25 Juli tahun 2000, menggunakan kurikulum berdasarkan SK mendiknas Noomor 232/U/2000 tentang penyusunan kurikulum pendidikan dan penilaian hasil studi mahasiswa dan SK mendiknas nomor 045/U/200 tentang kurikulum inti perguruan tinggi bahwa tujuan pendidikan yang ingin di capai oleh satuan pendidikan ini adalah secara umum membentuk mahasiswa yang berkepribadian utuh, yang merupakan paduan antara kemampuan professional dan kemampuan penalaran tinggi, beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, serta memiliki sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Secara khusus tujuan yang ingin di capai ialah menghasilkan lulusan sebagai ilmuan di bidang kependidikannya masing masing dengan ciri-ciri:

1. Beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa
2. Berperan dalam masyarakat sebagai warga Negara yang

---

<sup>26</sup> Lebih detail mengenai standar oprasional prosedur pelaksanaan oprsional akademik dapat dilihat pada buku-buku pedoman oprasional yang diterbitkan setiap tahun akademik pada periode 2002-2006

pancasilais

3. Berprilaku sesuai norma dan nilai yang berlaku bagi profesi guru dan tenaga kependidikan umumnya
4. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mendukung tugas-tugas professional seorang guru dan tenaga kependidikan lainnya
5. Memiliki kemampuan memanfaatkan kemajuan serat melakukan pembaharuan dibidang ilmu dan tehnologi yang menunjang tugas-tugas profesionalnya sebagai guru dan tenaga kependidikan umumnya<sup>27</sup>

Sebagai suatu sistem yang menuntungerak dan dinamika sivitas akademika, penataan sejumlah subsistem inti (kepemimpinan dan pengelolaan, pendidikan akademis dan profesi, penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi, penerapan dan pengabdian lpteks, dan birokrasi pendidikan), merupakan keniscayaan. Penataan kembali arah pengembangan IKIP-PGRI Kalimantan Barat yang berlandaskan sistem pendidikan nasional menjadi keniscayaan karena IKIP-PGRI Kalimantan Barat adalah asset bangsa dan milik nasional untuk selanjutnya berkiprah di tingkat yang lebih luas.

Kondisi geografis Kalimantan barat yang luas dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit lagi dan diiringi oleh kebutuhan masyarakatan pendidikan adalah tantangan tersendiri bagi STKIP-PGRI Kalimantan Barat untuk sesegera mungkin mempersiapkan dan mencetak sumberdaya manusia yang siap dipergunakan terutama di dunia pendidikan.

Seiring dengan itu maka STKIP-PGRI Pontianak senantiasa berbenah baik secara internal maupun eksternal dan berbagai dimensi yang lain guna menjawab kebetuhan masyarakat, terutama

---

<sup>27</sup> Dikutip dan salinan borang akreditasi Program Studi D2 penjaskes hal: 2



Kalimantan Barat. Pembinaan STKIP PGRI Pontianak terus berjalan dan senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan walaupun di tahun 2006 periode kepemimpinan Urai Titin Hiswari berakhir dan digantikan oleh Prof. Dr. H. Samion H. AR., M.Pd sebagai ketua STKIP-PGRI Pontianak. Pergantian kepemimpinan ini berjalan dengan lancar dan demokratis, tanpa ada kendala yang berarti, hingga periode selanjutnya pun dimulai<sup>28</sup>.

#### **4. Membangun Kecharuman (2007-2014)**

Perubahan waktu memberikan pelajaran yang berharga. Pelajaran itu dimaksudkan untuk mengembangkan lembaga STKIP PGRI Pontianak menuju sebuah cita-cita. Harmonis, amanah, ramah, unggul, mandiri merupakan cita-cita mutlak yang harus diperjuangkan. HARUM adalah benang yang akan mengikat semua warga, IKIP PGRI Pontianak. Untuk mewujudkan itulah maka diperlukan komitmen bersama. Buku yang berjudul "KAMPUS HARUM pergulatan pemikiran bapak Prof. Dr. H. Samion H. AR, M. Pd dalam membangun pendidikan di bumi Khatulistiwa" merupakan salah satu komitmen dalam membangun pendidikan di Kalimantan Barat.

Masa ini penuh dengan perkembangan kemajuan yang berharga antara lain<sup>29</sup>:

1. Membangun gedung perpustakaan pada lokasi Kampus I STKIP PGRI Pontianak Jalan Ilham.
2. Membangun Kampus II STKIP PGRI Pontianak Jalan Ampera lengkap dengan Masjidnya.
3. Menambah atau membuka Program Studi baru menjadi 10 Program Studi yaitu Pendidikan Olah raga, Pend. Sejarah, Pend. Bahasa Inggris, Pend. Fisika, Pend. Bahasa Indonesia,

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Urai Titin Hiswari bulan Mei 2014

<sup>29</sup>"Lihat Arsip tentang sejarah STKIP PGRI Pontianak Karya Rahman A. Rani".

Pend. Teknik Informatika dan Komunikasi (TIK).

4. Melakukan lobi-lobi tentang kegiatan STKIP PGRI Pontianak
5. Dan lain-lain termasuk memperjuangkan status perubahan ke IKIP PGRI Pontianak.

Organisasi merupakan sekumpulan orang untuk mencapai sebuah tujuan. Agar tujuan dapat tercapai dan berjalan secara maksimal, maka setiap orang harus mampu memahami dan menjalankan roda organisasi berdasarkan pada visi dan misi organisasi. STKIP PGRI Pontianak sebagai sebuah organisasi juga memiliki visi dan misi. "HARUM" merupakan suatu slogan yang mengantarkan STKIP PGRI Pontianak pada visi dan misi organisasi. Harmonis, amanah, ramah, Unggul, dan Mandiri bukan sekedar slogan saja tetapi merupakan suatu mata rantai yang akan mengantar pada cita-cita STKIP PGRI Pontianak. Sebagai mata rantai dari sebuah cita-cita, "HARUM" merupakan anak tangga menuju keberhasilan lembaga ini.

Harmonis, Amanah, ramah, Unggul, dan Mandiri merupakan satu kesatuan.

### **1. Harmonis**

Eksistensi perguruan tinggi tidak bisa dilepas dari pengamalan tridarma perguruan tinggi. Tri darma merupakan fungsi utama dari perguruan tinggi yang terdiri dari; (1) Pendidikan dan pengajaran, (2) Penelitian dan pengembangan, dan (3) Pengabdian kepada masyarakat. Ketiga fungsi ini bersifat universal dan harus dilakukan secara simultan. Universal artinya fungsi ini tidak hanya menjadi kewajiban perguruan tinggi di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Simultan artinya pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dilakukan secara bersama-sama dan tidak terpisahkan satu dari lainnya.

Suatu perguruan tinggi dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila tercipta lingkungan kerja yang harmonis. Tanpa dalam kondisi harmonis, organisasi perguruan tinggi tidak mampu

mengembangkan fungsinya secara optimal dan meraih cita-cita secara efektif.

## **2. Amanah**

Amanah merupakan faktor utama terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa, sebab dengan sikap amanah semua komponen bangsa akan berlaku jujur, tanggung jawab dan disiplin dalam setiap aktifitas kehidupan. Amanah merupakan sikap yang harus di amalkan oleh semua elemen yang ada di STKIP PGRI Pontianak. Adanya sikap amanah terhadap pekerjaan, terciptanya sikap yang harmonis antar karyawan dan dosen berdampak pada perkembangan yang pesat bagi kemajuan akademik maupun pada pelayanan terhadap mahasiswa. Dosen yang amanah akan menciptakan suasana pengajaran yang kondusif, karyawan yang amanah berdampak pada bagusnya system pelayanan yang ada.

## **3. Ramah**

Dalam pelayanan, baik kepada mahasiswa maupun kepada masyarakat sikap ramah merupakan salah satu kunci pelayanan yang diterapkan oleh STKIP PGRI Pontianak. Sikap adalah suatu kecenderungan mental atau perasaan yang relatif tetap terhadap suatukategoriobyek,orang,atausituasitertentu.Rechtmenyatakan bahwa sikap menggambarkan kumpulan kepercayaanyang selalu memasukan aspek penilaian, artinya sikap selalu dapat ditafsirkan sebagai baik dan buruk atau positif dan negatif. Sikap ramah inilah yang merupakan salah satu pondasi dalam melakukan pelayanan di lembaga ini.

Sikap harmonis dan selalu menjaga amanah yang diterapkan oleh seluruh elemen yang ada dikampus ini akan menjadi satu kesatuan dengan sikap ramah. Dalam Birokrasi sikap ramah diterjemahkan dalam bentuk tidak membeda-bedakan dalam melakukan penanganan. Dalam hal penanganan administrasi

terutama pelayanan mahasiswa maka sudah tentu merupakan keharusan bagi tenaga administratif.

#### **4. Unggul**

Kampus yang unggul bias dicapai manakala sudah tercipta suasana yang harmonis, penuh amanah, dan semua masyarakat kampusnya ramah. Unggul sejatinya merupakan justifikasi terhadap kondisi yang memiliki kelebihan baik generic maupun spesifik dibandingkan dengan kondisi lainnya yang sama maupun setara berdasarkan acuan tertentu.

Perguruan tinggi sebagai komunitas intelektual pada dasarnya memiliki parameter yang spesifik yang berkaitan dengan misi utama perguruan tinggi, yakni menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dengan demikian, pengertian unggul dalam perguruan tinggi sejatinya memiliki makna substantive yang bernilai *competitiveness* tinggi.

Keunggulan perguruan tinggi dibangun dari karya –karya akademik yang bersifat substansial dan dapat dikompetisikan baik pada ranah nasional maupun internasional. Dimensi keunggulan perguruan tinggi secara substansif perlu dirujuk pada tiga hal. Pertama, seberapa besar hasil pendidikan dan pembelajaran yang diterapkan memberikan makna bagi masyarakat. Kedua, seberapa besar hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan berdampak kepada pengembangan keilmuan baik teoritis maupun empiris. Ketiga, seberapa besar keberadaan perguruan tinggi memberikan makna social bagi masyarakat. Untuk mencapai keunggulan substantif, sebuah perguruan tinggi perlu mengelola sumber daya yang ada secara sinergis sehingga keunggulan substantif dapat dicapai.

#### **Keunggulan akademik**

Keunggulan akademik pada dasarnya berangkat dari SDM yang unggul dan sehat sarana dan prasarananya. Peran dosen dosen

sebagai unsure SDM memberikan sumbangan terbesar terhadap proses akademik yang berlangsung di STKIP PGRI Pontianak, disamping dukungan kelembagaan. Indikator keunggulan dosen adalah kualifikasi pendidikannya sesuai dengan kepakarannya dan integritas dalam layanan akademik.

Atas dasar itulah maka sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan calon guru di Kalimantan Barat maka STKIP PGRI Pontianak melakukan upaya-upaya pencapaian keunggulan akademik. Upaya untuk meningkatkan keunggulan akademik dilakukan melalui: (1) Peningkatan kualifikasi pendidikan dosen pada jenjang pendidikan S2 dan S3 sesuai dengan kepakarannya dan, (2) peningkatan kompetensi akademik guna memberikan layanan pendidikan secara maksimal. Melalui upaya ini diharapkan dosen dapat mengembangkan budaya akademik yang sehat dengan ditandai meningkatnya kompetensi dosen dalam (1) Pengembangan pembelajaran berbasis riset, (2) Pengembangan materi pembelajaran, dan (3) Pengembangan teknik-teknik evaluasi pembelajaran publikasi ilmiah.

STKIP PGRI Pontianak secara institusional mendorong pencapaian keunggulan akademik melalui (1) Peningkatan akses layanan akademik secara online, (2) Pengembangan perpustakaan, dan (3) Pemberian fasilitas pengembangan akademik dosen. Keunggulan akademik akan memiliki nilai dalam konstelasi perguruan tinggi, baik pada level nasional maupun internasional. Hal ini sesuai dengan cita-cita pendirian kampus STKIP PGRI Pontianak, yakni kemajuan dalam lingkup pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Barat.

### **Keunggulan Penelitian**

Keunggulan dalam bidang penelitian merupakan suatu keharusan. Hal ini sesuai dengan tridarma perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan peran perguruan tinggi sebagai p[engembangan

keilmuan. Keunggulan bidang penelitian didorong untuk meningkatkan penelitian dari berbagai bidang, baik bidang penelitian pendidikan, IPA, social-humaniora, dan rekayasa/teknologi.

Kegiatan penelitian di STKIP PGRI Pontianak didorong untuk mencapai keunggulan dengan (1) menghasilkan temuan empiris (IPTEKS) dalam rangka pengembangan ilmu, (2) menghasilkan bahan ajar, (3) menghasilkan temuan yang dapat dipatenkan, (4) menghasilkan publikasi ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional dan atau Internasional, dan (5) menjadi landasan untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat.

### **Keunggulan Kelembagaan**

Secara kelembagaan, STKIP PGRI Pontianak memiliki 10 program studi yaitu PKn, Pendidikan Matematika, Bimbingan Konseling, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, pendidikan Sejarah, Pendidikan Geografi, Pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia dan sastra, Pendidikan Fisika, dan Pendidikan TIK. Keunggulan kelembagaan dibangun atas dasar dasar penyelenggaraan tridarma. Keunggulan tersebut dijabarkan dalam bentuk, pertama dalam bidang pendidikan dan pengajaran tercipta budaya akademik yang sehat, berbasis hasil penelitian, melalui peningkatan kinerja dosen dan partisipasi kelembagaan. Kedua, dalam bidang penelitian dapat dihasilkan karya-karya yang memiliki competitiveness tinggi baik pada level lokal, nasional maupun internasional. Ketiga, pada bidang pengabdian pada masyarakat, dapat diimplementasikan program hasil dari penelitian. Keempat, dalam bidang kemahasiswaan, tercapai daya saing akademik yang tinggi dalam kompetisi baik tingkat local, nasional maupun internasional.

## **5. Mandiri**

kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Pengertian mandiri berarti mampu bertindak sesuai keadaan tanpa meminta atau tergantung pada orang lain. Mandiri adalah dimana seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak/keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan/perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya. Kemandirian secara psikologis dan mentalis yaitu keadaan seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi manfaat atau keuntungannya, maupun segi-segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya.

kemandirian merupakan sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan kemampuan mengatur diri sendiri, sesuai dengan hak dan kewajibannya sehingga dapat menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapi tanpa meminta bantuan atau tergantung dari orang lain dan dapat bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambil melalui berbagai pertimbangan sebelumnya.

Individu yang mandiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi,
- b) Secara relatif jarang mencari pertolongan pada orang lain,
- c) Menunjukkan rasa percaya diri, d) Mempunyai rasa ingin

menonjol,

- e) Mampu mengerjakan tugas rutin yang dipertanggungjawabkan padanya, tanpa mencari pertolongan dari orang lain, dan f) Mampu berpikir secara kritis, kreatif dan inovatif terhadap tugas dan kegiatan yang dihadapi

Sikap individu yang mandiri dengan diiringi oleh keharmonisan, menjaga amanah, sikap ramah, dan memiliki keunggulan baik prestasi akademik maupun keunggulan nurani merupakan sebuah cita-cita yang diharapkan begitu mahasiswa mendapat pendidikan dari STKIP PGRI Pontianak. terjaganya keharmonisan dan dengan diimbangi oleh sikap mandiri maka lembaga ini akan menjelma menjadi lembaga yang bias mencetak dan pendidik generasi penerus bangsa terutama untuk wilayah Kalimantan Barat.

## **C. Sejarah IKIP PGRI Pontianak**

### **1. Proses Peralihan STKIP menuju IKIP**

Semenjak Undang-Undang Guru dan Dosen disetujui oleh legislatif, maka gairah dan kepedulian di dunia pendidikan bangkit kembali. Tahun 2005 merupakan awal kebangkitan STKIP PGRI Pontianak dalam menata manajemen pendidikannya yang selama ini mengalami masa degrenasi bahkan hampir kolap. Ketika itu berbagai usaha dan perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang pendidikan di kampus ini namun sulit untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam menempuh pendidikan terutama guru.

Hal ini dimaklumi, ketika itu adalah masa dimana kepedulian untuk menjadi guru masih sangat rendah. Guru menjadi tidak populer ketika itu, apakah persoalan kesejahteraan yang menjadi alasan, bisa jadi demikian. Tidak menutup kemungkinan dalam era yang serba maju dan membutuhkan banyak pendapatan



maka seorang guru harus mampu dan pandai-pandai mengatur kehidupannya sehingga tidak tertindas dalam keterpurukan.

Guru tidak lagi menjadi penerang dalam kegelapan. Dulu mungkin keberadaan guru sangat dibutuhkan dan bahkan dirasakan oleh masyarakat. Ketika masuk dalam era moderan hingga saat ini guru adalah sebuah mata pencaharian atau pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang terkadang terseok oleh beban hidup yang begitu berat. Bertolak dari hal di atas, tampaknya janji pemerintah soal kesejahteraan yang termaktub dalam UU Guru dan Dosen tidak akan jauh berbeda dengan kasus angka 20% dari UU Sisdiknas.

Lebih lanjut, ternyata janji kesejahteraan berupa tunjangan profesi itu juga tidak serta-merta mudah diperoleh para guru dan dosen. Dan jika pun bisa, hanya bisa diraih oleh sebagian kecil guru dan dosen yang ada saat ini. Karena mereka harus terlebih dahulu memiliki ijazah minimal S1 atau D4 bagi guru dan S2 bagi para dosen. Selanjutnya mereka juga harus melakukan uji kompetensi dan sertifikasi. Dari UU ini, pemerintah akan menguji kompetensi para guru.

STKIP PGRI Pontianak sejak berdiri pada tahun 1982 sudah memulai komitmen untuk memprofesionalismekan guru. Hal ini ditunjukkan dengan guru yang sudah memiliki minat untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang sarjana pendidikan. Bahkan pada waktu itu lembaga ini sudah memiliki 4 program studi. Namun pada akhir Desember 2006 STKIP PGRI Pontianak sudah mencoba untuk memperluas jaringannya dalam rangka membuka program studi baru. Kemudian pada awal September 2007 STKIP PGRI Pontianak diberikan kepercayaan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mengelola program studi baru yakni Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Srogram Studi Pendidikan Sejarah.

Di samping itu jumlah mahasiswa yang masih di bawah 1200 an mahasiswa, sehingga eksistensi lembaga masih kurang memberikan pengaruh pada masyarakat bahwa keberadaan STKIP PGRI Pontianak untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Kalimantan Barat. Satu sisi jumlah dosen masih di bawah standar dari program studi yang ada. Pada saat itu dosen yayasan baru 11 orang dosen, sementara dosen PNS yang diperbantukan pun sedikit. Namun tidak mengurangi perjuangan lembaga tetap hidup seperti api yang sedang memakan sekam, pelan tapi pasti.

Keberadaan fasilitas masih dalam pembenahan sehingga membutuhkan banyak dana terutama untuk mendirikan sarana yang berhubungan dengan proses perkuliahan dan praktikum. Ruang kelas, perpustakaan, ruang pertemuan (aula), dan sarana ibadah masih sederhana. Sejak tahun 2007 yang sebelumnya program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi jenjang D2 dan program studi Administrasi Pendidikan di tutup dikarenakan sudah tidak lagi banyak peminat serta adanya bermunculan program studi yang baru.

Dengan demikian terdapat 5 program studi yang dikelola oleh STKIP PGRI Pontianak yang kemudian dipertahankan dan menjadi pemicu untuk menambah beberapa program studi lagi. Obsesi untuk menambah program studi baru sudah tercetus pada tahun 2008, dan ketika itu sudah terpikirkan untuk merubah status dari STKIP menjadi IKIP PGRI Pontianak. Pada masa kepemimpinan Ketua STKIP PGRI Pontianak yakni Prof. Dr. H. Samion H. AR, M. Pd, perkembangan dan perubahan lembaga ini begitu terasa dan dengan cepat mencapai obsesi yang diharapkan oleh stakeholder yang ada di dalam lembaga ini.

Banyak hal yang dibenahi dan dipercepat dalam rangka mencapai terbentuknya IKIP PGRI Pontianak. Salah satunya adalah mempersiapkan tenaga pengajar yang handal. Dosen

adalah aset yang paling mahal dan tidak dapat tergantikan oleh apapun. Sehingga mulai dari tahun 2007 hingga tahun 2012, STKIP PGRI Pontianak memberikan kesempatan kepada semua dosen untuk melanjutkan pendidikannya hingga minimal kejenjang Magister atau S2. Upaya ini dilakukan tidak serta-merta untuk pemenuhan dalam rangka pembentukan IKIP, namun perintah UU Guru dan Dosen, mengamanatkan dosen harus memiliki standarisasi pendidikan minimal magister sesuai rumpun ilmu yang menjadi tanggungjawab dosen. Hal ini pada dasarnya adalah guna menciptakan dosen yang profesional, sehingga dengan aturan tersebut dan tujuan lembaga maka semua dosen harus disekolahkan<sup>30</sup>.

Hal yang menarik dari STKIP PGRI Pontianak yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Samion H.AR, M.Pd, ketika memberikan tugas kepada para dosen untuk melanjutkan pendidikannya di program pascasarjana, harus ditempuh di luar Pulau Kalimantan. Hal ini dilakukan guna memberikan pengalaman dan kekuatan kepada para dosen untuk menimba ilmu sebanyak mungkin sehingga dosen dapat menjadi motivator dan memberikan tauladan kepada mahasiswa ketika mengimplementasikan ilmunya di dalam kelas. Sementara di Pulau Kalimantan sendiri sebenarnya terdapat pendidikan program Pascasarjana, namun ini semua semata-mata adalah untuk kepentingan lembaga sepenuhnya sehingga tidak rugi ketika dosen disekolahkan di luar Kalimantan, walau anggaran yang dikeluarkan cukup besar untuk itu.

Kemudian pertimbangan lain yang menjadi dasar oleh Ketua STKIP PGRI Pontianak untuk menerima dan menambah jumlah dosen karena sejak tahun 2007 pendaftar di lembaga ini mengalami kenaikan yang sangat drastis. Terutama pada program

---

<sup>30</sup>Wawancara Samion AR, Februari 2015

studi yang baru, yakni pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi serta pendidikan sejarah. Sebelum tahun 2007 dengan jumlah mahasiswa di bawah 1200 an, maka ada perubahan yang sangat tepat untuk merekrut tenaga pengajar sesuai dengan jumlah mahasiswa yang diterima di STKIP PGRI Pontianak. Perekrutan dosen dengan cara sistem kontrak terlebih dahulu, dalam jangka satu tahun atau dengan pertimbangan yang sesuai, maka dosen dapat diangkat menjadi dosen tetap yayasan.

Obsesi untuk merubah status kelembagaan dari STKIP menjadi IKIP PGRI Pontianak adalah sebuah mimpi yang harus dicapai. Sesuai peraturan pemerintah melalui SK Mendiknas No.234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000, mengatur bahwa untuk menjadi IKIP atau Universitas minimal harus memiliki 6 program studi. Dengan demikian STKIP PGRI Pontianak sudah masuk dalam kategori untuk menjadi IKIP sesuai obsesi yang telah direncanakan. Kemudian berlanjut pada tahun 2008 STKIP PGRI Pontianak mengajukan 5 program studi baru, untuk memenuhi syarat menuju IKIP. Pada Juli 2008 ada 5 prodi yakni, Pendidikan Geografi, Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Fisika, Pendidikan Teknologi Informasi Komputer.

Program studi yang diajukan tadi kemudian pada tahun 2009 diterima oleh Dirjen Pendidikan Tinggi untuk dikelola dan STKIP PGRI Pontianak siap mengoprasionalkannya. Sehingga pada saat itu lembaga ini sudah memiliki 10 program studi yang menjadi dasar untuk menjadi IKIP. Persiapan yang begitu matang dan penuh dengan perjuangan baik fisik, dana maupun sumber daya manusia dipersiapkan untuk menuju IKIP PGRI Pontianak.

Pada 2 Februari 2010 pengajuan pendirian IKIP sudah mulai dikerjakan dan beriringan dengan proses pembenahan. Perjalanan yang panjang menjadi penguat dan menanamkan pondasi yang kuat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Gejolak

pun hilang datang bergantian, dinamika prustasi terkadang mengganggu keinginan untuk berbuat. Langkah menuju IKIP tidak henggang dari cita-cita bersama walau dihadapi dengan banyak rintangan dan hambatan. Pendirian IKIP bukanlah semata-mata untuk merubah status saja. Besar dari itu kepentingan pendidikan yang harus banyak dirubah dan diperbaharui terutama sebuah sistem kelola lembaga yang ketika itu kurang maksimal.

Hal yang menjadi penghambat mencapai pendirian IKIP adalah status kepengurusan dan organisasi yang berada di atasnya. Yakni legalitas sebuah yayasan yang tumpang tindih. Ketika merunut pada sejarah berdirinya STKIP PGRI Pontianak yang lebih dahulu lahir dari yayasan. Maka sudah jelas bahwa keberadaan yayasan menjadi nomor dua dan kehidupan lembaga pun tergantung pada dirinya sendiri bukan karena yayasan. Hal inilah kemudian menjadi runding dan diperbincangkan dalam waktu yang cukup panjang dan berimbas pada proses pengurusan pendirian IKIP.

Suatu yang menarik ketika melihat peristiwa tersebut karena dalam peraturannya ketika mendirikan sebuah lembaga kependidikan yang berstatus swasta maka harus dibentuk sebuah yayasan untuk menjadi pelindung dan penasehat lembaga. Kemudian ini yang menjadi masalah dan dipermasalahkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi. Yayasan Pendidikan Tinggi PGRI Pontianak sudah ada ketika STKIP PGRI Pontianak didirikan oleh Prof.Dr. H. Hadari Nawawi, yang ketika itu di bawah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah II di Palembang. Namun selama berjalan sekian tahun lamanya dan pada tahun 1990 STKIP PGRI Pontianak berpindah Kopertis menjadi di bawah Kopertis XI Banjarmasin<sup>31</sup>, maka oleh Pengurus Besar PGRI Jakarta memberikan perintah bahwa Lembaga Pendidikan Tenaga

---

<sup>31</sup>Wawancara, Hamid Darmadi, Januari 2015.

Kependidikan (LPTK) di bawah naungan PGRI secara kordinasi berlingung di bawah Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Pendidikan Tinggi PGRI. Kemudian status yayasan yang kemudian menjadi perdebatan, namun itu dapat diselesaikan dengan sempurna tanpa adanya sebuah pertikaian.

Sepanjang persiapan untuk mewujudkan IKIP, berbagai hal dilakukan. Salah satunya adalah membangun fasilitas perkuliahan dan pembenahan gedung yang sudah berdiri. Persiapan dimulai dengan kepemilikan tanah di jalan Ampera yang dibeli seluas 2 hektar awalnya diorientasikan untuk fasilitas olahraga yakni lapangan bola kaki, lapangan volly, lapangan basket dan fasilitas lainnya.<sup>32</sup> Kemudian dengan kemampuan yang ada maka lahan pembangunan gedung ditambah luasnya menjadi 4 hektar. Sehingga konsep awal yang diperuntukan untuk fasilitas olahraga, ketika ada penambahan luas area kampus maka terjadi perubahan orientasi pembangunan. Hal ini juga memiliki dasar, yang dimana gedung dan fasilitas di jalan Ilham ternyata berstatus tanah wakaf dan dikhawatirkan bermasalah dikemudian hari maka perkuliahan akan difokuskan di kampus jalan Ampera.

Dengan demikian pada tahun 2010 semester ganjil 5 program studi sudah pindah ke kampus jalan Ampera yakni, Program Studi Bimbingan Konseling, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra, Pendidikan Geografi. Kemudian 5 prodi lainnya masih melaksanakan perkuliahan di kampus jalan Ilham. Proses pengajuan dan perbaikan dalam pengajuan status IKIP masih berjalan penuh dengan lika-liku dan dinamika yang diperjuangkan. Pembangunan kampus jalan Ampera yang dikenal dengan sebutan *Kampus*

---

<sup>32</sup>Wawancara, Samion AR, Maret 2015

*Ampera*<sup>33</sup>, merupakan ide besar ketua STKIP PGRI Pontianak ketika itu dipimpin oleh Prof. Dr. H. Samion HAR, M.Pd. Adapun filosofi bangunan mengacu pada konsep bangunan modern yang memberikan pandangan yang berbeda dari bangunan lainnya.

Filosofi bangunan dengan konsep modern guna memberikan suasana berbeda dan menumbuhkan perasaan nyaman dan tanpa menghilangkan suasana akademisi seorang sivitas akademika sebuah perguruan tinggi. Kesederhanaan terwujud ketika antara dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan bersama-sama melaksanakan visi misi lembaga yakni mencapai HARUM<sup>34</sup>. Modal kebersamaan, kerja iklas maka kampus Ampera terbangun, sesuai dengan rencana.

Perjalanan waktu yang singkat antara 2011 hingga 2012, pembangunan kampus Ampera semakin giat sehingga pembenahan dari berbagai aspek selalu diperbaharui. Perlahan-lahan perpindahan perkuliahan dari kampus Ilham menuju kampus Ampera terus dilakukan, sehingga pada jangka waktu tersebut bangunan ruang kuliah gedung C didirikan. Pada awalnya bangunan yang berdiri di kampus Ampera yakni gedung A Rektorat dan gedung B ruang perkuliahan. Selesaiannya pembangunan gedung C pada tahun 2013 yang pada akhirnya pertengahan 2013 semua program studi sudah difokuskan perkuliahannya di kampus Ampera.

Dengan demikian kampus Ampera menjadi pusat studi bagi STKIP PGRI Pontianak. Kemudian kampus yang berada di jalan Ilham diperuntukan khusus praktikum dan laboratorium semua program studi. Perpustakaan juga masih menjadi tanda kampus Ilham tetap hidup sebagai penerangan untuk meningkatkan

---

<sup>33</sup> Sebutan oleh sivitas akademika dan masyarakat setempat atas keberadaan bangunan yang didirikan.

<sup>34</sup> Harmonis, Amanah, Ramah, Unggul dan Mandiri

profesionalisme seorang calon pendidik. Berita mengenai status lembaga masih dinanti-nanti hingga pada awal tahun 2014, dan menjadi pembicaraan bagi hampir seluruh masyarakat Kalimantan Barat.

Pada tanggal 20 November 2013, visitor dari Dirjen Pendidikan Tinggi melaksanakan visitasi dalam rangka perubahan dan persiapan menuju IKIP. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2014 ternyata surat keputusan perubahan status menjadi IKIP sudah dikantongi berdasarkan surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud RI Nomor: 22434/A.51/HK/2014 tertanggal 4 Maret 2014 tentang penyampaian salinan SK Kemendikbud nomor: 055/P/2014 tertanggal 27 Februari 2014. Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia<sup>35</sup>, mengeluarkan perintah perubahan status dari STKIP menjadi IKIP PGRI Pontianak.

Dengan tetap menyelenggarakan pendidikan dan oprasionalnya yang terbagi menjadi 4 fakultas<sup>36</sup> dan setiap fakultas memiliki beberapa program studi. Adapun program studi yang di bawah naungan fakultas, yakni Fakultas IPPS terdiri Program Studi Pendidikan Bimbingan Konseling, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah dan Pendidikan Geografi. Fakultas MIPATek terdiri dari Program Studi Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika dan Pendidikan Teknologi Informasi Komputer. Fakultas Bahasa dan Seni terdiri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra, Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan terdiri dari Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi.

---

<sup>35</sup>Lihat lampiran SK Perubahan Status dari STKIP PGRI Pontianak menjadi IKIP PGRI Pontianak

<sup>36</sup>Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial (IPPS), Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi (MIPATek), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK).



Sehingga perubahan status menjadi IKIP PGRI Pontianak membuat lembaga lebih percaya diri dan tentunya masih berbenah untuk mewujudkan visi MANTAB<sup>37</sup>. Pada tanggal 27 Juni 2014 IKIP PGRI Pontianak bersama seluruh sivitas akademika melaksanakan persemian yang dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yakni Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS<sup>38</sup>. Kemudian sistem organisasi IKIP PGRI Pontianak secara otomatis berubah, tidak lagi dipimpin oleh seorang Ketua namun sesuatu itu dirubah menjadi Rektor. Untuk periode 2014-2018 kepemimpinan pertama IKIP PGRI Pontianak berdasarkan hasil pemilihan Senat maka Rektor pertama adalah Prof. Dr. H. Samion H.AR, M.Pd. Selaku Wakil Rektor I yakni Prof. Dr. Hamid Darmadi, M.Pd dan Wakil Rektor II adalah Dra. Hj. Sulha, M.Si.

## **2. Dari HARUM sampai MANTAB**

Berawal dari sebuah keprihatian atas kekurangan dan ketidakmapuan guru untuk meningkatkan kualitas diri. Maka berdirilah sebuah perguruan tinggi yang mengedepankan pendidikan untuk para guru di tanah air. Kalimantan Barat merupakan wilayah jangkauannya sangat luas dan sulit untuk ditempuh terutama guru yang tidak merata di setiap daerah. Oleh karena itu STKIP PGRI Pontianak berusaha mengakomodir kebutuhan tersebut. Salah satunya adalah memberikan pelayanan pendidikan guru untuk mencapai jenjang sarjana.

Mulai berdiri sejak tahun 1982 dan mulai berkembang diawal tahun 1999, kemudian mengharumkan dirinya di tahun 2000 an. Hal ini merupakan bukti bahwa keberadaan STKIP PGRI Pontianak memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat terutama guru

---

<sup>37</sup> Mandiri, Amanah, Nalar, Tangguh, Adil dan Bermartabat.

<sup>38</sup> Lihat prasasti di hall Rektoral IKIP PGRI Pontianak.

dalam jabatan. Awal tahun 2007 STKIP PGRI Pontianak mencapai puncak susksinya ketika membuka 2 program studiyakni Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, dan Pendidikan Sejarah. Peminat yang mendaftarkan diri mencapai 7000 an calon mahasiswa<sup>39</sup>. Hal ini tidak lepas dari kebijakan yang disahkan oleh legislatif mengenai Undang-Undang Guru dan Dosen, yang berorientasi pada kepentingan guru yakni kualifikasi dan kesejahteraan menjadi guru. Ditambah lagi dengan adanya guru yang harus memiliki sertifikat pendidik yang kemudian mendapatkan kompensasi berupa tunjangan sertifikasi.

Ternyata kepekaan masyarakat begitu agresif, terhadap dampak dari sertifikasi guru tersebut, sehingga perguruan tinggi yang menyelenggarakan LPTK menjadi laris masnis termasuk STKIP PGRI Pontianak. Tidak disangkal lagi bahwa menjadi guru adah sebuah profsek yang menjanjikan. Sementara permintaan dunia pendidikan terhadap kebutuhan guru semakin bertambah. Ini menjadi alasan pada tahun 2007 hingga 2010 STKIP PGRI Pontianak, mengakomodir permintaan masyarkat untuk mendidik, melatih dan membimbing mahasiswa sebagai calon guru yang profesional. Hal ini tertuang dalam visi misi STKIP PGRI Pontianak.

Kepemimpinan Prof.Dr. H. Samion H.AR, M.Pd, pada 2006 akhir sudah membuat rancangan untuk membangun lembaga ini dengan visi HARUM. Sebuah lembaga yang berdaulat dan otonom alangkah hebatnya ketika mewujudkan keharmonisan di dalamnya. Konsep kekeluargaan merupakan kunci dalam menjalankan setiap aktivitas di kampus. Tidak memandang suku, ras, agama dan bahkan suku bangsa, namun semuanya dipandang sama. Baik kesempatan untuk mendapatkan fasilitas, ilmu pengetahuan dan kebebasan mimbar.

---

<sup>39</sup>Wawancara, Samion AR, Maret 2015.

Setiap pemimpin adalah panutan, contoh sauri tauladan. Sehingga yang menjadi pemimpin adalah bentuk dari amanah yang telah diberikan tanggungjawan untuk membangun lembaga ini dengan jujur dan ikhlas. Pergantian kepemimpinan memiliki berbagai kebijakan dari Prof.Dr. H. Hadari Nawawi, H.M Ali AS, SH, Prof. Dr. H. Urai Usna Asmara, M.Pd, Dra. Hj. Uray Titin Hiswari, M.Si hingga Prof. Dr. H. Samion H.AR, M.Pd, namun kepentingan kemajuan lembaga tetap menjadi prioritas. Terutama pembangunan fisik dan sumber daya manusia.

Keramahan adalah kunci sukses dalam setiap tindakan dalam kehidupan ini. Mulaidari penerimaan mahasiswa baru hingga proses pelayanan publik STKIP PGRI Pontianak selalu mempertahankan keramahan bagi siapa saja yang dilayani dan dihadapi. Hal ini merupakan bentuk dari kepedulian atas sifat manusia yang serba toleran guna mencapai kebahagiaan. Begitu pula dengan keunggulannya, berbagai macam prestasi yang diperoleh baik tingkat regional maupun nasional. Satu-satunya perguruan tinggi di Kalimantan Barat yang konsisten mengabdikan dirinya untuk kemajuan dunia pendidikan adalah STKIP PGRI Pontianak. Dengan demikian keunggulan tidak hanya terbatas pada prestasi sebuah kejuaraan namun besar dari itu, yakni hampir semua alumni STKIP PGRI Pontianak yang tersebar diseluruh Kalimantan Barat dan bahkan di luar Kalimantan masuk memiliki daya serap khususnya di instansi pendidikan.

Ini artinya, kemampuan lembaga ini mencetak tenaga yang handal sudah tidak perlu diragukan lagi. Memang masih banyak pembebanan dalam rangka mencapai sebuah titik kesempurnaan dalam sistem kependidikan. Hal ini tidak terlepas dari peran berbagai stakeholder dan masyarakat Kalimantan Barat khususnya. Sehingga STKIP PGRI Pontianak masih tetap dihati dan peminatnya memiliki keyakinan ketika menempa ilmu pengetahuan di lembaga

ini akan mampu bersaing di dunia luar.

STKIP PGRI Pontianak merupakan perguruan tinggi swasta tentunya semua sumber pendanaan berasal dari swadaya masyarakat yang mengikuti pendidikan di lembaga ini. Maka secara tidak langsung sistem pengelolaan lembaga dilakukan secara mandiri dan otonom. Pembangunan dari berbagai bidang baik fisik maupun non fisik, semuanya diatur oleh STKIP PGRI Pontianak sendiri yang dikoordinasikan melalui Yayasan. Termasuk dalam membangun gedung, pembayaran gaji pegawai, belanja rutin hingga membiayai pendidikan dosen hingga ke jenjang magister (S2). Ini menunjukkan komitmen dan keseriusan lembaga untuk mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi kebijakan pemerintah yang di amanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.

Pada awal tahun 2014, STKIP PGRI Pontianak berubah status menjadi IKIP PGRI Pontianak yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 055/P/2014 tertanggal 27 Februari 2014. Sehingga sistem kelola dan secara organisasi mengalami perubahan yang signifikan. Mulai dari sebutan Rektor sebagai pimpinan yang perguruan tinggi, Dekan untuk sebutan pimpinan ruang lingkup fakultas. semuanya diatur di dalam statuta IKIP PGRI Pontianak.

Visi HARUM ketika masih berstatus STKIP PGRI Pontianak, kemudian berubah menjadi IKIP PGRI Pontianak visinya adalah MANTAB. Sangat mendasar isi dan maksud visi misi tersebut yang berlandaskan ke HARUM an, pada saat lembaga ini masih sekolah tinggi yang telah banyak berbuat baik baik pegawainya, mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Barat. Berlanjut menjadi MANTAB yang memiliki makna, bahwa sebelumnya mampu mewujudkan keharuman dan sekarang sudah mantab dalam segala hal termasuk berkompetitif dalam menjaga kualitas dan tanggung

jawab keilmuan.

Dapat diaktualisasikan kemajuan IKIP PGRI Pontianak saat ini sudah di atas rata-rata. Artinya indeks sumber daya manusia sudah memenuhi syarat bagi proses pendidikan di perguruan tinggi. Apalagi dengan support lembaga yang sangat luar biasa terhadap para dosen, hingga tahun 2015 ini setiap program studi mendapat kouta bagi dosennya untuk melanjutkan pendidikan ke jejang doktoral (S3). Tentu saja dana yang digunakan adalah anggaran lembaga yang telah diperuntukkan untuk itu. Hal ini mendapatkan respon positif bagi dosen, sehingga pada tahun 2015 ini dosen yang akan melanjutkan program pendidikan doktoral sebanyak 60 dosen dan gabungan 10 program studi yang ada. Dengan harapan tiga tahun kemudian IKIP PGRI Pontianak sudah memiliki doktor-doktor baru yang sesuai dengan keilmuannya masing-masing.

Sebuah kebanggaan tersendiri bagi perguruan tinggi swasta mampu dan sangat peduli terhadap para dosen untuk diberikan bantuan biaya pendidikan secara cuma-cuma. Perhatian guna meningkatkan kualitas dosen, maka lembaga berupaya memberikan biaya penelitian dalam setiap semester sebanyak 7 paket yang terdiri dari 1 penelitian program studi, 2 penelitian kelompok dan 4 penelitian mandiri. Setiap penelitian memiliki porsi biaya penelitian yang berbeda. Hal ini dilakukan guna mendongkrak minat dosen untuk meneliti yang berimbas pada meningkatnya kemampuan dan mampu menghasilkan berbagai bidang penelitian.

Selain itu, semua pegawai mendapatkan perlindungan kerja berupa asuransi untuk hari tua (pensiun), asuransi kecelakaan dan sedang diproses asuransi kesehatan. Satu sisi kepentingan lembaga terhadap pegawai tidak dapat disepelekan, mengingat aset yang paling berharga adalah dosen dan karyawannya. Kemudian guna mempermudah manajemen keuangan IKIP PGRI Pontianak,

bekerjasama melalui bank guna mengamankan dana tersimpan dengan aman dan pembukuan. Bank yang pernah digunakan yakni BNI namun tidak lama. Kemudian menjalin kerjasama dengan BTN, Bank Kalbar dan Bank Muamalat.

Selain membangun fisik berupa bangunan dan sumber daya manusia dalam rangka menciptakan intelektualitas, IKIP PGRI Pontianak juga memperkuat spiritual pegawainya. Salah satu hal yang dilakukan adalah memberikan biaya untuk umroh bagi yang muslim dan paket religi bagi yang nasrani. Semua yang tertuang di dalam konsep tersebut merepresentasikan Mandiri, Amanah, Nalar, Tangguh, Adil dan Bermartabat. Apabila visi tersebut berjalan dan bertahan sesuai komitmen bersama maka cita-cita lembaga untuk menciptakan sumber daya manusia akan menghantarkan IKIP PGRI Pontianak menjadi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang handal.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi IKIP PGRI Pontianak adalah merubah paradigma masyarakat mengenai pendidikan murah dan bahkan gratis. Karena ini akan menjadi masalah bagi sebuah perguruan tinggi swasta. Masyarakat hanya memahami bahwa menempuh pendidikan di LPTK akan mencetak tenaga guru saja. Sementara menjadi pegawai negeri bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu IKIP PGRI Pontianak memberikan pemahaman bahwa lembaga ini tidak hanya meluluskan mahasiswa hanya bekerja menjadi guru, namun di luar dari itu lulusannya dapat bekerja pada instansi lain. Kemampuan seorang sarjana pendidikan pada dasarnya sudah mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapainya terutama ketika mencari kelayakan kebutuhan hidup. Manusia yang bermartabat apabila hidupnya memberikan manfaat bagi dirinya dan orang sekitarnya. Begitu pula mimpi IKIP PGRI Pontianak, yang penuh perjuangan hingga saat ini tidak patah arang terus mengarungi rintangan untuk meraih cita-cita yakni mencerdaskan kehidupan

bangsa Indonesia.



Gedung STKIP PGRI Pontianak lama di Jl Ilham  
(Sumber: Arsip STKIP PGRI Pontianak)



# BAB III

## PERAN LEMBAGA DAN YAYASAN STKIP PGRI PONTIANAK DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN

### **A. Peran Lembaga STKIP PGRI Pontianak**

Penyelenggaraan pendidikan tinggi bertujuan untuk menyiapkan generasi bangsa agar mempunyai kualitas akademik dan intelektual yang baik sehingga dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan yang berwawasan luas dan mampu menjawab tantangan bangsa dalam persaingan global yang semakin tajam. Oleh sebab itu, perguruan tinggi mempunyai posisi yang strategis terhadap kepentingan nasional. Mengingat posisi strategis tersebut maka di era otonomi saat ini, kewenangan kebijakan umum untuk perguruan tinggi masih dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan kewenangan operasional diserahkan secara otonom kepada lembaga perguruan tinggi.

Dinamika kebijakan pembangunan pendidikan tinggi dan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, mengharuskan perguruan tinggi untuk mengembangkan paradigma akademis baru dalam bentuk kebijakan akademis yang mampu mengakomodasi, mengantisipasi kemajuan global. STKIP PGRI Pontianak, sebagai bagian dari masyarakat global tidak dapat

keluar dari pengaruh yang datang dari luar dan harus mampu berpartisipasi aktif di dalam membangun masyarakat dan tetap bersandar pada nilai budaya bangsa Indonesia.

Garis-Garis besar Haluan Negara mengamanatkan pembangunan pada bidang pendidikan diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia. Maka pendidikan mendapatkan kedudukan peran yang sangat penting dan strategis. Sejalan dengan hal tersebut maka peningkatan pemerataan pada perguruan tinggi di seluruh wilayah Nusantara inisebagai wujud wawasan nusantara dengan tetap mempertimbangkan kualitas dan memperhatikan potensi perguruan tinggi secara profesional.

Dengan demikian potensi, inisiatif dan daya kreatif setiap perguruan tinggi dapat dikembangkan sepenuhnya. Termasuk pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan landasan 4 strategi kebijakan dasar pendidikan, yakni pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan dan peningkatan efisiensi internal serta efektivitas pengelolaan pendidikan.<sup>1</sup>

Selain itu juga perguruan tinggi harus mampu melahirkan manusia yang berjiwa penuh pengabdian dan memiliki tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan Negara. Misi khusus pendidikan tinggi adalah; mempersiapkan kader pemimpin bangsa dan menyiapkan sumberdaya manusia yang berkemampuan lanjut di masa depan dengan wawasan kepemimpinan yang unggul. Tentu saja seorang pemimpin harus memiliki sebuah orientasi ke depan yang lebih kompleks, memiliki landasan berpikir yang ilmiah, efektif dan efisien. Untuk mencapai itu semua, perguruan tinggi harus menyelenggarakannya dengan tujuan yang berpedoman

---

<sup>1</sup>Chairuddin PLubis, 2004. *Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Disiplin Nasional*. E-USU Repository Universitas Sumatera Utara".

pada pendidikan nasional, kaidah, moral, dan etika keilmuan, kepentingan masyarakat serta memperhatikan minat, kemampuan prakarsa pribadi.

Hanya dengan pengetahuan yang mendalam tentang apa yang dibutuhkan pembangunan tersebut. Pendidikan akan dapat lebih mencapai hasil sesuai misi, visi dan fungsi. Upaya menciptakan keterkaitan dan kesepadanan tersebut mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga bahwa sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi menjadi tolok ukur yang dijadikan sebagai barometer untuk menilai kualitas perguruan tinggi tersebut. Hal ini diwujudkan dalam daya serap dunia kerja yang menggunakan lulusan sebagai bentuk keberhasilan dalam mendidik manusia.

Tujuan pendidikan pada perguruan tinggi tidak hanya sebatas pada proses penyiapan lulusan dalam dunia kerja, tetapi jauh lebih luas yakni pembentukan mahasiswa menjadi manusia seutuhnya yang memiliki karakter cerdas, bermoral baik dan dapat menjadi panutan dalam bermasyarakat. Pendidikan sebagai suatu proses *raw input* yakni peserta didik dan *instrument input* yakni sarana prasarana, terdiri gedung, perpustakaan, pedoman akademik, dosen, kurikulum, metode dan pendukung lainnya<sup>2</sup>.

Dinamika pembangunan khususnya kebijakan dalam bidang pendidikan tinggi, disenergikan pada tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengisyaratkan sebuah perguruan tinggi mengembangkan paradigma akademik yang disesuaikan dalam bentuk kebijakan akademik guna menghadapi perkembangan globalisasi. Berbagai pandangan, pemikiran, bahkan logika kelembagaan terintegrasi dalam sebuah rumusan

---

<sup>2</sup>“Rosul Asmawi M, 2005. *Strategi Meningkatkan Lulusan Bermutu Di Perguruan Tinggi*. Jurnal *Makara Sosial Humaniora* Vol. 9 No.2”.

kebijakan akademik. STKIP PGRI Pontianak merupakan bagian integral dari masyarakat global, sepatutnya mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat secara berkelanjutan<sup>3</sup>.

Penyelenggaraan pendidikan yang baik, disusun secara sistematis melalui persiapan yakni sumber daya manusia yang berkualitas dalam berkehidupan di dalam masyarakat akademis yang santun. Ini merupakan salah satu visi yang tertuang dalam pengembangan STKIP PGRI Pontianak. Penyelenggaraan dan pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi bersandar pada; Pancasila, UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003, PP Nomor 19 Tahun 2005, PP Nomor 18 tahun 2003, PP Nomor 19 Tahun 2005, UU No. 18 Tahun 2003.

## **Tri Darma Pendidikan**

### **1. Pendidikan dan Pengajaran**

STKIP PGRI Pontianak sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertugas mengembangkan Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Melalui wibawa dan jatidiri lembaga ini mampu menjadi mitra terhormat dalam segala aktivitas di dalam masyarakat khususnya untuk Kalimantan Barat. Pencitraan publik dilakukan dalam berbagai hal salah satunya melalui kebebasan mimbar akademis, otonomi keilmuan dan memperhatikan kekayaan hak intelektual dan etika keilmuan dan menyelenggarakan event-event besar lainnya.

Dalam lingkungan kampus proses perkuliahan dilaksanakan pagi dan sore bahkan tidak jarang justru perkuliahan ada dilaksanakan hingga malam hari. Hal ini disebabkan oleh keadaan kampus yang masih sangat minim dengan sarana ruangan perkuliahan. Namun kekurangan tersebut tidak menjadi hambatan yang mempengaruhi

---

<sup>3</sup> "Pedoman Operasional STKIP PGRI Pontianak Tahun 2013".

proses pendidikan di STKIP PGRI Pontianak, namun ini menjadi penambah semangat bagi pengelola baik dosen maupun yayasan dalam rangka meningkatkan martabat guru ketika itu.

Proses pendidikan di kampus STKIP PGRI Pontianak dilaksanakan secara sistematis selama 8 semester. Setiap semester diselenggarakan selama 6 bulan secara relative sesuai kalender akademik. Selama STKIP PGRI Pontianak berdiri program studi yang ditawarkan kepada masyarakat sebanyak 10 program studi. Namun seiring sejarah STKIP PGRI Pontianak hadir di Kalimantan Barat banyak mengalami perubahan. Pada 25 Juli 1981 oleh pengurus daerah PGRI Kalimantan Barat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru sebagai anggota PGRI sekaligus dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Maka dengan kesepakatan dari pengurus daerah PGRI Kalimantan Barat merintis sebuah perguruan tinggi dan lahirlah STKIP PGRI Pontianak. Pada saat itu yang diselenggarakan dalam proses pendidikannya hanya 4 program studi yakni program studi Administrasi Pendidikan dan Supervisi Pendidikan, program studi Bimbingan dan Penyuluhan, program studi Pendidikan Moral Pancasila dan program studi Pendidikan Matematika<sup>4</sup>.

Pada mulanya proses perkuliahan dilaksanakan di gedung Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri Pontianak yang sekarang menjadi SMA Negeri 1 Pontianak dan SPG PGRI Pontianak yang sekarang menjadi SMK PGRI. Kemudian seiring waktu dan proses yang panjang akhirnya STKIP PGRI Pontianak memiliki gedung perkuliahan yang berdiri di Jalan Ilham sejak tahun 1990. Perkuliahan yang berpindah-pindah adalah sebuah perjalanan panjang yang menentukan kekuatan dan kegigihan pada pejuang pendidikan untuk mempertahankan perguruan tinggi ini. Ketika

---

<sup>4</sup> "ibid".

dalam keadaan yang serba apa adanya STKIP PGRI Pontianak mampu mencetak tenaga guru yang handal, dan waktu itu ujian negara masih diberlakukan<sup>5</sup>.

Dengan diberlakukannya perkuliahan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia, pada tahun 1985 STKIP PGRI Pontianak tidak lagi menyelenggarakan Program Sarjana Muda yang sebelumnya merupakan gelar bagi lulusannya. Dengan demikian system kurikulum yang berlaku adalah Strata Satu (S1), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0121/0/1985, tertanggal 11 Maret 1985. Sebagai perguruan tinggi swasta yang di bawah wewenang Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), yang berawal di bawah naungan Kopertis Wilayah II Palembang. STKIP PGRI Pontianak adalah perguruan tinggi yang otonom dan mampu melaksanakan perkuliahan dengan baik dan berkesinambungan dengan memperhatikan sumber daya manusia sebagai tenaga pendidik dan kependidikan yang kemudian diangkat melalui yayasan maupun pemerintah.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0124/U/1979 tanggal 8 Juni 1979 tentang penjenjangan program pendidikan di perguruan tinggi, yang kemudian dipertegas dengan PP Nomor: 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, dijelaskan bahwa pelaksanaan perkuliahan dalam proses belajar mengajar diselenggarakan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS). Sehingga dengan segeranya STKIP PGRI Pontianak melaksanakan system perkuliahan berdasarkan aturan tersebut. Penyelenggaraan pendidikan di STKIP PGRI Pontianak melalui Sistem Kredit Semester dimana pendidikan dibebankan kepada mahasiswa dan tenaga pengajar.

Kemudian perkuliahan diselenggarakan dalam satu tahun

---

<sup>5</sup> Lihat wawancara dengan bapak Prof. Dr. Hamid Darmadi, M. Pd

menjadi dua semester yang terbagai menjadi semester ganjil dan genap. Dengan lamanya suatu program pendidikannya selama satu semester setara 19 minggu efektif. Setelah melaksanakan perkuliahan selama satu semester, mahasiswa diberikan waktu untuk jeda yakni masa libur dalam kurung waktu 2 hingga 4 minggu. Namun diantara masa libur mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai yang dianggap tidak tuntas atau keinginan dari mahasiswa maka dibuka semester pendek (SP). Pelaksanaan semester pendek diselenggarakan pada akhir perkuliahan semester genap dalam setiap tahunnya, yang berlangsung selama satu bulan yakni Juli hingga Agustus.

Satuan kredit semester merupakan jumlah atau besaran yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pada semester berikutnya dan diimbangi dengan hasil studi perkuliahan pada semester sebelumnya. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menempuh sejumlah mata kuliah dengan pertimbangan dosen pembimbing akademik (PA). besaran maksimal jumlah SKS yang dapat ditempuh oleh mahasiswa sebanyak 24 SKS. Semakin tinggi nilai Indek Prestasi Semester (IPS) dan Indek Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa maka dalam jangka waktu 8 semester dapat menyelesaikan studinya. Hal ini juga dipengaruhi oleh kemampuan mahasiswa tersebut, sehingga kebebasan akademik yang diberikan kepada mahasiswa untuk cepat menyelesaikan masa studinya tergantung dari mahasiswa itu sendiri. Dosen pembimbing akademik sebagai fasilitator yang memberikan solusi dan pertimbangan kepada mahasiswa dalam proses menentukan perkuliahan.

Di sisi lain, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar diperguruan tinggi<sup>6</sup>. Kurikulum dibagi meenjadi kurikulum inti dan kurikulum lokal. Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlakusecaranasionauntukprogramstudi. Adapunhalyangdimuat dalam kurikulum inti adalah tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi. Sedangkan kurikulum lokal adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Untuk mengembangkan kurikulum ini, disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 36 ayat 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2003,<sup>7</sup> mengatakan:

- 1) Peningkatan iman dan takwa
- 2) Peningkatan akhlak mulia
- 3) Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik.
- 4) Keragaman potensi daerah dan lingkungan.
- 5) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
- 6) Tuntutan dunia kerja.
- 7) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 8) Agama
- 9) Dinamika perkembangan global, dan
- 10) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Dengan melaksanakan kurikulum tersebut maka perguruan tinggi akan mampu mengembangkan potensi kepribadian

---

<sup>6</sup>“Rosul Asmawi M, 2005. *Strategi Meningkatkan Lulusan Bermutu Di Perguruan Tinggi*. *Jurnal Makara Sosial Humaniora* Vol. 9 No.2”.

<sup>7</sup>“UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003”.



mahasiswa dan menambah pengalaman untuk proses menunjang ilmu pengetahuan dan didapatnya.

Proses perekrutan calon mahasiswa ditentukan juga oleh keberadaan dan tawaran program studinya. Agar pendidikan dan pengajaran dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka program studi yang tersedia seyogyanya harus sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat, selaras dengan tuntutan zaman, mahasiswa dan tenaga pengajarnya haruslah berbobot, sarana prasarannya harus memadai.

Untuk dapat menghasilkan produk yang baik, maka harus menanam bibit yang baik juga. Sehingga proses seleksinya pun harus baik. Kendala yang sering dihadapi oleh perguruan tinggi dalam mendapatkan calon mahasiswa yang mempunyai kualitas yang baik adalah terbentur dengan pada penerimaan mahasiswa yang terkadang tidak lulus di perguruan tinggi negeri sehingga ini menjadi target perguruan tinggi swasta. Dengan demikian sistem seleksi yang belum mempertimbangkan aspek kualitas calon mahasiswa yang sesungguhnya. Demikian terjadi pada STKIP PGRI Pontianak yang statusnya adalah perguruan tinggi swasta menjadi dilema apabila kekurangan jumlah mahasiswa maka tidak akan mampu untuk membiayai orasional perguruan tingginya. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang kemudian harus menjadi persoalan yang prinsip. Oleh karenanya STKIP PGRI Pontianak dalam proses seleksi mahasiswa baru juga dilakukan dengan penjarangan yang ketat baik dari segi lulusannya maupun fisiknya. Sehingga mahasiswa yang diterima sudah siap untuk mendapatkan transfer ilmu pengetahuan dari dosen. Sejarah STKIP PGRI Pontianak yang berawal dari krisis mahasiswa dan kekurangan peminat sehingga menjadi pemicu untuk berusaha mendapatkan calon mahasiswa yang tidak lulus dari PTN. Seiring perjalanan waktu yang panjang STKIP PGRI Pontianak mulai menata kuantitas dan kualitas.

Penerimaan mahasiswa baru sebanyak-banyaknya masih menjadi pertimbangan yang belum dapat dilaksanakan. Satu sisi penting bagi untuk menerima mahasiswa yang bermutu. Tetapi dari sisi lain dihadapi pada target minimal, yang juga sulit untuk menentukan jumlah minimalnya. Namun pemerintah melalui Dirjen Perguruan Tinggi (DIKTI), telah membuat aturan bahwa setiap program studi yang menerima mahasiswa baru dan rasio antara dosen dengan mahasiswa 1:30 secara idealnya. Untuk perguruan tinggi negeri hal ini tidak masalah tetapi perguruan tinggi swasta ini menjadi pertimbangan yang menyulitkan. Apabila mahasiswanya sedikit maka berdampak pada kurangnya keuangan kampus tersebut.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan dari calon mahasiswa harus dijaring melalui seleksi yang ketat sehingga calon mahasiswa yang diterima masuk dalam standar kualitas yang baik. Karena bagaimanapun mahasiswa tidak lepas dari tanggungjawab terhadap perkembangan sebuah perguruan tinggi. Disamping itu tingkat disiplin mahasiswa perlu ditingkatkan, karena melalui disiplin mahasiswa benar-benar dapat mandiri dan bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan ilmu pengetahuan yang diterimanya.

Selama berdirinya STKIP PGRI Pontianak, proses perekrutan calon mahasiswa dilakukan secara bertahap. Bahkan tidak jarang yang menjadi mahasiswa adalah para guru, birokrat dan pegawai swasta lainnya. Disamping itu juga proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan oleh dosen-dosen yang menawarkan atau mempromosikan kampus ke sekolah-sekolah dan bahkan diberikan prioritas kepada siswa yang memiliki prestasi untuk diterima secara langsung tanpa melalui ujian tes. Hal ini terus berlangsung sepanjang sejarah perjalanan STKIP PGRI Pontianak.

Dosen merupakan instrumen yang sangat menentukan proses pendidikan, karena dari dosenlah proses perpindahan ilmu

pengetahuan dilakukan kepada mahasiswa. Perguruan tinggi yang memiliki tenaga-tenaga dosen yang berkualitas akan banyak diminati oleh masyarakat. Karena itu program untuk meningkatkan kualitas para dosen adalah sebuah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi pada saat ini dan di masa medatang. STKIP PGRI Pontianak memiliki tenaga dosen yang masih sangat terbatas hal ini disebabkan sulitnya mendapatkan dosen yang memiliki strandar pendidikan strata dua (S2) saat kampus ini berdiri<sup>8</sup>. Tidak hanya persoalan sulitnya mendapatkan sumber daya manusia yang berpendidikan S2, namun keadaan saat itu kepentingan yang berorientasikan pada pengembangan diri pun masih lemah. Hal inilah yang menjadikan STKIP PGRI Pontianak mengalami stagnasi dalam beberapa dekade.

Sumber daya manusia (human resource) adalah *the people who are ready willing, and to contribute to organizational goals*. Hal yang dimaksud *organizational goals* bukan hanya untuk pengelolaan sumber daya manusia yang ada di dunia industri, politik, pemerintah, melainkan juga untuk perguruan tinggi, baik secara *sincetific* maupun secara *cultural*<sup>9</sup>. Eksistensi perguruan tinggi menjadi *challenge* sekaligus kebutuhan perguruan tinggi dan stakeholdernya. Perguruan tinggi tentu lebih memfokuskan pada mengurus potensi dosen maupun meminimalisir berbagai kekurangan yang dimilikinya. Sehingga pada akhirnya sumber daya manusia perguruan tinggi mampu menampilkan profil dosen professional sesuai dengan amanah yang dibebankan, mengembangkan Tri Dharma Perguruang Tinggi.

---

<sup>8</sup>“Lihat wawancara bersama bapak Prof. Dr. Hamid Darmadi, M. Pd, dan lihat Arsip sejarah STKIP PGRI Pontianak”.

<sup>9</sup>“Arwildayanto, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi : PendekatanBudaya Kerja Dosen Profesional*. Gorontalo: Ideas Publishing”.

Hal serupa sudah dilakukan para stakeholder STKIP PGRI Pontianak, namun gairah pendidikan di Kalimantan Barat pada umumnya masih kurang mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah dan masyarakat pada khususnya. Menjalankan proses pendidikan pada sebuah perguruan tinggi tidak mudah apalagi mengelola manajemen sumber daya manusianya membutuhkan waktu yang sangat lama. Walau demikian keadaannya STKIP PGRI Pontianak tetap optimis untuk terus melakukan hal yang dapat dilakukan sebagai wujud keseriusan para perintis dan pejuang pendidikan saat itu. Perlu diketahui saat itu sumber daya manusianya banyak direkrut dari guru mulai pendidik sekolah dasar hingga menengah dan beberapa berasal dari Universitas Tanjungpura. Betapa sulitnya mencari tenaga dosen yang peduli dan memiliki komitmen untuk memajukan dunia pendidikan pada perguruan tinggi swasta di Kalimantan Barat.

Sesuatu yang sulit ketika STKIP PGRI Pontianak berdiri yang tidak memiliki fasilitas dan sumber daya manusianya. Melalui pemikiran yang mendalam dan kerja keras para tokoh pendidikan saat itu berjuang agar tetap meneruskan cita-cita bangsa yakni menciptakan sarjana yang memiliki kepribadian tinggi dan intelektual yang cerdas. Berdirinya kampus diawali dengan sebuah keprihatinan, yang serba apa adanya. Sehingga mahasiswa yang melanjutkan perkuliahannya di STKIP PGRI Pontianak hanya sebatas guru yang memang memiliki keinginan untuk kuliah. Situasi yang sangat miskin, wajar ketika kualitas pendidikannya pun tidak dapat bersaing dengan perguruan tinggi di luar Kalimantan.

Dosen dituntut harus memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi yang diiringi dengan kemampuan penyampaian ilmunya kepada mahasiswa. Kaitannya dengan kualifikasi tersebut maka dosen harus memiliki penyetaraan jabatan fungsional minimal asisten ahli. Semakin tinggi jabatan fungsional yang dimiliki

dosen tersebut menunjukkan tingkat kualifikasi dosen yang baik dari aspek prestasi maupun *prestise*. Disamping itu dosen juga harus memiliki tingkat disiplin yang tinggi dalam keilmuannya sehingga kualitas pengetahuannya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Tanpa ada upaya untuk meningkatkan kualitas dosen yang ada sekarang, perubahan-perubahan mendasar pada kurikulum dan metode belajar mengajar akan timpang dan bias kurang efektif. Peningkatan dosen perlu dimulai dari sistem perekrutan peningkatan kemampuan dosen, serta peningkatan karirnya. Tentu saja upaya meningkatkan kualitas dosen perlu juga dengan meningkatkan kesejahteraannya.

Perkembangan dunia pendidikan khususnya pada perguruan tinggi dosen dituntut harus memiliki kualifikasi minimal S2. Jenjang jabatan akademik sangat berpengaruh pada pengembangan diri dosen dan harus melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi sehingga pengalaman dan ilmu pengetahuannya menjadi dasar dalam proses pengajaran di kelas. Kampus STKIP PGRI Pontianak mengalami masa stagnasi ketika tahun 1980 an dan 1990 an dimana dosennya sangat kurang dan pendidikannya pun masih didominasi S1. Seiring perjalanan waktu masa berbenah akhirnya secara perlahan tenaga pendidik yang direkrut harus menempuh pendidikan S2. Hingga tahun 2000 an, dosen di STKIP PGRI Pontianak hampir 50 persen dari jumlah keseluruhannya sudah berkualifikasi magister. Hal ini menjadi komitmen bersama antara yayasan dan lembaga STKIP PGRI Pontianak, yang sampai saat ini dosennya secara keseluruhan sudah melanjutkan pendidikan magister.

Perubahan status dari STKIP PGRI Pontianak menjadi IKIP PGRI Pontianak, mulai dari administrasi hingga tenaga pendidik, mengalami perubahan sangat drastis. Terutama *prestise* dosen dan mahasiswa, hal ini kemudian membuat *civitas* akademika

IKIP PGRI Pontianak berupaya untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh dari berbagai aspek. Dosen yang sudah termotivasi untuk melanjutkan studi lanjut pada jenjang doktor dan diiringi dengan support lembaga yang tidak segan-segan memberikan bantuan biaya kuliah. Komitmen lembaga sangat tinggi untuk hal ini. Perguruan tinggi swasta seperti IKIP PGRI Pontianak yang hingga saat ini berani membiayai kuliah dosennya hingga program doktor dengan biaya lembaga sendiri. Jarang sebuah perguruan tinggi memiliki kemampuan seperti IKIP PGRI Pontianak. Karena dalam mensupport dosen kuliah membutuhkan biaya yang sangat besar, namun dengan tekad dan kerja keras pada pejabat dan pimpinan maka demi meningkatkan kualitas pendidikan di IKIP PGRI Pontianak, dengan jalan apapun dapat ditempuh sepanjang sumber daya manusiannya kedepan bermanfaat bagi pengembang pengetahuan di Kalimantan Barat.

## **2. Penelitian**

Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar serta otonomi keilmuan. Sehingga dosen dibebankan dengan sebuah kewajiban untuk melaksanakan perintah undang-undang tersebut. Penelitian merupakan kegiatan dalam untuk menghasilkan pengetahuan empiric, teori, metodologi, model atau informasi baru guna memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

Kemampuan dasar penelitian untuk melakukan penelitian masih bervariasi, hal ini disebabkan karena jenjang pendidikan yang diperoleh berbeda-beda. Kesempatan untuk melakukan penelitian sering terkendala oleh beban atau tugas mengajar yang cukup besar ditambah lagi dengan jabatan yang terkadang dipangku oleh dosen. Pada STKIP PGRI Pontianak, dosen yang melakukan

penelitian masih sangat rendah. Salah satu halnya adalah ketidakpahaman dan peluang yang diberikan serta biaya dari lembaga yang sedikit. Ini menjadi dosen kurang termotivasi dan berminat. Sementara penelitian merupakan barometer kemajuan ilmu pengetahuan dan perguruan tinggi tersebut.

STKIP PGRI Pontianak telah memberikan peluang bagi dosen untuk melaksanakan penelitian secara internal lembaga, hal ini dilakukan untuk mendorong dosen-dosen muda. Namun pada kenyataannya gerakan itu masih kurang diminati oleh dosen muda. Sumber daya yang memang masih terbatas pada lembaga sehingga porsi untuk pembiayaan penelitian pun disesuaikan dengan kemampuan lembaga. Dengan perubahan status menjadi IKIP PGRI Pontianak, seiring peningkatan mutu dosen maka lembaga penelitian berupaya mendorong dosen untuk mengajukan proposal penelitian ke Dikti. Dalam tahun 2014 proposal penelitian yang diterima oleh Dikti mengalami peningkatan. Namun dosen masih konsentrasi pada penelitian yang dilakukan di lembaga.

Penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi didasarkan kepada semangat pelaksanaan otonomi perguruan tinggi, yakni otonomi keilmuan yang melekat pada dosen dan otonomi pengelolaan keuangan yang melekat pada pengelola perguruan tinggi. Dosen secara individu memiliki kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Sementara itu, setiap mahasiswa memiliki kebebasan akademik. Otonomi keilmuan merupakan prinsip dasar bagi sivitas akademika untuk dipelihara dan dikembangkan dengan berpedoman kepada kaidah dan etika ilmiah. Oleh karena itu, setiap anggota sivitas akademika baik secara perseorangan maupun bersama-sama memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengemban dan melaksanakan otonominya itu, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketika penyelenggaraan penelitian disinergikan dalam

penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan peningkatan mutu penelitian sebagai arah yang hendak dicapai, maka terdapat beberapa sudut pandang tentang orientasi perguruan tinggi dan ilmu pada umumnya. Berdasarkan sudut pandang itu, maka IKIP PGRI Pontianak melaksanakan penelitian lebih kepada penelitian kependidikan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, ilmu pengetahuan merupakan produk pemikiran dan penelitian (pustaka, kancah, dan laboratorium) para ahli pada bidang masing-masing, kemudian dialihkan kepada mahasiswa sebagai pelanjut para ahli tersebut. Produk itu menjadi titik tolak penelitian untuk mengembangkan unsur substansi, unsur informasi, dan unsur metodologi. Dengan cara demikian, temuan baru akan dapat diperoleh melalui penelitian akademik dan penelitian pengembangan dalam konteks kekinian.

Di samping itu, ilmu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penerapan keahlian sivitas akademika dalam menunjang kemajuan masyarakat. Penerapan ilmu dapat dijadikan media untuk mengukur signifikansi ilmu bagi penyelenggaraan pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hal itu, maka dapat dijadikan umpan balik sebagai masukan bagi perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan program studi yang dibutuhkan. Program studi yang dibutuhkan terus dikembangkan, bahkan ditingkatkan.

Dalam penyelenggaraan penelitian, ilmu dipandang sebagai proses. Ilmu dikembangkan melalui cara kerja ilmiah sesuai dengan pendekatan dan model penelitian yang digunakan. Hasil penelitian dialihkan dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Dosen akan mengalihkan bahan pengajaran berdasarkan hasil penelitian. Sementara itu, mahasiswa akan memperoleh unsur-unsur ilmu yang segar dan mutakhir. Hasil penelitian tersebut diuji kembali dalam penyelenggaraan penelitian



berikutnya secara terus menerus dan berkesinambungan.

Di samping itu, penelitian dapat dijadikan sebagai cara kerja untuk memecahkan masalah kemasyarakatan secara ilmiah. Cara pemecahan masalah yang demikian tentu saja sangat tergantung kepada karakteristik dan daya ampuh masing-masing disiplin atau bidang ilmu. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau pendekatan multidisipliner. Dengan demikian, substansi disiplin atau bidang ilmu akan berkembang, karena pada dasarnya ilmu merupakan deskripsi, eksplanasi, dan prediksi tentang kehidupan dalam arti yang luas, mencakup gejala alamiah, gejala sosial, dan gejala budaya.

Perkembangan penelitiandi IKIP PGRI Pontianak, hasil penelitian disinergikan dengan kebutuhan mahasiswa sebagai pemakainya. Sehingga metodologi penelitian disesuaikan dengan keahlian yang telah diajarkan selama kuliah. Hal ini berdampak pada penelitian mahasiswa di lapangan, yang berkonsentrasi penelitian di sekolah-sekolah yang merupakan tempat mereka melaksanakan praktik mengajar. Pada akhirnya hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sering terjadi di sekolah dan dihadapi para guru-guru.

Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, ilmu dipandang sebagai metode. Ilmu ditempatkan sebagai instrumen dan cara kerja untuk memecahkan masalah kemasyarakatan secara ilmiah. Hal itu bermakna bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan wahana penerapan ilmu dan keahlian sivitas akademika dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Unsur substansi, unsur informasi, dan unsur metodologi dari berbagai disiplin atau bidang ilmu yang sangat abstrak dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan

dan sarat masalah yang kompleks.

Di samping itu, cara pemecahan masalah melalui penelitian aksi dan penelitian kebijakan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat akan memperoleh keluaran berupa berbagai masalah penelitian, bahkan *subject matter* disiplin atau bidang ilmu. Hasil penelitian tersebut memperluas besaran wilayah penelitian yang dapat dijadikan subjek penelitian akademik dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama untuk penulisan skripsi atau karya tulis ilmiah lainnya.

Apabila pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dapat dikolaborasikan secara efektif oleh perguruan tinggi, maka hal yang dapat diwujudkan bagi pengembangan penelitian. Yakni, penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi merupakan wahana untuk meningkatkan kualitas penelitian, penyelenggaraan pendidikan merupakan wahana untuk mengembangkan penelitian akademik dan penelitian pengembangan sesuai dengan kompetensi dosen dan kompetensi mahasiswa, penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat merupakan wahana untuk menguji dan menerapkan unsur-unsur ilmu secara integratif, baik dalam kesatuan kegiatan penelitian (interdisipliner) maupun dalam kesatuan besaran program penelitian (multidisipliner). Kemudian penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan wahana untuk mengembangkan penelitian kebijakan dan penelitian aksi yang melibatkan dosen, peneliti, dan mahasiswa sesuai dengan minat, kompetensi, dan kemampuan masing-masing.

Dalam masa tahun 2014 IKIP PGRI Pontianak, sudah memberikan ruang dan kesempatan kepada para dosen untuk mengoptimalkan pada penelitian per bidang ilmu di tiap-tiap program studi. Program ini dimotori oleh Rektor dan jajarannya guna meningkatkan kinerja dan kualitas dosen. Selain itu IKIP PGRI

Pontianak mengadakan kerjasama dengan beberapa sekolah dan dinas pendidikan di semua kabupaten, kota se Kalimantan Barat untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru yang selama ini mengalami hambatan dalam penelitian khususnya penelitian tindakan kelas. Hal ini dilakukan karena tanggung jawab moral sebagai institusi yang membidangi pendidikan dan sama-sama mementingkan kepentingan PGRI.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh dosen-dosen program studi, kemudian dimuat ke dalam jurnal yang telah memiliki ISSN. Kewajiban seorang dosen dalam tugasnya adalah menulis di jurnal baik yang telah terakreditasi maupun yang belum terakreditasi. Untuk saat ini IKIP PGRI Pontianak telah memiliki jurnal kampus yang diberi nama Jurnal Edukasi. Artikel yang dimuat masih mementingkan tulisan dosen, sehingga penulis dari luar terkadang kurang mendapatkan ruang untuk tulisannya di muat pada jurnal tersebut. Ini mungkin menjadi alasan Jurnal Edukasi sulit untuk diperjuangkan mendapat akreditasi.

Selain itu ada terdapat jurnal-jurnal program studi, dan semua program studi sudah memiliki jurnal. Ini ke depan menjadi wadah bagi dosen untuk memuat tulisan dari hasil penelitian yang kemudian diperbaharui menjadi jurnal yang layak untuk mendapatkan akreditasi. Kesempatan yang besar bagi pengelola jurnal dalam meraih akreditasi, sepanjang pengelola memahami prosedur dan aturan yang telah ditetapkan, sehingga jurnal-jurnal program studi yang ada di IKIP PGRI Pontianak mendapat akreditasi dan kepercayaan bagi insan akademisi untuk berlomba membuat artikel yang berkualitas.

Penelitian dapat dipilah berdasarkan tujuan dan pemanfaatan hasilnya. Penelitian dalam tinjauan ini terbagi pada empat tipe, yakni penelitian akademik, penelitian pengembangan, penelitian kebijakan, dan penelitian tindakan. Keempat tipe penelitian

tersebut dapat dipandang sebagai suatu kontinuitas. Penelitian akademik merupakan ciri utama penelitian perguruan tinggi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, penelitian akademik memperoleh porsi terbesar dalam penyelenggaraan penelitian di IKIP PGRI Pontianak.

Penelitian akademik diselenggarakan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akademik, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, yakni Program Sarjana, Magister dan Doktoral. Penelitian akademik lebih diarahkan untuk menemukan dan merumuskan unsur substansi, unsur informasi, dan unsur metodologi baru yang tercakup dalam suatu disiplin atau bidang keilmuan pada setiap program studi. Oleh karena itu, salah satu kriteria masalah penelitian memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga dapat diperoleh temuan baru dalam konteks pengembangan ilmu. Penelitian yang demikian dapat dilakukan oleh dosen secara individual atau kolektif dan oleh mahasiswa melalui penulisan skripsi.

Penelitian pengembangan diselenggarakan berkenaan dengan penerapan ilmu bagi perumusan model atau sistem yang berskala lokal, regional, dan nasional. Tipe penelitian ini dapat dilakukan oleh dosen dan peneliti perguruan tinggi secara tunggal atau berupa kerja sama dengan penyelenggara penelitian lain. Atau yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti). Produk penelitian itu dapat berupa model konservasi atau model pengembangan, atau perumusan sistem yang bersifat inovatif.

Penelitian kebijakan diselenggarakan berkenaan dengan penilaian dan pengukuran terhadap derajat keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Berkenaan dengan hal itu, dapat disusun empat paket penelitian kebijakan, yakni penelitian bahan kebijakan, penelitian koherensi kebijakan,

penelitian pelaksanaan kebijakan, dan penelitian hasil kebijakan. Tipe penelitian ini dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan (internal), atau melalui kerja sama dengan instansi pembuat kebijakan bidang kehidupan tertentu (eksternal), baik pada level kebijakan pembangunan dan kebijakan sektoral maupun kebijakan teknis, dalam hal ini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti). Atau bekerjasama dengan penyelenggara penelitian pemerintah dan dunia bisnis, terutama badan penelitian dan pengembangan departemen teknis.

Sedangkan penelitian tindakan atau *action research* diselenggarakan berkenaan dengan pendampingan, pemberdayaan, dan pengembangan guru-guru dalam memecahkan persoalan yang dihadapi dalam proses mengajar. IKIP PGRI Pontianak berpeluang untuk menyelenggarakan penelitian tipe ini yang disinergikan dengan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat. Tipe penelitian ini dapat diselenggarakan berkenaan dengan pengembangan masyarakat dalam percontohan; dan satuan pendidikan.

Apabila penelitian tersebut dapat dilaksanakan dan diperoleh mutu yang tinggi, maka akan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu serta dapat menunjang kemajuan disektor pendidikan terutama di Kalimantan Barat. Dengan demikian IKIP PGRI Pontianak dapat menempatkan dirinya sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dan pilar utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan sehingga dapat menyandang predikat sebagai agen perubahan di dalam masyarakat.

### **3. Pengabdian Pada Masyarakat**

Sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) di wilayah

masing-masing, lembaga perguruan tinggi diharapkan mampu mendorong penguasaan cabang ilmu dasar dan terapan, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kemampuan tersebut perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi ujung tombak kreativitas dan inovasi guna merespon berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan seni. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, masalah pemerataan dan perluasan, terbatasnya daya tampung perguruan tinggi dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi, dan asimetrisnya penyebaran geografis dan termasuk menyangkut pemerataan perguruan tinggi berkualitas tinggi sehingga: (1) terbatasnya kesempatan bagi calon mahasiswa potensial di daerah untuk memperoleh pendidikan tinggi yang baik; (2) terbatasnya akses pelaku pembangunan kepada sumber daya yang handal.

Kedua, masalah relevansi dan mutu, hal ini merupakan gejala umum yang melintas semua program kelembagaan, sumber daya pendidikan, dan program pembinaan mahasiswa. Semua masalah ini digolongkan dalam satu kategori tentang mutu dan relevansi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya pendidikan tinggi dan pembinaan mahasiswa. Ketiga, masalah perilaku efektif sistem dalam peran kelembagaannya serta keefektifan dalam menyelenggarakan fungsi sistemiknya. Semua masalah ini dimasukkan dalam satu kategori tentang penataan sistem, yang penanganannya menyangkut pengembangan otonomi, akuntabilitas, dan pencitraan publik perguruan tinggi.

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut, tantangan ke depan pembangunan program pendidikan tinggi yang memerlukan perhatian tinggi, adalah sebagai berikut; Pertama, dalam kaitannya dengan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan tinggi, tuntutan meningkatkan layanan yang lebih merata kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga tantangan mewujudkan tersebut disisi lain semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, perkembangan pendapatan masyarakat yang minim, yang sesuai dengan kebutuhan serta pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak merata. Kedua, dalam kaitannya dengan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, bagaimana perguruan tinggi mampu menghadapi arus globalisasi terutama dalam perkembangan teknologi informasi. Dalam permasalahan ekonomi nasional, bagaimana perguruan tinggi, mampu memberikan kontribusi pada proses pemulihan ekonomi nasional.

Dalam perkembangan sosial-budaya, bagaimana norma pendidikan tinggi di Indonesia mampu mengadopsi perubahan yang semula yang mengarah kepada universalisme, komunalisme, dan skeptisme menjadi spesifik, praktis dan berbasis potensi. Dalam bidang politik, paradigma baru di pendidikan tinggi yang menekankan pada prinsip-prinsip peningkatan kualitas yang berkelanjutan, efisiensi, akreditasi, otonomi, dan evaluasi diri, menuntut kemampuan komunikasi publik untuk menyakinkan berbagai kalangan, termasuk kalangan elit politik dan birokrasi. Ketiga, dalam kaitannya dengan penataan sistem manajemen pendidikan tinggi, bagaimana meningkatkan otonomi pengelolaan perguruan tinggi secara luas dan bertahap dengan adanya pola pengelolaan regional, berdasarkan penerapan desentralisasi pendidikan.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan

perguruan tinggi, maka strategi pengembangan IKIP PGRI Pontianak dilaksanakan secara sinergis dengan permasalahan dan tantangan tersebut. Oleh karena itu seluruh arah pengembangannya diarahkan pada konsep MANTAB yakni Mandiri, Amanah, Nalar, Tangguh, Adil dan Bermartabat yang bertujuan untuk melakukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Untuk menerapkan arah pengembangan tersebut diperlukan suatu rencana strategis agar arah pengembangan tersebut dapat dicapai secara bertahap, mantap, dan efektif. Rencana strategis ini juga akan dijadikan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan yang lebih operasional setiap tahunnya.

Pengabdian pada masyarakat pada hakekatnya membantu masyarakat agar masyarakat mampu dan berkeinginan memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian azas pengabdian pada masyarakat sesuai dengan azas kemanusiaan yang menekankan pada usaha pengembangan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pengabdian pada masyarakat harus dilandasi pada kepercayaan dan kemampuan dan kekuatan masyarakat sendiri. Berkenaan dengan pengabdian IKIP PGRI Pontianak terhadap masyarakat, berawal dari pelaksanaan dan pengimplementasian kajian-kajian hasil penelitian yang kemudian dibawa ke sekolah-sekolah yang mengalami permasalahan baik, sebuah strategi, metode, model pembelajaran dan bahkan guru yang sulit untuk membuat perangkat pembelajaran. Maka akan disosialisasikan melalui diskusi, pelatihan dan seminar kepada guru-guru. Sehingga hal tersebut sangat dirasakan manfaatnya bagi guru di sekolah.

Disamping itu kampus IKIP PGRI Pontianak yang duluh sekolah tinggi melaksanakan Kuliah Kerja mahasiswa yang dilaksanakan secara bertahap. Selama 3 bulan dilaksanakan dikampus dan



selama 10 atau 2 minggu di masyarakat. Hal yang dilakukan di dalam kampus yakni pembenahan, pemeliharaan dan bahkan membuat sebuah fisik yang permanen. Seperti bangunan parkir, lapangan volley, lapangan badminton, lapangan basket, yang sekarang dapat dilihat di kampus jalan Ilham. Hal yang serupa ketika mahasiswa melaksanakan kuliah kerja mahasiswa di luar kampus yang dikenal dengan KKM Ekstern. Mahasiswa bersama-sama dosen bertempat tinggal di sebuah desa atau kecamatan tujuan KKM yang kemudian dikerja dan disenergikan dengan keadaan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Namun biasanya kegiatan KKM ekstern lebih mengarah pada praktik dan teknis yang telah dibekali dari bagku kuliah yakni tetap pada ranah pendidikan.

Salah satu yang rutin dilakukan adalah, membentuk kelompok kerja dan bimbingan belajar bagi siswa yang merasa masih belum memahami sebuah materi pembelajaran di sekolah kemudian akan ditambah dengan pembimbingan di sore harinya oleh mahasiswa. Selain itu mahasiswa bersama dosen memberikan pengarahan mengenai bahaya narkoba, kenakalan remaja dan dampaknya terhadap perkembangan generasi muda. Hal ini tidak hanya diikuti oleh siswa saja namun orangtua dan bahkan pemuda setempat pun dilibatkan. Dengan demikian masyarakat yang telah diberikan pemahaman dan pengetahuan walaupun sedikit tetapi paling tidak paham dan mengerti pentingnya peran orang tua dan lingkungan dalam menjaga integritas generasi muda.

Program kuliah kerja mahasiswa tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bahkan akan menambah pengalaman mahasiswa untuk saling berkomunikasi di lingkungan masyarakatnya kelak menjadi guru. KKM intern dan ekstern ini kemudian ditiadakan pada tahun 2009 yang akhirnya diintegrasikan dengan PPL KKM Terpadu. Kuliah kerja mahasiswa yang dibarengi dengan praktik pengalaman lapangan pada dasarnya sama. Yang berbeda adalah

waktu dan system kerjanya. Kegiatan KKM dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Kemudian kegiatannya dilaksanakan dalam waktu 6 bulan atau 1 semester.

Dampaknya juga pasti berbeda ketika dengan KKM ektern yang sebelumnya dilaksanakan. Namun roh dan esesinya sama yakni untuk mengabdikan kepada masyarakat dan mendapatkan pengalaman baru. Kegiatan lain yang merupakan pengabdian kepada masyarakat juga dilakukan oleh dosen yakni seminar dan pelatihan kepada guru-guru di daerah. Seminar dan pelatihan adalah sebuah agenda rutin tahunan sehingga pertemuan antara guru sebagai pengguna ilmu pengetahuan dan dosen sebagai penemu dan mengkaji ilmu pengetahuan akan berasimilasi untuk mendapatkan informasi baru.

Pelatihan guru-guru pada dasarnya adalah untuk mengembalikan dan menambah serta memperbaharui pengetahuan baru yang sedang berkembang. Secara personal guru di daerah banyak yang mengalami masa kejenuhan ketika dihadapkan dengan pengajaran dan metode konvensional. Selain itu juga guru-guru melalui seminar dan pelatihan memiliki kesempatan untuk bertanya dan berkomunikasi mengenai permasalahan di sekolah dan bahkan kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan fungsi dan tugas guru. Sehingga kegiatan seperti ini merupakan moment bagi guru salaiing berbagai pengalaman dan persolaan yang sering di hadapinya.

Peran organisasi mahasiswa baik Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan program studi maupun unit kegiatan mahasiswa selama ini sudah sering mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Melalui berbagai kegiatan baik itu pengumpulan dana untuk menolong sesame, aksi donor darah maupun pengabdiannya dibidang agama. Hal tersebut sudah komitmen bersama anatara masyarakat dan

civitas akademika sehingga terjalin hubungan yang baik.

Perguruan tinggi swasta maupun negeri yang sering turun ke lapangan atau daerah untuk melakukan komunikasi melalui seminar dan pelatihan hanya IKIP PGRI Pontianak. Karena secara organisasi dan profesi yang berada di bawah bendera PGRI maka sudah selayak dan seharusnya IKIP PGRI Pontianak menjadi gerda depan demi melangsungkan arah pendidikan dan memperbaiki sistem pendidikan di negeri ini. Kepedulian IKIP PGRI Pontianak, ketika melihat sejarahnya sudah sejak tahun 1981 berjuang untuk meningkatkan marwah, harkat dan martabat guru. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi ketika sejarah bicara, sehingga pengabdian yang tulus dan respon masyarakat yang positif maka kepercayaan masyarakat kepada IKIP PGRI Pontianak semakin tinggi terutama dalam memajukan dunia pendidikan.

## **B. Peran Yayasan STKIP PGRI Pontianak**

Sebuah lembaga tinggi tentunya memiliki akar sejarah yang telah tertanam jauh. Dengan prinsip membangun kualitas pendidikan melalui lembaga kependidikan adalah awal mula dari sebuah perjuangan. Tokoh-tokoh pendidikan Pontianak saling bersinergi dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang pendidikan.

Perguruan tinggi swasta dalam usahanya untuk mendirikan, diperlukan alat bantu yang kuat. Alat bantu tersebut bisa melalui alat organisasi maupun melalui lembaga masyarakat lainnya. STKIP PGRI Pontianak juga dibangun dengan tujuan agar kuat memerlukan alat bantu yaitu organisasi. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang akrab dan relevan dengan tujuan pendiriannya yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Pada mulanya STKIP PGRI Pontianak dibangun melalui yayasan PGRI dengan sebab para pendiri STKIP PGRI Pontianak adalah

pengurus PGRI Kalimantan Barat. Para pendiri tersebut seperti bapak Hadari Nawawi, bapak M. Ali As, bapak Soedjiman, Arsyid H Thahir, Yoseph Thomas dll. Para pendiri tersebut adalah para guru dan para pendidik yang tergabung dalam sebuah organisasi PGRI. Oleh karena itu, organisasi PGRI adalah alat politik para guru di Kalimantan Barat dalam usahanya memperjuangkan guru dan bidang pendidikan<sup>10</sup>.

Yayasan STKIP PGRI Pontianak pada masa awal permulaan dipimpin oleh Ketua STKIP PGRI Pontianak. Jabatan rangkap tersebut dapat dikatakan hal yang wajar karena para pendiri adalah perangkap kedua jabatan tersebut bahkan lebih. bapak Hadari Nawawi, bapak M. Ali As adalah pendiri yang memang dari awalnya adalah perangkap jabatan dengan tujuan utama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan di Kalimantan Barat yang dirasa sangat minim.

Pada masa kepengurusan awal yayasan dipimpin oleh ketua STKIP PGRI Pontianak. Selanjutnya kepengurusan dilanjutkan oleh bapak Arsyid H Thahir. Hal ini jika diperinci melalui pembabakan waktu, yayasan STKIP PGRI Pontianak meliputi beberapa periode yaitu<sup>11</sup>:

1. Periode I: Ketua Arsyid H Thahir (YPT)
2. Periode II: Ketua H. Syafiudin Umar, BA (YPT)
3. Periode III: Ketua Dra. Hj. Mursinah Noor (YPLP)
4. Periode IV: Ketua Dra. Hj. Mursiah Noor (PPLP)
5. Periode V: Ketua Drs. Effendy HM (PPLP)
6. Periode VI: Ketua Drs. H. Musa, MM (YPT)

Peran yayasan STKIP PGRI Pontianak dalam mengembangkan pendidikan sangat besar. Mengembangkan lembaga dan

---

<sup>10</sup>"Lihat tulisan Drs. H. A. Rahman A. Rani, Kiprah Organisasi PGRI Kalimantan Barat sebagai Organisasi Perjuangan tahun 2006".

<sup>11</sup>"Arsip tentang sejarah STKIP PGRI Pontianak Karya Rahman A. Rani".

berkontribusi besar terhadap calon mahasiswa yang akan melanjutkan studinya di STKIP PGRI Pontianak. Hal ini terlihat dengan daftar mahasiswa STKIP PGRI Pontianak dari permulaan berdiri sampai tahun 1995-an adalah jaringan daripada organisasi ke-PGRI-an yang telah berkembang di Kalimantan Barat.

Lembaga dan yayasan STKIP PGRI Pontianak telah sejak lama bersinergi dalam mengembangkan kampus dan mengembangkan mutu kependidikan terutama di bidang tridarma pendidikan yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu STKIP PGRI Pontianak setiap langkah periode waktu semakin berkembang.

Perkembangan nyata dalam bidang fisik bisa disebutkan atas perjuangan dan jerihpayah daripada kepemimpinan ketua STKIP PGRI Pontianak terutama masa kepemimpinan bapak Drs. H. Muhammad Ali As, SH dan masa kepemimpinan bapak Prof. Dr. Samion H A, M Pd. Masa tunas pembangunan dan masa membangun keharuman adalah tidak berlebihan jika disebut masa *The Great Temple Building*.

Perubahan status STKIP PGRI Pontianak menjadi IKIP PGRI Pontianak adalah salah satu bentuk kontribusi daripada yayasan dalam menatap masa depan yang lebih baik. Semboyan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini, adalah suatu hal yang telah menjadi akar kuat bagi lembaga dan yayasan untuk selalu berkomitmen tinggi dalam mencetak para guru dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia.



Rapat Kerja I YPLP/PPLP seluruh Indonesia tahun 2011  
(Sumber: Arsip Yayasan STKIP PGRI Pontianak)

# BAB V

## PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Latar belakang berdirinya kampus disebabkan oleh adanya kebutuhan tenaga pendidik yaitu guru sebagai agen pembaharu pendidikan di luar Jawa terutama di Kalimantan barat. Perubahan dan perkembangan zaman menuntut dibentuknya lembaga pendidikan tinggi dengan berlandaskan keahlian dan jiwa profesionalisme yang tinggi. Oleh karena itu profesi guru menuju kepada ranah spesialisasi. Teori fungsional yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dapat dikembangkan dalam memberi pemahaman yang lebih mengenai kebutuhan yang disesuaikan dengan fungsinya.

Perkembangan STKIP PGRI Pontianak menuju IKIP PGRI Pontianak meliputi beberapa periode waktu yaitu; (1) Masa Embrio Perjuangan, yaitu masa yang didalamnya syarat akan perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pendidikan Kalimantan Barat. Masa ini dipimpin oleh bapak Prof. Dr. H. Hadari Nawawi 1981-1982, (2) Masa Tunas Pembangunan, yaitu masa pembangunan dengan penuh jerih payah guna menciptakan dan memperjuangkan guru sebagai orang yang mempunyai peran sangat penting dan mulia dalam membangun bangsa dimulai dari membangun lembaga. Masa ini dipimpin oleh bapak. Drs. H. M. Ali As, SH 1982-1998, dan dilanjutkan dengan bapak Prof. Dr. H.



Uray Husna Asmara, M. Pd 1998-2002, (3) Masa lorong Zaman Pembinaan, yaitu masa pembinaan manajemen, ketertiban, kedisiplinan dan keteraturan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan maupun guru. Masa ini dipimpin oleh ibu Dra. Hj. Uray Titin Hiswari, Msi 2002-2006, (4) Masa Membangun Keharuman, yaitu masa pembangunan tahap kedua yang ingin meraih keharuman di seluruh masyarakat. Masa ini dipimpin oleh bapak Prof. Dr. H. Samion HAR, M. Pd 2006-2014 selama 2 periode, dan (5) Masa dari Harum Sampai Mantab, yaitu masa perubahan STKIP PGRI Pontianak menjadi IKIP PGRI Pontianak sebagai langkah awal menuju cita-cita dan kekuatan guru di masa yang akan datang. Masa ini masih dipimpin beliau bapak Prof. Dr. H. Samion HAR, M. Pd 2014-sekarang.

Peran lembaga STKIP PGRI Pontianak terbagi menjadi 3 hal yang menjadi tridharma perguruan tinggi yaitu peran sebagai pusat pengajaran dan pendidikan, peran sebagai pusat penelitian dan pengembangan mutu, dan pusat pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan yayasan STKIP untuk bersinergi secara harmonis dalam usaha pengembangan pendidikan melalui alat organisasi PGRI. Ranah pendidikan akan semakin lancar jika ditunjang dari sisi politik dan hukum yang jelas dan berorientasi kepada karakter dan nasional building.

Melihat kesimpulan di atas, pada bagian akhir akan dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.

Generasi penerus sebaiknya dapat memahami sejarah masa lalu daripada generasi sebelumnya. Hal ini dapat memberi pemahaman akan pentingnya pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa-peristiwa penting yang telah terjadi.

Mengembangkan sikap mental pemahaman dan kesadaran sejarah dengan melihat orientasi proyeksi menatap masa depan yang lebih baik.



Yayasan dan lembaga STKIP PGRI sebaiknya menjalin komunikasi terus menerus dengan berfikir historis guna melihat kebenaran sejarah yang menitikberatkan kepada pengembangan institusi.

Perlunya penyimpanan, penataan dan pengelolaan arsip secara baik dan sistematis baik di lingkungan yayasan maupun lembaga STKIP PGRI Pontianak.



Peletakan Batu I IKIP PGRI Pontianak tahun 2014  
(Sumber: Arsip IKIP PGRI Pontianak)

# DAFTAR PUSTAKA

- Arif, muhamad. 2011. *Pengantar Kajian Sejarah*. Bandung: Yrama Widya.
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arwildayanto, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi : Pendekatan Budaya Kerja Dosen Profesional*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Chairuddin P Lubis, 2004. *Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Disiplin Nasional*. E-USU Repository Universitas Sumatera Utara.
- Davidson, Jeff. 2005. *Change Management, The Complete Ideal's Guides*, Jakarta: Prenada.
- Dubrin, Andrew J. 1990. *Essentials of Management*, Ohio: South-Western Publishing Co.
- Gottschalk, Louis. 2008. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Hussey, D.. E. 2000. *How to Manage Organisational Change*, London : Kogan Page limited.
- Jones, Gareth R., et. al.,2000. *Contemporary Management, Second Edition*, United States of America : The McGraw-Hill Companies.
- Karjadi, M. 1981. *Kepemimpinan (leadership)*. Pelita, Bogor.
- Kartono, Kartini. 2001. *Pemimpinan dan Kepemimpinan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kreitner, Robert and Angelo Kinicki. 2001. *Organization Behavior*, Singapore: McGraw-Hill, Inc
- Margono, S. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Moedjiono, Imam. 2002. *Kepemimpinan Dan Keorganisasian*, UII Press, Yogyakarta
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Ciawi-Bogor : Ghalia Indonesia.
- Pamudji, S. 1995. *Kepemimpinan : Pemerintahan Di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.
- Pranoto W. Suhartono. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbins, Stephen P. 2003. *Organization Behavior*, New Jersey: Prentice Hall IntrnationalInc.
- Rosul Asmawi M, 2005. *Strategi Meningkatkan Lulusan Bermutu Di Perguruan Tinggi*. Jurnal Makara Sosial Humaniora Vol. 9 No.2
- Sjamsuddin, Heliuss. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Ombak.
- Soedjarto at all. 2010. *Sejarah Pusat kurikulum Edisi 2010*. Jakarta: Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan Nasional.
- Thoha, Miftah. 1983. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo. 2006. *Managing Change, Pengantar Manajemen Perubahan, Pemahaman Tentang Mengelola Perubahan dalam Manajemen*, Bandung: ALFABETA.
- Winardi,2000, *Asas-Asas Manajemen*, CV. Mandar Maju, Bandung.

# DOKUMENTASI

The image shows a page from the "DAFTAR NILAI" document. It contains a table with columns for "No.", "Nama", "Mata Pelajaran", and "Nilai". The table lists several students and their grades in various subjects. To the right of the table is a portrait of a student in a suit and tie. The text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" is visible at the top of the page.

Dokumen Daftar Nilai  
Program Studi Administrasi Pendidikan (AP) tahun 1981-1983

(Sumber: Arsip STKIP PGRI Pontianak)





Gedung STKIP PGRI Pontianak lama di Jl Ilham  
(Sumber: Arsip STKIP PGRI Pontianak)



STKIP PGRI Pontianak sebagai Penggerak Pramuka di Pontianak  
(Sumber: Arsip STKIP PGRI Pontianak)





Upacara Bendera HUT RI tahun 2003  
(Sumber: Arsip yayasan STKIP PGRI Pontianak)



Kegiatan BEM Mahasiswa tahun 1986  
(Sumber: Arsip STKIP PGRI Pontianak)





Rapat Terbuka Senat STKIP PGRI Pontianak tahun 2003-2004  
(Sumber: Arsip STKIP PGRI Pontianak)



Sidang terbuka Senat STKIP PGRI Pontianak tahun 1985  
(Sumber: Arsip STKIP PGRI Pontianak)



Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) tahun 1986  
(Sumber: Arsip STKIP PGRI Pontianak)



Prof. Dr. H. Samion H. AR, M. Pd memberikan materi dalam Seminar Pendidikan (PPM) di Kabupaten Sintang tahun 2015

(Sumber: Dokumen Pribadi tahun 2015)



Prasasti Gedung IKIP PGRI Pontianak  
(Sumber: Arsip Dokumen Pribadi)



Prasasti Gedung IKIP PGRI Pontianak  
(Sumber: Arsip Dokumen Pribadi)



Gedung IKIP PGRI Pontianak  
(Sumber Arsip Dokumen Pribadi)



Gedung IKIP PGRI Pontianak  
(Sumber Arsip Dokumen Pribadi)

# LAMPIRAN



SEKELUMIT CERITA  
TENTANG  
BERDIRINYA STKIP PGRI PONTIANAK  
DAN  
PERKEMBANGANNYA

O  
L  
E  
H

DRS. H. A. RAHMAN A. RANI

PONTIANAK

2013

yang berjasah SGA/KPG/KGA/SPG agar minimal memiliki pengetahuan sederajat Sarjana Muda.

Namun dalam perkembangan selanjutnya tidak saja guru-guru yang mengajar yang menjadi mahasiswa STKIP PGRI Pontianak tetapi banyak lulusan/tamatan SLTA yang menjadi mahasiswa STKIP PGRI Pontianak sampai sekarang.

4. Setelah disepakati oleh tokoh-tokoh pendidikan dari ke-3 lembaga/Dinas PD dan K Kanwil Depdikbud dan FKIP UNTAN, maka pada tanggal 12 Juni 1981 dikeluarkan SK pendirian STKIP PGRI Pontianak yang di tanda tangani oleh Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Barat (Bapak Prof. Dr. H. Hadari Nawawi dan Sekretarisnya Drs. Yosep Thomas.

Untuk melengkapi ini silakan baca lampiran tentang susunan Pengurus yang berkiprah pada STKIP PGRI Pontianak.

5. Tempat Kuliah

Karena STKIP PGRI Pontianak belum memiliki gedung sendiri, maka kuliahnya dipusatkan pada SPG Negeri Pontianak yang sekarang telah disatukan/diserahkan ke SMA Negeri I Pontianak Jalan Kalimantan. Dilain tempat yaitu SMKK PGRI yang dulunya bernama SMEA PGRI terletak dekat dengan makam Sungai Bangkong Pontianak yaitu Jalan Aliyang.

6. Periodesasi Pimpinan STKIP PGRI Pontianak

- a. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi

- b. H. M. Ali As. SH.

Periode mendirikan gedung STKIP PGRI Pontianak di Jalan Ilham Kota Baru Pontianak

Pengurus-pengurusnya lihat susunan pengurus terlampir

- c. Periode : Prof H. Uray Husna Asmara, M. Pd.

- d. Periode : Dra. Hj. Uray Titin Hiswari, M. Si.

Mendirikan tambahan lokal belajar yang bertingkat serta membeli tanah untuk kampus II

- e. Periode : Prof. Dr. H. Samion H. AR, M. Pd.

Periode ini banyak perkembangan/kemajuan yang membanggakan dan menggembirakan :

- 1) membangun gedung Perpustakaan pada lokasi Kampus I STKIP PGRI Pontianak Jl. Ilham
- 2) Membangun Kampus II STKIP PGRI Pontianak Jl. Ampera lengkap dengan masjidnya
- 3) Menambah atau membuka Prodi Baru seperti Olah Raga, Bahasa Inggris, Geografi, dan lain-lain
- 4) Melakukan lobi-lobi tentang kegiatan STKIP PGRI Pontianak
- 5) Dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan terutama memperjuangkan perubahan status Sekolah Tinggi (STKIP) menjadi Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP)

7. Pengurus Yayasan STKIP PGRI Pontianak

Pengurus Yayasan STKIP PGRI Pontianak telah mengalami beberapa periode :

- a. Periode I : Ketua Arsyid H.T. (YPT)
- b. Periode II : Ketua H. Syafiudin Umar, BA (YPT)
- c. Periode III : Ketua Dra. Hj. Mursinah Noor (YPLP)
- d. Periode IV : Ketua Dra. Hj. Mursinah Noor (PPLP)
- e. Periode V : Ketua Drs. H. Effendy HM (PPLP)
- f. Periode VI : Ketua Drs. H. Musa, MM (YPT)

Disamping itu ada kepengurusan :

- 1) Dewan Pembina : Ketua Sujiman (Gubernur Kal-Bar)
- 2) Pengurus STKIP PGRI Pontianak sendiri.  
(lihat buku lampiran bersama ini)

8. Tokoh-Tokoh Pendidik/Pendidikan yang patut tidak boleh dilupakan :

- a. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Rahimahullah
- b. Drs. H. Sudarto
- c. H. M. Ali As, SH.
- d. H. Gusti Syamsumin



**KIPRAH ORGANISASI PGRI  
(PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA)  
KALIMANTAN BARAT SEBAGAI ORGANISASI  
PERJUANGAN**



**OLEH:**  
**Drs. H. A. RAHMAN A. RANI,**

**PONTIANAK**  
**8 FEBRUARI 2006**  
**10 MUHARRAM 1427 H**

**CATATAN KEGIATAN – KEGIATAN PGRI  
DI KODYA PONTIANAK  
TAHUN 1979 s/d 1990**

**PGRI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Barat : Prof. Dr. H. Hadari Nawawi.

Kegiatannya :

1. Tahun 1979 dalam rangka pelaksanaan HUT PGRI melakukan Ziarah ke makam pahlawan/tokoh PGRI seperti makam Bachrun ST. Melaro (Rahimahullah), di pemakaman Sungai Bangkong, makam Drs. Supamin D (Rahimahullah), di pemakaman Kp. Tengah Gg. Merak Pontianak. Pengurus PGRI yang ikut adalah Bapak Drs. Hidayat Marzuki (Rahimahullah), dan penulis sendiri. Masih banyak pengurus PGRI Provinsi yang ikut namun penulis tidak ingat nama-namanya.
2. Mendirikan STKIP PGRI Pontianak pada tahun 1981 yang dikelola oleh PGRI Provinsi sendiri yang dipimpin oleh Bapak Prof. Dr. H. Hadari Nawawi.
3. Membentuk Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Pontianak (YPLP-PT-PGRI) dengan dilanjutkan membangun gedung kuliah mahasiswa STKIP PGRI di G. Ilham Pontianak, dengan bantuan jasa HM. Ali AS, SH dan Bapak Drs. H. Sudarno.

**PGRI KODYA BERSAMA PGRI PROVINSI**

1. Melaksanakan HUT PGRI yang bertempat di GOR Pangsuma, acara dihadiri oleh Menteri Dikbud Bapak Prof. Dr. Fuad Hasan dengan acara penyerahan bingkisan oleh pejabat kepada mantan guru SD kelas I nya seperti :
  - Drs. H. Syabhan A. Rasyid kepada Ibrahim Rasyid.
  - H. Ibrahim Salim (Sekda Pemda Kodya) kepada mantan gurunya dari Mempawah.
2. Melaksanakan HUT PGRI di Gedung Auditorium UNTAN. Hadir pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Barat Bapak Gst. Syamsudin.  
Acara penyerahan piada pemenang lomba olah raga dan kesenian yang disampaikan oleh :

tinggi/bagus. Serta telah membuktikan pengabdianya kepada PGRI minimal 1 tahun.

2. Pelatihan atau penataran kepemimpinan bagi anggota pengurus PGRI, baik yang menyangkut kePGRI-an, umum, dan kepribadian.
3. Semua anggota pengurus PGRI wajib memiliki, mempelajari, memahami, menghayati dan melaksanakan AD/ART PGRI.
4. Semua Pengurus PGRI baik tingkat Kabupaten/ Kota maupun Provinsi Kal-Bar melakukan kerja sama dengan:
  - a. Dinas Diknas dan Depag Kab/ Kota dan Provinsi Kal-Bar.
  - b. YPLP (Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan), Dostmen baik tingkat Kab/ Kota, maupun Provinsi Kal-Bar.
  - c. STKIP PGRI Pontianak dan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP-PT) PGRI di Pontianak, FKIP UNTAN dan STAIN.
  - d. Pemda/ DPRD dan Instansi yang terkait dengan pendidikan.
5. Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan sesama pengurus PGRI maupun pengurus dengan anggota PGRI baik di lingkungan DIKNAS, DEPAG, FKIP UNTAN maupun STAIN.
6. Mengkaji pasal-pasal pada AD/ ART guna menyempurnakan yang akan disampaikan pada Kongres PGRI yang akan datang seperti berikut :
  - a. Pembentukan cabang khusus (pasal 20-ART-PGRI) perlu syarat ketentuan yang jelas beserta prosedurnya yang tegas pula.  
Pasal 20 hanya menyebutkan "Memberikan atau menolak permintaan pengesahan cabang-cabang khusus" oleh PGRI Propinsi dengan pertimbangan usul dan pendapat pengurus PGRI Kab/Kota yang bersangkutan.
  - b. Pasal 25 ART-PGRI ayat 1 berbunyi : "Anggota PGRI yang telah membuktikan peran serta aktif dalam kepengurusan dan atau terhadap organisasi".  
Ayat 2 butir a. berbunyi : pernah duduk dalam kepengurusan organisasi pada tingkat yang sama atau paling rendah 2 tingkat di

KUMPULAN DOKUMEN

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

1. SUSUNAN DEWAN PENYANTUN  
STKIP PGRI PONTIANAK
2. SUSUNAN PENGURUS YAYASAN  
STKIP PGRI PONTIANAK
3. SUSUNAN PENGURUS  
STKIP PGRI PONTIANAK.

TAHUN 2007

PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN  
PERGURUAN TINGGI PGRI PONTIANAK  
Jalan prof. Dr. Mohamad Yamin Gang Ilham Kota Baru  
PONTIANAK

SALINAN

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)  
DAERAH IX KALIMANTAN BARAT

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 07/STKEP-PGR/IX/1981

- Mimbang**
1. Bahwa persatuan guru republik Indonesia ikut bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di Negara Republik Indonesia pada umumnya dan di daerah Kalimantan Barat pada khususnya, maka PGRI Daerah IX Kalimantan Barat berusaha ikut bersama pemerintah mengatasi masalah-masalah penempatan calon-calon mahasiswa yang setiap tahunnya semakin meningkat jumlahnya dengan mendirikan sebuah Perguruan Tinggi.
  2. Bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai organisasi profesional di bidang pendidikan, khususnya di daerah Kalimantan Barat merasa ikut bertanggungjawab terhadap pengadaan tenaga guru yang berwenang tingkat SLP dan SLA, serta memiliki anggota yang perlu ditingkatkan kompetensinya sebagai pendidik dan pengajar dalam berbagai bidang studi. Untuk itu dipandang perlu menyelenggarakan sebuah Perguruan Tinggi di bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
  3. Bahwa untuk menyelenggarakan Perguruan Tinggi di bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berada dalam lingkungan PGRI Daerah IX Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat**
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Republik Indonesia.
  2. Program Umum PGRI dan Program Kerja Pengurus Daerah IX PGRI hasil Koperasi Daerah PGRI se Kalimantan Barat pada tahun 1979.
- Memperhatikan**
1. Hasil konsultasi dengan kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat.
  2. Hasil konsultasi dengan Koperasi wilayah II pada tanggal 10 Juni 1981.
  3. Hasil musyawarah dalam rapat Pleno Pengurus PGRI Daerah IX Kalimantan Barat tanggal 9 dan 12 Juni 1981.
- MENUTUSKAN**
- Menetapkan**
- PERTAMA**
1. Mendirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP PGRI yang berkedudukan di Pontianak sebagai pusat dan di Singkawang sebagai Cabang yang pengelolannya berada di bawah Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PGRI Cabang Kalimantan Barat.
- KEDUA**
1. STKIP PGRI untuk pertama kalinya didirikan pada tahun akademik 1981/1982 terdiri atas :
    1. STKIP-PGRI Pontianak dengan :

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DAERAH IX KALIMANTAN BARAT

Nomor : 07/STKIP-PGR/IX/1981

Tanggal : 12 Juni 1981

STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA PIMPINAN STKIP-PGR PONTIANAK

- 1. Ketua : Dr. Hadari Nawawi ✓
- 2. Wakil Ketua I (Bidang Akademik) : Drs. Bawadi Abdullah
- 3. Wakil Ketua II (Bidang administrasi dan Keuangan) : Drs. Sy. Adwan Rusihan
- 4. Wakil Ketua III (Bidang Kemasasiswaan) : Drs. Urai Husna Asmara
- 5. Ketua Departemen Ilmu Pendidikan : Drs. Makmur Salini ✓
- Menangkap Ketua Jurusan Bimbingan dan Pengalihan
- 6. Ketua Departemen Keguruan Ilmu Sosial : Drs. Yoseph Thomas
  - a.1. Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (Ekonomi, Geografi, dan Sejarah) : Drs. Pandil Sastrowardoyo ✓
  - a.2. Ketua Jurusan Pendidikan Moral Pancasila (Civics Hukum) : Bai'Am Alwi, SH ✓
- 7. Ketua Departemen keguruan Ilmu Eksata : Drs. R. Daliman ✓
- Menangkap Ketua Jurusan Matematika
- 8. Pelaksana Teknis Administrasi terdiri :
  - 8.1. Kepala Bagian Pengajaran : Drs. Tuginin. KS
  - 8.2. Kepala Tata Usaha : Suwarno. R ✓
  - 8.3. Kepala Urusan Keuangan : Dra. Sumirah ✓
  - 8.4. Pembantu urusan keuangan : Sa'adiah Bainuri, BA

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 12 Juni 1981

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH IX KALIMANTAN BARAT

Ketua,

td.

Dr. HADARI NAWAMI

Cap

Sekretaris

td

DRS. YOSEPH THOMAS

## PENGURUS YPLP PGRI PONTIANAK

Dari Periode II - III ( dari tahun 1993 – 2008 ).

- Periode II ( Masa bakti 1993 – 1998 ), dengan SK Pengurus YPLP PGRI Pusat  
No. 254A / SK/ YPLP PGRI/ P/ 10/ 1993, dengan susunan pengurus :
 

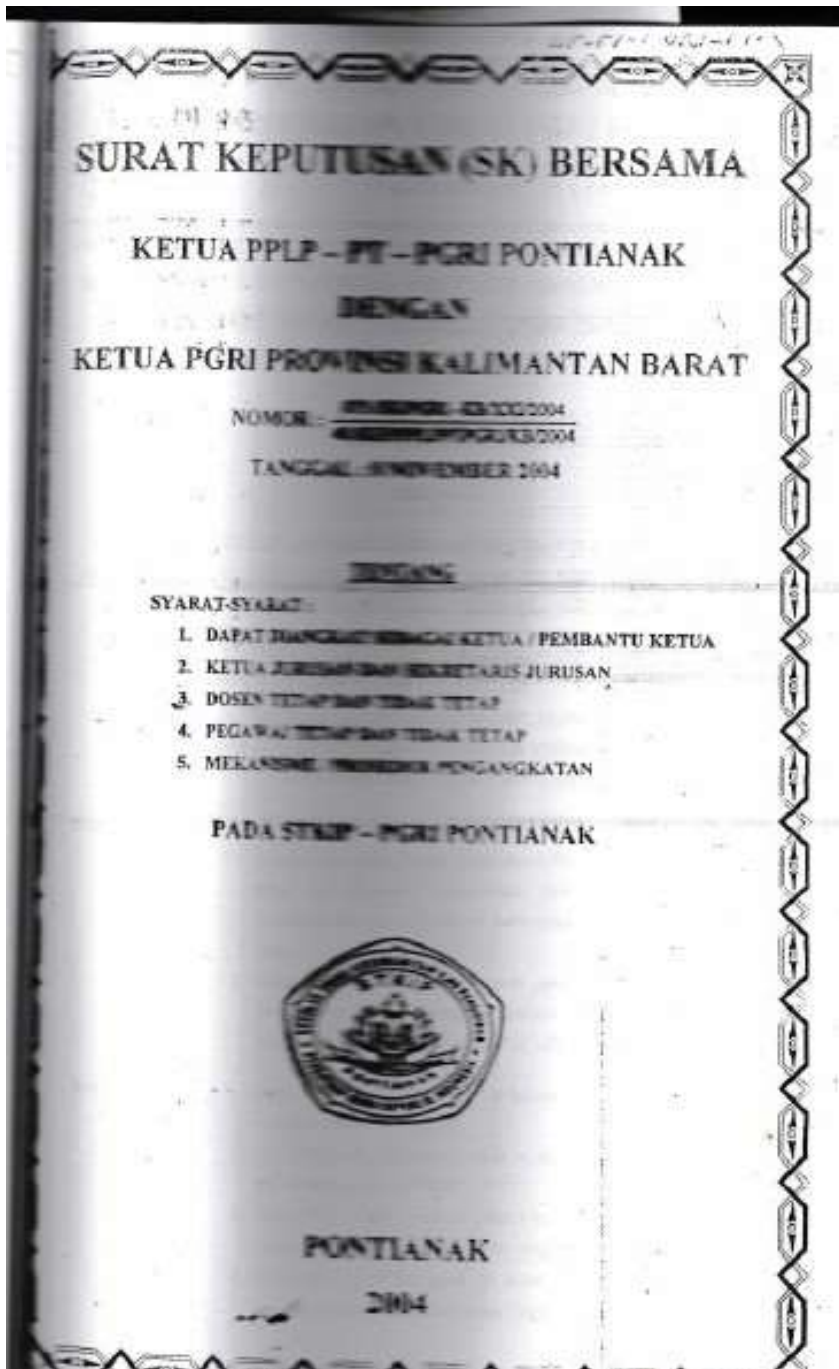
Ketua	: Syafuddin Umar, B.A.
Wakil Ketua	: Dra. Hj. Mursinah Noor.
Sekretaris	: Drs. Musni Umbaran, M.Sc.
Wakil Sekretaris	: Drs. M.Syafei
Bendahara	: Drs. Sy. Adwan Rosihan.
Anggota	: Prof. Dr. H. Hadari Nawawi. Prof. Syamsudin Djamat, M.Sc. Drs. A.M. Ichwani, Drs. Bachri Z A.
  
- Periode III ( masa bakti 1998- 2003 ), dengan SK Pengurus YPLP PGRI Pusat.  
No. 084A/ YPLP PGRI/ P/ 09/ 1998, dengan susunan pengurus :
 

Ketua	: Dra. Hj. Mursinah Noor.
Wakil Ketua	: Drs. Musni Umbaran, M.Sc.
Sekretaris	: Drs. M. Syafei, M.Pd.
Bendahara	: Drs. Sy. Adwan Rosihan.
Anggota	: Drs. H. Effendy HM.
  
- Periode IV ( masa bakti 2003 – 2008 ), dengan SK Pengurus YPLP PGRI Pusat,  
No. 307A/ SK/ YPLP PGRI/ P/ VI/ 2004, dengan susunan pengurus :
 

Ketua	: Dra. Hj. Mursinah Noor.
Wakil Ketua	: Drs. H. Effendy HM.
Sekretaris	: Drs. H. A. Rahman A.Rani.
Bendahara	: Dra. Herawati.
Anggota	: Drs. H. Gusti Mulia. Dr. H.M. Tajudin Nur, M.Si

Perubahan Yayasan menjadi perkumpulan ditetapkan oleh pengurus YPLP PGRI Pusat, dengan SK pada tanggal 18 Juli 2002, No. 2135/









PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN  
**PERGURUAN TINGGI PGRI PONTIANAK**

Jalan Prof. DR. Muhamad Yamin Gang liham Kota Baru  
 PONTIANAK - 78118

Meskipun **SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PENGURUS PGRI PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT DENGAN PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA  
 LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU  
 REPUBLIK INDONESIA PONTIANAK**

Nomor : 075/SK/PGRI - KB/XXI/2004  
40/KEP/PPLPPT/PGRI/KB/2004

TENTANG

**SYARAT-SYARAT DAPAT DIANGKAT MENJADI KETUA STKIP - PGRI PONTIANAK,  
 PEMBANTU KETUA, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, DOSEN TETAP, DOSEN  
 HONOR, SERTA PEGAWAI ADMINISTRASI TETAP DAN PEGAWAI ADMINISTRASI  
 HONOR SERTA PROSEDUR MEKANISME PENGANGKATANNYA PADA  
 STKIP - PGRI PONTIANAK**

**PENGURUS PGRI PROVINSI KALIMANTAN BARAT, PENGURUS PERKUMPULAN  
 PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU  
 REPUBLIK INDONESIA PONTIANAK**

- Mengingat :**
1. Bahwa untuk dapat diangkat sebagai Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Dosen Tetap, dosen Honor, serta Pegawai Administrasi tetap dan Pegawai Administrasi Honor serta Prosedur/Mekanisme Pengangkatannya, perlu dengan suatu syarat dan mekanisme yang tegas dan jelas.
  2. Untuk melaksanakan ketentuan pada point 1 (satu) di atas perlu ditetapkan dengan satu Surat Keputusan bersama antara Pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Barat dan Pengurus PPLP - PT - PGRI Pontianak.
- Mengingat :**
1. ART PPLP - PGRI pasal 18 bahwa Pengurus PGRI Provinsi adalah Pembina PPLP - PT - PGRI.
  2. ART PPLP - PGRI pasal 18 point 3e, tentang "tegas dan wewenang PPLP - PT - PGRI terhadap STKIP".
  3. ART PPLP - PGRI pasal 22 point 3 dan 10 tentang "pertemuan konsultatif antara Pengurus PPLP - PT - PGRI dengan Pengurus PGRI Propinsi"
  4. ART PPLP - PGRI pasal 22 point 9 tentang "awal mengangkat dan menandatangani Ketua Perguruan Tinggi PGRI"



**TUGAS, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN  
ORGAN YAYASAN (PEMBINA, PENGURUS, DAN  
PENGAWAS)  
( UU. No. 16 tahun 2001 / UU. No. 28 Tahun 2004 )**

**I. PEMBINA**

1. Yang dapat diangkat sebagai Pembina. Ps. 28 ayat (3).
  - a. Orang perseorangan sebagai pendiri (anggota PGRI tidak harus ketua atau pengurus), dan/atau
  - b. Mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
2. Mengatasi kekosongan Pembina (Ps. 28 ayat (4))

Dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 hari sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Ps. 28 ayat (3)
3. Kewenangan Pembina. Ps. 28 ayat (2)
  - a. Pembina berwenang melakukan perubahan anggaran dasar
  - b. Mengangkat dan memberhentikan pengurus / pengawas
  - c. Menetapkan kebijakan umum yayasan.
  - d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
  - e. Menetapkan keputusan penggabungan / pembubaran yayasan.
4. Kewajiban Pembina Ps. 30 ayat (1)
  - a. Mengadakan rapat sekurang kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
  - b. Melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak, dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.
  - c. Mengesahkan laporan keuangan tahunan yang dibuat oleh Pengurus dan Pengawas Ps.50 ayat (3)
  - d. Menerima laporan pemberhentian sementara pengurus oleh Pengawas, dan wajib memanggil Pengurus tersebut, dan kemudian mengambil keputusan mencabut pemberhentian atau memberhentikan pengurus tersebut (Ps.43)
5. Larangan bagi Pembina
  - a. Pembina dilarang merangkap jadi pengurus atau pengawas.
  - b. Pembina dilarang menocukan uang yayasan dalam bentuk apapun

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 055/P /2014

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN PGRI PONTIANAK MENJADI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN PGRI PONTIANAK DI PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PONTIANAK DI PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan berdasarkan Surat Usulan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak Nomor 1569/L.308/ PP / 2010 tanggal 28 Juli 2010, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Pontianak di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2008  
TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 61, dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Nama Yayasan adalah nama diri dari Yayasan yang bersangkutan.
2. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Yayasan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Yayasan lain yang mengakibatkan berakhinya karena hukum semua aktif dan pasiva dari Yayasan yang menggabungkan diri kepada Yayasan yang menerima penggabungan dan Yayasan yang menggabungkan diri bubar karena hukum tanpa diperlukan likuidasi.
3. Daftar Yayasan adalah daftar yang diadakan oleh Menteri yang memuat catatan nama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Yayasan.
4. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
5. Orang Indonesia adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
6. Orang Asing adalah orang perseorangan asing atau badan hukum asing.
7. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**BAB II  
PEMAKAIAN NAMA YAYASAN  
Pasal 2**

- (1) Setiap Yayasan harus mempunyai nama diri.
- (2) Nama Yayasan yang telah didaftar dalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh Yayasan lain.
- (3) Nama Yayasan dari Yayasan yang telah berakhir status badan hukumnya harus diberitahukan kepada Menteri untuk dihapus dari Daftar Yayasan oleh likuidator, kurator, atau Pengurus Yayasan.

**Pasal 3**

- (1) Kata "Yayasan" hanya dapat dipakai oleh:
  - a. Yayasan yang diakui sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang; dan
  - b. Yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kata "Yayasan" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di depan Nama Yayasan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan".

*Merah UV N: 28/2009  
H.A. UV N: 16/2001*

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
3. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
4. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

**Pasal 2**

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

**Pasal 3**

- (1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
- (2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

**Pasal 4**

Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

**Pasal 5**

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:
  - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
  - b. melaksanakan kepemimpinan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.

**Pasal 7**

- (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 5499 /AH.01.04.Tahun 2011**

**TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Muhammad Ali, SH, M.Kn nomor 347/Not.MA/VII/2011 tanggal - Juli 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 29 Juli 2011;
- Membaca :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kewajiban, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Menetapkan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PERSATUAN ORU REPUBLIK  
INDONESIA PONTIANAK  
NPWP: 01.099.063.4-701.000**

berkedudukan di Jalan Profesor Dokter Muhammad Yamin-Jalan Ilham Nomor 45, Pontianak, Kalimantan Barat, sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 28 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ali, SH, M.Kn berkedudukan di Kota Depok.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN YALUD, SH, MH.**



**MUHAMMAD ALI, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS**

**SK. Nomor : C-151.HT.03.01-Th 2006**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
KOTA DEPOK**

**SK. Nomor : 9 - XVII - PPAT - 2008**

**JALAN RAYA BOJONGSARI NO. 22**

**SAWANGAN 16516**

**TELP/FAX : 021-740 9474**

**KOTA DEPOK**

**AKTA TANGGAL** 20 Oktober 2010

**NOMOR** 15,-

**S A L I N A N**  
**AKTA PENDIRIAN YAYASAN**  
**PENDIDIKAN TINGGI PERSATUAN GURU**  
**REPUBLIK INDONESIA PONTIANAK**



# DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Bapak Drs Sudarto  
Tempat Tanggal Lahir : Prambanan, 15 November 1933  
Alamat : Jl. Selayar  
Pekerjaan : Sejarawan, Pegawai Kanwil  
No. HP : -  
Status/selaku : Pendiri Kampus STKIP, pelaku
2. Nama : Bapak M. Ali As, SH  
Tempat Tanggal Lahir : Putussibau, 24 Oktober 1928  
Alamat : Jl. PuloWe  
Pekerjaan : Pensiunan PNS, Mantan Ketua pertama (1) STKIP PGRI Pontianak (periode 1982-1999)  
No. HP : -  
Status/selaku : Pendiri Kampus STKIP, pelaku
3. Nama : Bapak Prof. Dr. Uray Husna Asmara, M. Pd  
Tempat Tanggal Lahir :  
Alamat : Komplek UNTAN  
Pekerjaan : Mantan Ketua ke-3 STKIP PGRI Pontianak (periode 1999-2004)  
No. HP : -  
Status/selaku : Pendiri Kampus STKIP, pelaku

4. Nama : Ibu Dr. Hj. Uray Titin Hiswary, M. Pd  
Tempat Tanggal Lahir :  
Alamat :  
Pekerjaan : Mantan Ketua ke-4 STKIP PGRI Pontianak (periode 2004-2009)  
No. HP : -  
Status/selaku : Pendiri Kampus STKIP, pelaku
5. Nama : Bapak Prof. Dr. H. Samion HAR, M. Pd  
Tempat Tanggal Lahir :  
Alamat : Jl Ampera  
Pekerjaan : Ketua ke-5 STKIP PGRI Pontianak, dan Rektor IKIP PGRI Pontianak sampai sekarang  
No. HP : -  
Status/selaku : Pendiri Kampus STKIP, pelaku
6. Nama : Bapak Ferys Zainuddin  
Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 7 Juli 1947  
Alamat : Jl Ampera  
Pekerjaan : Sekretaris Yayasan YPT PGRI  
No. HP : -  
Status/selaku : , pelaku
7. Nama : Dra. Hj. Mursinah Noor  
Tempat Tanggal Lahir : Singkawang, 7 Agustus 1942  
Alamat : Komp. UNTAN Jl. Ketapang  
Pekerjaan : dosen UNTAN, dan dosen IKIP PGRI Pontianak  
No. HP : -  
Status/selaku : pendiri, mantan Ketua yayasan YPLP PGRI Pontianak

8. Nama : Drs. H. Wasli Syafi'i  
Tempat Tanggal Lahir : Sambas, 25 April 1950  
Alamat :  
Pekerjaan : pengurus yayasan YPTPGRI Pontianak  
No. HP : -  
Status/selaku : pelaku, dan saksi
9. Nama : Drs. Suyudono  
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 1 Januari 1951  
Alamat :  
Pekerjaan : dosen Luar Biasa IKIP PGRI Pontianak  
No. HP : -  
Status/selaku : pelaku, mantan mahasiswa BK angkatan 1982
10. Nama : Drs H. Siswoyo, M. Pd  
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 8 Januari 1951  
Alamat :  
Pekerjaan : Kepala Program Studi BK IKIP PGRI Pontianak  
No. HP : -  
Status/selaku : pelaku, pendiri
11. Nama : Mardina, S. Pd  
Tempat Tanggal Lahir : Tayan, 12 Februari 1964  
Alamat :  
Pekerjaan : Staf Gudang IKIP PGRI Pontianak  
No. HP : -  
Status/selaku : pelaku, mantan mahasiswa PPKn angkatan 1986

12. Nama : Hamidi Uba  
Tempat Tanggal Lahir : Mengkudu, 16 Desember 1966  
Alamat :  
Pekerjaan : kepala Perlengkapan IKIP PGRI Pontianak  
No. HP : -  
Status/selaku : Pelaku, Pembantu umum STKIP
13. Nama : Utin Titiek Puspa, S. sos  
Tempat Tanggal Lahir : Batang Tarang, 17 Juli 1963  
Alamat :  
Pekerjaan : Staf Kepegawaian IKIP PGRI Pontianak, dan Kepala TU SMK  
No. HP : -  
Status/selaku : Pelaku, Saksi, dan Pegawai Perpustakaan
14. Nama : Sumardi, S. Pd  
Tempat Tanggal Lahir :  
Alamat :  
Pekerjaan : Staf Yayasan PGRI Pontianak  
No. HP : -  
Status/selaku : Pegawai Yayasan, Saksi
15. Nama : Prof. D. Hamid Darmadi, M. Pd  
Tempat Tanggal Lahir :  
Alamat :  
Pekerjaan : Wakil Rektor I IKIP PGRI Pontianak  
No. HP : -  
Status/selaku : Mantan Pembantu Ketua STKIP PGRI Pontianak, Saksi.

16. Nama : Muhammad Firdaus, M. Pd  
Tempat Tanggal Lahir :  
Alamat :  
Pekerjaan : Wakil Dekan MIPA IKIP PGRI  
Pontianak  
No. HP : -  
Status/selaku : Alumni Mahasiswa, Saksi

# TENTANG PENULIS

**Muhammad Syaifulloh**, lahir di Sleman Yogyakarta 32 tahun yang lalu. Penulis yang hobi olah raga dan makan tempe kripik ini menyelesaikan sekolah dasar dan menengah di Yogyakarta. Gelar S1 diperoleh di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2012 memperoleh gelar S2 di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Penulis yang akrab dipanggil Kang Ipul ini sekarang menjadi dosen pengajar di Program Studi Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Pontianak.

Penulis juga aktif menulis karya tulis ilmiah, antara lain pernah menjadi pemakalah konferensi nasional yang diselenggarakan di UPI Bandung dengan tema "*Pendidikan Indonesia di tengah pusaran kawasan Asia Tenggara*" pada tahun 2013. Penulis sekarang juga aktif sebagai pemimpin redaksi di beberapa jurnal ilmiah di IKIP PGRI Pontianak maupun di Pusat Kajian Sejarah Kalimantan Barat (PUSAKA SEKALBAR).

Beberapa penelitian yang pernah dimuat dalam jurnal antara lain: "*Pemanfaatan Laboratorium Sejarah Sebagai Sumber Belajar Sejarah (Studi Kasus Mahasiswa STKIP PGRI Pontianak tahun 2012)*"; "*Melacak Jejak-Jejak Sejarah Kalimantan Barat Melalui Sejarah Loka*"; "*Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Sebagai Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Masyarakat Sekitar di Kota Pontianak Kalimantan Barat*, dll. Penulis dapat dihubungi di email: paksai\_syae@yahoo.com.

**Eka Jaya Putra Utama**, lahir di Beduai 24 Januari 1983. Menamatkan studi sarjana pendidikan sejarah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan studi magister pendidikan sejarah di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2011. Saat ini merupakan staf pengajar pada Program Studi Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Pontianak. Adapun tulisan yang pernah dipublikasikan adalah "*Indonesia Masa Pra Aksara (2011)*", "*Tanaman Niaga di Borneo Barat Pada Awal Abad Ke-20: Studi Tentang Karet dan Kelapa (2014)*". Selain buku, penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal terbitan kampus baik lokal maupun nasional. Penulis juga sekarang aktif sebagai ketua Lembaga Pusat Kajian Sejarah Kalimantan Barat.

**Basuki Wibowo**, lahir di Banyumas 31 tahun yang lalu. Penulis menyelesaikan sekolah dasar dan menengah di kampung halamannya. Penulis yang mengagumi Gus Dur ini, melanjutkan studi S1 di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2004-2008. Gelar Magister (S2) diperoleh pada tahun 2012 di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Penulis sekarang menjadi dosen pengajar di Program Studi Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Pontianak.

Gerakan bangun tak nyenyak, tidurpun susah, penulis tanamkan sejak dini karena melihat fenomena sejarah dan fenomena dalam bidang pendidikan dewasa ini. Hal ini terbukti dengan keaktifannya mengikuti beberapa organisasi dan lembaga kemasyarakatan. Dan yang masih digeluti sampai sekarang adalah memimpin Taman Baca Masyarakat (TBM) di Pontianak. Penulis juga aktif dalam karya tulis ilmiah, di antaranya sering menjadi narasumber beberapa kegiatan ilmiah di lembaga-lembaga swasta masyarakat maupun perguruan tinggi. Beberapa hasil karya tulisan yang pernah dimuat dalam jurnal antara lain; "*Peran Nahdlatul Ulama Terhadap Pancasila Sebagai Asas Tunggal Pada Masa Orde Baru*"; "*Pembelajaran Sejarah Lisan (Studi Kasus Prodi sejarah*

*UNNES Semarang*"); "Optimalisasi Kraton Kadariyah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Pontianak Kalimantan Barat", dll.

**Yuver Kusnoto**, dilahirkan di Lubuk Resam, Kedurang, Bengkulu Selatan. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di tanah kelahiran. Pada 2003-2007 menyelesaikan kuliah S1 pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP-Universitas Jember. Tahun 2008 memilih Kota Pontianak sebagai tempat pengabdian diri. Di IKIP PGRI Pontianak tercatat sebagai pengajar di Program Studi Pendidikan Sejarah. Tahun 2010-2012 berkesempatan untuk menyelesaikan studi S2 di Universitas Sebelas Maret yang mendapatkan biaya dari Lembaga IKIP-PGRI Pontianak dan BPPS DIKTI. Penulis juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan pernah menjadi narasumber di beberapa kegiatan kemasyarakatan. Beberapa hasil karya tulisan yang pernah dimuat dalam jurnal antara lain; "*Mesir dan Fundamentalisme Islam (Studi Kasus Konflik antara Pemerintah Abdul Nasser dan Ikhwanul Muslimin*". Penulis dapat di hubungi di email: [Yuvenzi17@yahoo.com](mailto:Yuvenzi17@yahoo.com)



Buku ini diterbitkan sebagai bentuk dan buah pikir dan sumbangsih perguruan tinggi, dalam hal ini IKIP PGRI Pontianak terhadap kemajuan bangsa. Sebagai sebuah rumah keluarga, kehangatan, kelesahan dan membaca lingkungan, maka buku ini mencoba memberi jawaban tentang permasalahan-permasalahan terutama dunia pendidikan.

Dalam Usia yang sudah 34 tahun, lembaga ini sudah melewati beberapa babakan sejarah, lengkap dengan anekdot dinomika. Rentang waktu yang lama telah memupuk kedewasaan dalam berpikir dan kematangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Lamanya proses bergelut di dalam dunia pendidikan membuat IKIP PGRI Pontianak mampu memberikan beragam warisan leyaknan, filosofi, nilai, nilai, cita-cita, tindakan, dan pelajaran berharga.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, IKIP PGRI Pontianak menjadi tempat untuk belajar bagi semua lapisan masyarakat di Kalimantan Barat. Keberadaannya merupakan pintu bagi masyarakat menuju pencerahan dalam bidang pendidikan. Kampus merupakan jendela pengetahuan yang merupakan dasar inspirasi dan ilham bagi kemajuan masyarakat setirah. Inilah hakikat dari lembaga pendidikan yang ditawarkan para pendiri ketika mereka merintis lembaga pendidikan, IKIP PGRI Pontianak.



Pustaka Indonesia

Perumahan Nagasari II, Jl. Progo 8-15, Nagasari, SORONG

Telp. (0822) 9312945 / (0822) 443337 Fax. (0274) 62903

e-mail: [pusastaindonesia@indonesiacom.id](mailto:pusastaindonesia@indonesiacom.id)

www.pusastaindonesia.com         

ISBN 979-618-311-1



9 796183 111111